

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Laporan ini berisi pertanggungjawaban kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro Humas dan Protokol) dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Biro Humas sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

Dengan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja Biro Humas dan Protokol di tahun mendatang, khususnya dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Laporan Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024 dapat bermanfaat bagi pengembangan arah kebijakan pada bidang humas dan kerja sama dalam negeri, Sekretariat Tetap Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan kerja sama dalam negeri, serta layanan tata usaha pimpinan dan protokol guna meningkatkan kinerja Biro Humas dan Protokol dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
NIP. 19821224 200604 1 005



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pan Mohamad Faiz Kusuma - NIP:198212242006041005

Digital Signature
mk-1835576452250121092303

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun Anggaran 2024.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan akuntabilitas kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan akuntabilitas kinerja ini.

Jakarta, 20 Januari 2025

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Pan Mohamad Faiz Kusuma W.
NIP. 19821224 200604 1 005



Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Pan Mohamad Faiz Kusuma - NIP:198212242006041005

Digital Signature
mk-1835576452250121092641

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	3
DAFTAR ISI	4
IKHTISAR EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Penjelasan Umum Organisasi	10
1.2. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran	15
1.3. Maksud dan Tujuan	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1. Indikator Kinerja Utama	20
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	24
2.3. Target Kinerja Jangka Menengah	25
2.4. Rencana Kinerja Tahunan	29
2.5. Pagu Anggaran	54
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1. Analisis Capaian Kinerja	56
3.2. Realisasi Anggaran	145
BAB IV PENUTUP	149
4.1. Simpulan Umum	149
4.2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja	150

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, pasca diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, Biro Humas dan Protokol turut mendukung secara langsung kinerja Mahkamah Konstitusi pada dua sasaran strategis lembaga, yaitu:

1. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi; serta
2. Meningkatnya Supremasi Hukum dan Kualitas Putusan, khususnya pada indikator Indeks Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Mahkamah Konstitusi.

Adapun peran Biro Humas dan Protokol disertai target, realisasi, dan capaiannya dijabarkan secara ringkas dalam tabel Indikator Kinerja Utama tahun 2024 berikut:

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri	1.	Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif	100%	145%	145%
		2.	Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	100%	100%	100%
		3.	Layanan Publik Kegiatan Sekretariat Tetap AACC yang efektif	94%	125%	132%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan	1.	Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK	100%	100%	100%
		2.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%	100%	100%
		3.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik	100%	100%	100%
		4.	Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Skor 82	83,71	102%
		5.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Skor 82	82,96	101%
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik	100%	100%	100%
		7.	Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media	100%	100%	100%
		8.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	93,69	104%
		9.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	85,631	109%
		10.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	91,451	120%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	99,9	126%
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	81,6	133%
		3.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	3	100%
		4.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol	B	BB	BB
		5.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
					Nilai Total	110%

Dengan beberapa realisasi di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Humas dan Protokol pada Tahun 2024 sebesar **110%** dengan predikat AA (Sangat Memuaskan).

Namun demikian, secara umum terdapat empat (4) indikator kinerja yang mencapai target di atas 125%, yaitu:

1. Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif mencapai 145%. Pencapaian ini dikarenakan adanya optimalisasi anggaran MK pasca penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Tahun 2024 yang diberikan kepada Biro Humas dan Protokol c.q. Bagian Sekretariat Tetap Asosiasi MK se-Asia (AACC) dan Kerja Sama Luar Negeri. Oleh karenanya, rencana penganggaran yang awalnya diperuntukkan hanya untuk 5 (lima) perjalanan dinas luar negeri, di pertengahan tahun memerlukan penyesuaian dengan adanya penambahan anggaran perjalanan dinas luar negeri bagi Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dan Delegasi MK Indonesia lainnya menjadi sebanyak total 14 (empat belas) tujuan perjalanan dinas luar negeri.

Bertambahnya kegiatan tersebut membawa dampak yang signifikan bagi penguatan dan perluasan hubungan kerja sama antara MK Indonesia dengan mitra kerja di luar negeri, baik kepada mitra kerja yang terhimpun dalam asosiasi, mahkamah konstitusi, maupun perguruan tinggi atau universitas. Hal ini juga membuka peluang kerja sama dan kolaborasi ke depan guna peningkatan pengalaman dan pemahaman YM Bapak/Ibu Hakim terhadap

isu-isu konstitusionalisme global serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai MK Indonesia.

2. Layanan Publik Kegiatan Sekretariat Tetap AACC yang efektif mencapai 132%. Pencapaian hal tersebut disebabkan adanya kegiatan internasional AACC yang melebihi target sebagai bentuk pelaksanaan amanah MK Indonesia sebagai Sekretariat Tetap AACC. Pada 15 Agustus 2024, MK Thailand sebagai Presiden AACC melalui Surat Nomor 0015.1/1323 memberikan mandat kepada MK Indonesia selaku Sekretariat Tetap AACC untuk menyelenggarakan Meeting of Secretaries General of AACC 2024 sebagai bagian dari rangkaian Kongres ke-6 AACC dan Board of Members Meeting (BoMM), di mana rencana Presiden AACC sebelumnya bahwa Meeting of Secretaries General sejatinya diagendakan untuk diselenggarakan oleh MK Thailand. Oleh karena keputusan ini merupakan mandat dari organisasi internasional maka MK Indonesia melalui Biro Humas dan Protokol melaksanakan tambahan kegiatan internasional AACC tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmennya di tingkat internasional. Penyelenggaraan tambahan kegiatan internasional ini telah membawa dampak kepercayaan yang signifikan dari negara-negara anggota AACC, khususnya dari Presiden AACC dan MK Thailand, terhadap komitmen dan profesionalitas MK Indonesia dalam membangun komitmen strategis di antara para negara anggota AACC.
3. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri mencapai 126%, di mana hal tersebut merupakan presentasi dan capaian persentase TKDN tertinggi bagi Biro Humas dan Protokol di Tahun 2024 sebesar 99.9% sebagaimana tercatat dalam aplikasi SAKTI, Kementerian Keuangan. Dengan pencapaian ini maka target persentase TKDN bagi Biro Humas dan Protokol akan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya.
4. Indeks ASN BerAKHLAK yang mencapai 133% merupakan nilai generik bagi seluruh unit kerja di MK sebagai bentuk konversi penilaian yang diberikan oleh Kementerian PANRB melalui Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, di mana nilai-nilai ASN BerAKHLAK telah diterapkan di Biro Humas dan Protokol dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari.

Di samping itu, terdapat pula beberapa indikator yang patut menjadi perhatian penting, yakni terhadap sasaran strategis meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan, di mana seluruh indikator telah mencapai target, khususnya untuk Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berhasil meningkatkan skor

Keterbukaan Informasi Publik yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dari tahun sebelumnya 90,24 menjadi 93,69 di tahun 2024, sehingga Mahkamah Konstitusi mendapatkan kategori kualifikasi tertinggi, yaitu “Informatif”.

Selanjutnya, terkait indikator kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol, secara keseluruhan telah tercapai dengan baik, termasuk perihal Evaluasi SAKIP tahun 2024 yang mencapai predikat “Sangat Baik” (BB), serta penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu secara 100%, di mana Biro Humas dan Protokol merupakan unit kerja dengan jumlah SPBy (Surat Perintah Bayar) terbanyak dan tercepat penyelesaiannya di Mahkamah Konstitusi.

Dari sisi anggaran, untuk tahun 2024 Biro Humas dan Protokol juga memiliki capaian sangat baik, dengan pengelolaan anggaran sebesar Rp. 24.320.237.000 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.319.966.600 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), di mana hal tersebut mencapai tingkat penyerapan anggaran sebesar 100% (seratus persen).

BAB I

PENDAHULUAN

Setiap entitas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari akhir periode anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini merupakan dokumen tahunan yang menguraikan pertanggungjawaban kinerja suatu entitas dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Mahkamah Konstitusi juga telah menetapkan peraturan sejenis, yakni Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I, dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang dapat diukur kepada pihak yang memberikan mandat atas pencapaian yang seharusnya dilakukan dan juga sebagai langkah perbaikan terus-menerus bagi entitas pemerintah guna meningkatkan kinerjanya. Penyusunan laporan ini menjadi tanggung jawab Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai salah satu unit kerja dalam entitas tersebut untuk tahun 2024.

Laporan Kinerja ini dibuat dengan tiga fokus utama, yaitu: (1) Implementasi Akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (2) Tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan; dan (3) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran.

1.1. Penjelasan Umum Organisasi

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi membentuk Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenangnya (sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UU MK). Kepaniteraan bertanggung jawab atas tugas administrasi teknis pengadilan Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UU MK), sementara Sekretariat Jenderal berperan dalam fungsi administrasi umum (sesuai Pasal 7B UU MK).

Seiring dengan berlakunya UU MK, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 mengenai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang kemudian mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012. Berkenaan dengan hal tersebut, MK juga telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen 3/2019).

Biro Humas dan Protokol, sebagaimana termaktub dalam Persekjen 3/2019, bertanggung jawab atas hubungan masyarakat, kerja sama dalam negeri, sekretariat tetap AACC, kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol. Tugas ini menempatkan tanggung jawab besar pada Biro Humas dan Protokol dalam upaya membangun Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam artian Biro Humas dan Protokol memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional MK, terutama hubungan kerja sama baik pada tatanan nasional maupun internasional, komunikasi dan diplomasi, serta pengelolaan keprotokolan dan pelayanan kepada pimpinan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Humas dan Protokol berfungsi sebagai pelaksana hubungan masyarakat, kerja sama luar negeri, kesekretariatan tetap Asosiasi MK se-Asia dan/atau institusi serupa, serta pelaksana ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan. Sebagai unit eselon II di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro, yang memiliki tiga Bagian dan enam Sub Bagian di bawahnya. Struktur organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dapat ditemukan pada gambar terlampir.

Struktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Berdasarkan Persekjen Nomor 3 Tahun 2019



Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tata kerja yang didukung oleh 3 (tiga) Bagian, yaitu:

a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri

mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, pers dan kerja sama dalam negeri serta kerja sama antar lembaga.

Pada bagian ini bertugas untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terbuka mengenai kegiatan MK kepada masyarakat, media, dan pihak terkait lainnya. Selain itu meningkatkan dan memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga di dalam negeri.

b. Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri

mempunyai tugas fasilitasi kesekretariatan tetap AACC dan/atau institusi sejenis serta pelaksanaan dan pengembangan kerja sama luar negeri.

c. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

Bagian ini bertugas menyusun dan mengatur penyelenggaraan acara resmi MK, seperti pertemuan dengan pejabat tinggi negara, kunjungan internasional, serta pengelolaan segala hal terkait protokol.

Biro Humas dan Protokol memiliki peran yang **strategis** dalam mendukung pencapaian tujuan MK, terutama dalam tiga aspek utama. *Pertama*, dalam **menegakkan hukum dan keadilan**, Biro Humas memastikan informasi terkait peran MK disampaikan dengan jelas dan dapat diakses oleh publik, sehingga masyarakat lebih memahami kontribusi MK dalam menjaga konstitusi dan menegakkan keadilan. *Kedua*, melalui **peningkatan akuntabilitas dan transparansi**, fungsi hubungan

masyarakat mendukung pelaksanaan tugas MK yang terbuka, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. *Ketiga*, dalam **peningkatan citra internasional**, Biro Humas dan Protokol berperan penting dalam memperkuat kerja sama luar negeri, yang membantu mempromosikan peran MK di tingkat global dan meningkatkan pengenalan internasional terhadap lembaga ini, termasuk dalam menyebarkan nilai-nilai universalisme dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa isu-isu strategis (*strategic issues*) yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh Biro Humas dan Protokol pada 2024, antara lain, yaitu:

1. Tantangan dalam Komunikasi Publik:

- a. **Isu Transparansi dan Aksesibilitas Informasi:** Meskipun MK telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi, tantangan terbesar adalah bagaimana menyampaikan informasi yang kompleks dan teknis kepada publik dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami, khususnya yang berkaitan dengan proses penanganan perkara beserta Putusannya.
- b. **Menghadapi Berita Palsu dan Misinformasi:** Dengan berkembangnya media sosial, berita palsu yang menyangkut MK atau proses peradilan konstitusional menjadi tantangan serius. Biro Humas perlu membangun strategi yang efektif untuk menangkal misinformasi dan memberikan klarifikasi, khususnya yang berkaitan dengan kelembagaan MK dan personal YM Bapak/Ibu Hakim Konstitusi.

2. Koordinasi dalam Kerja Sama Dalam Negeri:

- a. **Menjaga Independensi MK:** Keputusan MK yang terkadang tidak sejalan dengan kepentingan politik tertentu bisa memengaruhi hubungan dan koordinasi dengan mitra kerja di dalam negeri, baik Kementerian/Lembaga Negara maupun universitas dan organisasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam menjalin hubungan kerja sama guna menjaga independensi MK.
- b. **Persebaran Kerja Sama:** Banyaknya komitmen kerja sama yang dibuat oleh MK kepada mitra kerja selama 21 tahun sejak MK berdiri pada 2003 menjadi tantangan tersendiri, khususnya dalam mengelola dan menindaklanjuti kerja sama yang telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman (MoU) ataupun Perjanjian Kerja Sama.

3. Koordinasi dalam Kerja Sama Internasional:

- a. **Pengelolaan Jejaring Internasional yang Efektif:** Meningkatnya interaksi dengan institusi internasional, seperti AACC atau asosiasi serupa, telah membawa tantangan dalam hal koordinasi dan pengelolaan komunikasi antarnegara. Biro Humas dan Protokol perlu memastikan bahwa kerja sama yang telah terbina tetap berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan strategis MK.
- b. **Menjaga Citra MK di Mata Dunia:** Dengan diberikannya mandat kepada MK Indonesia sebagai Sekretariat Tetap AACC maka setiap perencanaan asosiasi dan koordinasi di antara negara-negara anggota AACC menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Terhambatnya koordinasi dan komunikasi terhadap negara-negara anggota dapat menurunkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap MK Indonesia di mata dunia.

4. Pengelolaan Protokol yang Kompleks:

- a. **Penyelenggaraan Kegiatan Strategis:** Kegiatan strategis yang melibatkan pimpinan tinggi negara atau tamu internasional memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati dan detail. Adanya kesalahan dalam pengaturan acara dapat berdampak pada citra baik MK dan mempengaruhi hubungan kelembagaannya dengan pihak lain.
- b. **Keterbatasan SDM Protokol:** Banyaknya kegiatan pimpinan dalam waktu yang bersamaan dengan lokasi yang berjauhan, khususnya berbeda daerah, membawa kesulitan dan tantangan tersendiri bagi Protokol untuk memberikan layanan yang optimal di tengah keterbatasan jumlah SDM yang tersedia.

5. Tantangan dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):

- a. **Pengembangan Kapasitas Tim:** Biro Humas dan Protokol membutuhkan staf yang memiliki keterampilan khusus di berbagai bidang, seperti komunikasi, manajemen acara, serta pengetahuan tentang protokol internasional dan kebijakan hukum. Pengembangan kapasitas SDM menjadi hal krusial yang perlu dilakukan ke depan agar mampu memenuhi tuntutan tugas sekaligus menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
- b. **Linearitas Jabatan dan Pelaksanaan Tugas:** Adanya penempatan pegawai yang memegang jabatan fungsional berkaitan dengan Tupoksi Biro Humas dan Protokol di luar unit kerja menyebabkan pelaksanaan tugas-tugasnya menjadi tidak optimal.

Selain itu diperlukan koordinasi yang lebih intens agar kebijakan dan strategi unit kerja dapat tersampaikan dengan baik oleh pemangku Jabatang Fungsional terkait.

1.2. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas, dan Anggaran

a. Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2024, Biro Humas dan Protokol mengalami dinamika signifikan dalam lingkup sumber daya manusia (SDM) akibat adanya perubahan personel pada pemangku jabatan struktural maupun pada tataran pelaksana yang berada di bawahnya. Meneruskan kepemimpinan yang dimulai dari 2023, secara teknis keseharian aktivitas Biro Humas dan Protokol dipimpin pejabat Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol yaitu Budi Wijayanto yang secara definitif menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol. Baru pada tanggal 30 September 2024, melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 359 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya secara resmi diberi tanggung jawab menjadi pimpinan Biro Humas dan Protokol.



Keterangan: Pengucapan sumpah jabatan Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya selaku Kepala Biro Humas dan Protokol (kiri) pada Senin, 7 Oktober 2024 di lantai 10 Gedung 1 MK.

Pada 23 Januari 2024, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, terdapat promosi dan rotasi di tubuh Biro Humas dan Protokol. Pegawai Biro Humas dan Protokol, beberapa di antaranya mendapatkan promosi jabatan, baik menduduki jabatan di dalam Biro Humas dan Protokol sendiri, maupun mendapatkan kepercayaan di unit lain. Begitu pula sebaliknya, Biro Humas dan Protokol juga memperoleh pegawai yang mendapatkan promosi dari unit lain. Pada kesempatan yang sama, terdapat rotasi pegawai antar unit, baik dari Biro Humas dan Protokol mengisi jabatan di jenjang yang sama ke unit lain, maupun pegawai unit lain mengisi jabatan dengan jenjang yang sama di Biro Humas dan Protokol.



Keterangan: Pengucapan sumpah jabatan terhadap 43 pegawai yang untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, pada Selasa, 23 Januari 2024 di Lobby Sidang Pleno Lt. 2 Gd. 1 MK.

Selain adanya promosi dan rotasi yang telah disebutkan, terdapat pergeseran pegawai selama 2024 yang diatur dalam Surat Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Beberapa di antaranya merupakan jabatan fungsional tertentu atau pelaksana teknis di unit lain yang selanjutnya bertanggung jawab kepada jabatan struktural di Biro Humas dan Protokol. Hal ini didasari pada kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol. Seperti misalnya pengaturan pegawai dengan jabatan Analis Hukum yang berada di Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan yang

mendapatkan tugas untuk melekat pada Hakim Konstitusi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Adanya promosi dan rotasi menjadi capaian sekaligus tantangan bagi Biro Humas dan Protokol dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Meskipun dihadapkan dengan tuntutan penyesuaian diri bagi yang berpindah dari atau ke unit lain, namun tujuan organisasi harus tetap dicapai tanpa harus menunggu masing-masing pegawai beradaptasi dengan kondisi yang baru. Berbeda dengan kondisi pada 2023 yang masih terdapat kekosongan, hingga 31 Desember 2024 jabatan struktural di Biro Humas dan Protokol sudah lengkap terisi, yaitu terdapat 3 (tiga) orang pejabat struktural administrator (eselon III) dan 6 (enam) orang pejabat Pengawas (eselon IV).

SDM yang ada di Biro Humas dan Protokol sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 115 orang, yang terdiri dari 78 orang berstatus PNS baik yang ditugaskan secara langsung di Biro Humas dan Protokol maupun yang masih berada di bawah penugasan unit lain, 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 29 orang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

SDM yang berada pada tanggung jawab Biro Humas dan Protokol memiliki banyak ragam jabatan di antaranya adalah Pranata Humas, Pranata Keprotokolan, Penerjemah, Penelaah Teknis Kebijakan, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Analis Hukum, Analis SDM Aparatur, Pengolah Data Informasi, Pranata Komputer, Penyuluh Hukum, Arsiparis, Analis Keamanan, Ajudan Pimpinan, Fotografer, Operator Persidangan, Sekretaris Pimpinan, Jurnalis, Kameramen, Editor naskah, Penata Desain Grafis, dan Resepsionis.

Pejabat Struktural Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2024

Bagian	Jumlah
Kepala Biro	1 orang
Kepala Bagian	3 orang
Kepala Sub Bagian	6 orang
Total	10 orang

SDM Biro Humas dan Protokol berdasarkan Status Pegawai Tahun 2024

Status Pegawai	Jumlah
PNS	78 orang
PPPK	8 orang
PPNPN	29 orang
Total	115 orang

b. Fasilitas

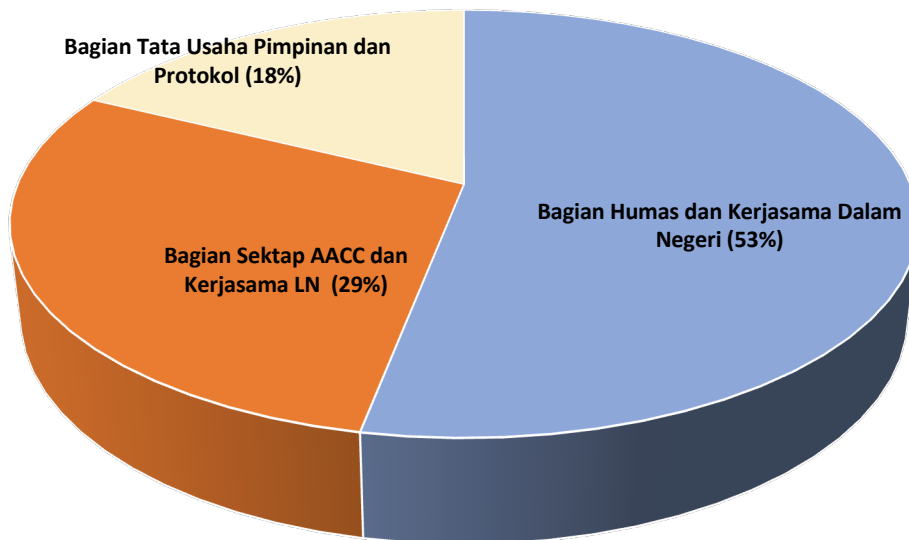
Dengan ragamnya tugas dan fungsi yang dimiliki, selama 2024 terdapat penyebaran SDM Biro Humas dan Protokol di beberapa ruang kerja lengkap dengan fasilitasnya,. Secara tersebar pegawai di lingkungan Biro Humas dan Protokol ditempatkan di tiga gedung Mahkamah Konstitusi. Pegawai pada Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri – Hubungan Antar Lembaga berada di Gedung 3 MK. Kemudian pegawai pada Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri serta Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol berada di Gedung 1 dan 3 MK. Khususnya pegawai dengan penugasan melekat pada Hakim Konstitusi, Panitera, dan Sekretaris Jenderal akan ditempatkan di ruang yang sama dengan pimpinannya.

c. Anggaran

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebesar Rp.24.320.237.000,-.

Pagu Anggaran Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2024

Bagian	Jumlah
Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri	Rp.12.901.347.000
Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama LN	Rp. 7.102.332.000
Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Rp. 4.316.558.000
Total	Rp. 24.320.237.000



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, yang merupakan unit eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Laporan ini bertujuan untuk menilai dan mengukur pencapaian kinerja Biro Humas dan Protokol sepanjang tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, guna mengetahui sejauh mana tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

Sebagai hasil dari evaluasi tersebut, laporan ini memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan dasar yang kuat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Humas dan Protokol pada periode berikutnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Indikator Kinerja Utama

Biro Humas dan Protokol menindaklanjuti turunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi yang berisi visi, misi, tujuan, serta kebijakan untuk periode 2020-2024 melalui program kerja dan kegiatan. Renstra tersebut dirancang untuk mendukung peningkatan kinerja MK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar sejalan dengan visi, misi, dan program yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan yang terstruktur, Renstra dimaksud bertujuan menciptakan sinergi antara Biro Humas dan Protokol dengan berbagai unit kerja lainnya guna mencapai hasil yang optimal.

Sebagai dokumen acuan, Renstra menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih terperinci. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai alat penguat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja yang telah dirumuskan. Dengan rencana yang dituangkan sebagai dokumen resmi tersebut, Biro Humas dan Protokol diharapkan mampu menyelaraskan berbagai aspek operasional dengan strategi besar yang ditetapkan sekaligus untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terukur, terarah, dan mendukung tercapainya tujuan strategis MK.

Di sisi lain, Renstra dimaksud juga dirancang sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pelaporan atas kinerja yang telah dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Evaluasi berbasis Renstra ini memungkinkan adanya identifikasi keberhasilan ataupun area yang memerlukan perbaikan, sehingga kinerja institusi dapat terus ditingkatkan.

Adapun untuk tahun 2024, telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024. Dalam peraturan dimaksud tertuang Indikator Kinerja Utama Biro Humas dan Protokol yang mengatur beberapa hal sebagai berikut:

Tugas:

Melaksanakan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri, sekretariat tetap AACC dan kerja sama luar negeri, serta tata usaha pimpinan dan protokol.

Fungsi:

1. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama dalam negeri;
2. Pelaksanaan kesekretariatan tetap asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia dan/atau institusi sejenis dan kerja sama luar negeri; dan
3. Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan.

Adapun untuk Sasaran Kegiatan dan Target dari tahun 2020 s.d 2024, telah diatur sebagaimana berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan Dalam Negeri	1.	Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif	80%	95%	95%	95%	100%
		2.	Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	80%	80%	80%	90%	100%
		3.	Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif	80%	80%	80%	85%	94%
2.	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan Keprotokolan	1.	Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		2.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%
		3.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
		4.						Skor 82
		5.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol					Skor 82
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik				100%	100%
		7.	Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media				95%	100%
		8.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik MK				Skor 75	Nilai 90
		9.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Nilai 78
		10.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 76
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61
		3.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3
		4.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol					B
		5.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu					100%

Untuk tahun 2024, terdapat beberapa Indikator yang merupakan indikator yang baru ditetapkan dan belum diterapkan pada tahun 2023, yaitu:

- Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
- Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara

- Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri
- Indeks ASN BerAKHLAK
- Tingkat Kematangan Manajemen Risiko
- Nilai Evaluasi SAKIP
- Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu

Perubahan tersebut sebagaimana tercatat dalam konsiderans Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 311 Tahun 2024 dikarenakan perlunya melakukan penyempurnaan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil dan indikator kinerja yang SMART hingga unit terkecil.

Adapun indikator kinerja yang SMART adalah kerangka konseptual untuk merancang ukuran kinerja yang jelas, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsep SMART digunakan untuk memastikan bahwa indikator kinerja yang dirancang memberikan arahan yang spesifik, memberikan data yang dapat diukur, realistis untuk dicapai, relevan terhadap tujuan strategis, dan memiliki batas waktu yang jelas.

1. **Specific (Spesifik):**

Indikator harus dirancang dengan fokus yang jelas pada aspek tertentu dari kinerja yang ingin dicapai. Spesifikasi ini memungkinkan semua pihak memahami dengan tepat apa yang diukur, menghindari ambiguitas, dan mengarahkan perhatian pada hasil tertentu.

2. **Measurable (Terukur):**

Indikator kinerja harus mencakup ukuran yang dapat dihitung atau dinilai secara kualitatif. Pengukuran ini memungkinkan kemajuan kinerja untuk dimonitor, dibandingkan dengan target, dan dapat dievaluasi secara konkret dan berkelanjutan.

3. **Achievable (Dapat Dicapai):**

Indikator kinerja harus dirancang agar realistis dan sesuai dengan kemampuan unit kerja atau individu yang bertanggung jawab. Menetapkan target yang terlalu tinggi atau tidak realistis dapat menyebabkan demotivasi, sementara target yang terlalu rendah dapat mengurangi tantangan.

4. **Relevant (Relevan):**

Indikator harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Relevansi ini memastikan bahwa upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator tersebut berkontribusi pada pencapaian visi, misi, atau strategi yang lebih besar.

5. **Time-Bound (Berbatas Waktu):**

Indikator kinerja harus memiliki batas waktu yang spesifik untuk pencapaian. Tenggat waktu membantu menciptakan *sense of urgency* dan memberikan titik evaluasi.

2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Indeks Kinerja Utama, maka Biro Humas dan Protokol memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2024 sebagai berikut.

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri	1.	Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif	100%
		2.	Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	100%
		3.	Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif	94%
2.	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan	1.	Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK	100%
		2.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%
		3.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik	100%
		4.	Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Skor 82

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
		5.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Skor 82
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik	100%
		7.	Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media	100%
		8.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan	100%
		9.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78
		10.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61
		3.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3
		4.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol	B
		5.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%

2.3. Target Kinerja Jangka Menengah

Sebagai salah satu unit kerja pilar Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol memegang peran strategis dalam menjamin terselenggaranya komunikasi publik yang efektif, memperluas hubungan internasional, serta mengelola kegiatan keprotokolan dengan standar yang tinggi. Biro ini bertugas tidak hanya memastikan transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat, tetapi juga mengembangkan diplomasi hukum dan konstitusi melalui kolaborasi dengan mitra kerja internasional. Dengan tanggung jawab tersebut, target jangka menengah biro ini dirancang untuk memperkuat peran dan kontribusinya dalam mendukung visi dan misi Mahkamah Konstitusi.

Dalam menghadapi perubahan global dan perkembangan teknologi informasi, Biro Humas dan Protokol menetapkan sejumlah target jangka menengah yang berorientasi pada sasaran strategis:

1. Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri
2. Meningkatnya kualitas penyebaran informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan
3. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol

Dengan program yang terencana dan langkah-langkah yang adaptif, Biro Humas dan Protokol berkomitmen untuk terus mendukung penguatan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terpercaya di mata masyarakat dan mitra global, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum di Indonesia. Adapun target perencanaan kinerja jangka menengah Biro Humas dan Protokol untuk tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang di dalam tabel di bawah ini.

**Target Perencanaan Kinerja Jangka Menengah
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Tahun 2020–2024**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan Dalam Negeri	1. Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif	80%	95%	95%	95%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		2. Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	80%	80%	80%	90%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		3. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif	80%	80%	80%	85%	94%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
2.	Meningkatnya kualitas penyebaran informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan Keprotokolan	1. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		2. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		3. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		4. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 82	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu melalui Survei
		5. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol					Skor 82	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu melalui Survei
		6. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik				100%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		7. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media				95%	100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP
		8. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik MK				Skor 75	Nilai 90	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Komisi Informasi Pusat
		9. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara					Nilai 78	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu melalui Survei Eksternal
		10. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara					Skor 76	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro Renkeu melalui Survei
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri					Nilai 79	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Kemenpan & RB
		2. Indeks ASN BerAKHLAK					Nilai 61	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro SDMO

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2020	2021	2022	2023	2024		
		3. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko					Nilai 3	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Inspektorat
		4. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol					B	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Inspektorat
		5. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu					100%	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Biro HP

2.4. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam mencapai kinerja tahunan, Biro Humas dan Protokol pun menetapkan tahapan kegiatan pada masing-masing indikator kinerja berikut dengan penghitungan ketercapaiannya.

2.4.1. Layanan Publik Peningkatan Pemahaman Mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang Efektif

Pada tahun anggaran 2024, pelaksanaan kegiatan internasionalisasi MK dijadikan salah satu bentuk dari layanan publik bagi peningkatan pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi serta Penyebarluasan Informasi kepada publik.

Kegiatan internasionalisasi MK yang efektif tersebut sepanjang tahun 2024 diwujudkan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam kerangka forum *judicial dialogue* yang bersifat bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Pemutakhiran website en.mkri.id;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.

Efektivitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan membandingkan antara rencana kerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran dengan realisasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Dikarenakan pengukuran efektivitas internasionalisasi MK dilakukan dengan menggunakan pengukuran beberapa kegiatan, maka terlebih dahulu dilakukan pengukuran atas efektivitas pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut di atas, baru kemudian dilakukan pengukuran efektivitas dengan menggunakan efektivitas rata-rata dari hasil penggabungan efektivitas beberapa kegiatan dimaksud.

Dengan demikian rumus yang digunakan untuk mengukur persentase:

$$\% \text{ kegiatan internasionalisasi MK yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Target kegiatan Internasionalisasi MK}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, target kinerja pada Biro Humas dan Protokol untuk Layanan Publik Peningkatan Pemahaman Mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang Efektif untuk tahun 2024 adalah 100%, sedangkan untuk tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 95%.

2.4.2. Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang Efektif

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman dituntut untuk merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain. MK harus terus menjaga prinsip-prinsip dasar seperti independensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu tujuan utama adalah memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga hukum dan konstitusi dapat ditegakkan tanpa adanya hambatan atau penundaan yang tidak perlu. Pencapaian tujuan tersebut tidak

dapat dilakukan oleh MK sendiri, tanpa dukungan aktif dari berbagai elemen bangsa dan negara. Dalam konteks ini, peran serta pihak-pihak luar yang berkepentingan sangat penting untuk membantu Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

Untuk itu, MK perlu menjalin hubungan yang erat dan konstruktif dengan berbagai lembaga dan organisasi, seperti perguruan tinggi, instansi/lembaga negara, partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pihak lain yang mewakili kepentingan masyarakat luas. Kerja sama ini dapat dilakukan melalui layanan publik, peningkatan pemahaman, publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri yang efektif. Semua upaya kerja sama ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak konstitusional mereka, termasuk bagaimana cara untuk melaksanakan hak-hak tersebut dengan benar. Selain itu, penting pula untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana warga negara dapat memperjuangkan hak konstitusional mereka ketika hak-hak tersebut dilanggar atau tidak dihormati oleh pihak lain. Dengan adanya kesadaran yang lebih luas mengenai hak-hak konstitusional ini, MK akan lebih mudah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, khususnya dalam melindungi hak-hak warga negara, menjaga keberlanjutan UUD 1945, serta menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi.

Mendasari Indeks Kinerja Utama Biro Humas dan Protokol tahun 2024, di mana terdapat perubahan Indikator Kinerja menjadikan perubahan pada rumus pengukuran efektivitas pelaksanaan kerja sama dalam negeri. Pada 2024, pengukuran efektivitas kerja sama dalam negeri dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan dengan rencana kegiatan dikalikan 100%. Selain itu metode pengukuran yang ditempuh lainnya adalah dengan membandingkan jumlah pagu anggaran yang dimiliki dengan realisasi anggaran yang dicapai baik dalam nominal maupun dalam bentuk persentase.

Perencanaan kegiatan kerja sama dalam negeri disusun berdasarkan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Hal itu dimaksud untuk mengoptimalkan serta memaksimalkan kegiatan agar terselenggara dengan efisien dan efektif. Sehingga dengan dilakukannya penyandingan data pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimaksudkan dapat menjadi dasar pengukuran indikator kinerja.

% efektivitas kegiatan kerja sama dalam negeri: (Jumlah Kegiatan/Rencana Kegiatan) x 100%

Adapun target pencapaian dari efektivitas kerja sama dalam negeri di tahun 2023 adalah 90%, sedangkan di tahun 2024 memiliki target 100% atau naik sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

2.4.3. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif

Sejak pendiriannya pada tanggal 12 Juli 2010 hingga saat ini, AACC telah memiliki 21 negara anggota dan telah menyelenggarakan Kongres sebanyak enam kali yaitu di Seoul (2012), Istanbul (2014), Bali (2016), Nur Sultan pada bulan Agustus 2020, di Ulaan Batar (2022), dan Bangkok (2024). Pembentukan Sekretariat tetap AACC merupakan amanat dari Kongres Ketiga yang diselenggarakan di Bali pada Agustus 2016, di mana seluruh anggota menyetujui didirikannya sekretariat tetap yang berfungsi untuk mengoptimalkan kinerja asosiasi. Sekretariat tetap yang dibentuk merupakan sekretariat bersama yang dikelola oleh 3 negara dengan fungsi yang berbeda, yaitu Indonesia (Bidang Perencanaan dan Koordinasi), Korea Selatan (Bidang Penelitian dan Pengembangan) dan Turki (Bidang Pelatihan dan Pengembangan SDM).

Fungsi/tugas Sekretariat Tetap Bidang Perencanaan dan koordinasi adalah untuk mengelola penyelenggaraan dan manajemen organisasi AACC, memberikan dukungan bagi peningkatan kerja sama dengan pihak eksternal, serta mengkoordinasi kegiatan yang dilaksanakan oleh asosiasi dan setiap anggota AACC. Berdasarkan fungsi tersebut, kedudukan sebagai Sekretariat Tetap akan menyebabkan MKRI dapat memetakan dan mengarahkan kegiatan AACC sesuai dengan fungsi dan tujuannya, sekaligus akan memberikan kesempatan bagi MKRI untuk mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Efektivitas pelaksanaan tugas Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi dapat diukur dengan menggunakan empat parameter, yaitu:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC, termasuk di dalamnya adalah dukungan Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi kepada Presiden AACC terpilih, utamanya dalam persiapan dan pelaksanaan Kongres dan BoMM;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC;

- c. Penerjemahan berita dan Putusan ke dalam Bahasa Rusia dan kemudian dimuat dalam website aacc-asia.org.
- d. Pemutakhiran website aacc-asia.org.

Karena terdapat 4 parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan publik kegiatan Sektap AACC, maka pada saat melakukan pengukuran terhadap efektivitas kegiatan Sektap AACC akan dilakukan terlebih dahulu pengukuran efektivitas atas pelaksanaan keempat kegiatan tersebut.

Selanjutnya, akan dihitung efektivitas rata-rata guna mengetahui efektivitas akhir dari kegiatan layanan publik Sektap AACC Tahun 2024.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan publik kegiatan AACC adalah sebagai berikut.

% kegiatan Sektap AACC yang efektif	=	$\frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan Sektap AACC}}{\text{Target Laporan Kegiatan Sektap AACC}} \times 100\%$
--	---	--

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, target kinerja pada Biro Humas dan Protokol untuk Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif tahun 2024 adalah 94%, sedangkan pada tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 85% sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis MK 2020-2024.

2.4.4. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK

Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai segala kegiatan, baik penanganan perkara maupun kegiatan di luar penanganan perkara, di MK tentu perlu dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual penanganan perkara di MK, termasuk mengenai Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebarluasan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan, MK menerbitkan beberapa jenis bahan

publikasi secara berkala, salah satunya adalah dengan menerbitkan Majalah Konstitusi.

Dengan semakin berkembangnya mobilitas pembaca Majalah Konstitusi serta dalam rangka mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang modern dan terpercaya di mana salah satu bentuknya adalah dengan *paperless* documentation, maka seluruh terbitan Majalah Konstitusi pada tahun 2024 dilakukan dengan bentuk digital (e-magazines) yang kemudian diunggah di laman mkri.id. tiap bulannya. Efektivitas digitalisasi bahan publikasi informasi MK akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Majalah dalam laman mkri.id}}{12 \text{ bulan}} \times 100\%$$

Adapun target efektivitas digitalisasi bahan publikasi informasi MK untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sama-sama sebesar 100%.

2.4.5. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik

Semakin meningkatnya kesadaran publik akan keberadaan Mahkamah Konstitusi berkorelasi positif dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi melalui berbagai platform yang ada. Sejalan dengan prinsip peradilan yang modern dan transparan, keterbukaan akan informasi mengenai penanganan perkara dan putusan merupakan hal yang harus dilakukan. Dengan demikian, publik dapat mengetahui dan mengikuti perkembangan teraktual terkait Putusan MK.

Untuk mendukung upaya penyebaran informasi mengenai Putusan MK, diperlukan kegiatan Penyebarluasan Informasi Putusan MK melalui Media Elektronik. Media elektronik masih merupakan salah satu media yang banyak diakses oleh masyarakat sehingga dengan melakukan diseminasi Putusan melalui media elektronik diharapkan akan semakin banyak lapisan masyarakat yang paham akan hak konstitusionalnya melalui Putusan-Putusan yang telah dihasilkan oleh Mahkamah.

Kegiatan diseminasi Putusan di media elektronik dilakukan melalui pemuatan Putusan serta pembuatan infografis tentang Putusan MK di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders yang mengawal pelaksanaan Putusan MK dan pihak-pihak yang terkait dengan Putusan MK juga akan tergugah untuk melaksanakan Putusan MK yang merupakan Putusan akhir dan bersifat mengikat bagi semua pihak.

Untuk mengukur efektivitas layanan publik atas publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media elektronik dilakukan dengan membandingkan jumlah Putusan dengan laporan penyebarluasan informasi mengenai Putusan MK di berbagai media MK

$$\% \text{ efektivitas diseminasi putusan} = (\text{Jumlah informasi} / \text{jumlah putusan}) \times 100\%$$

Adapun target efektivitas diseminasi putusan MK di berbagai media untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sama-sama sebesar 100%.

2.4.6. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK adalah melihat sejauh mana informasi mengenai kegiatan pimpinan MK dan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh MK di luar berita persidangan telah tersampaikan kepada masyarakat. Penyebarluasan berita non persidangan ini dilakukan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti melalui website mkri.id, en.mkri.id, aacc-asia.org, youtube, Instagram dan kanal media sosial lain yang dimiliki oleh MK.

Efektivitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi di media elektronik akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas diseminasi MK} = \frac{\text{Jumlah berita non sidang}}{\text{Jumlah kegiatan non sidang}} \times 100\%$$

2.4.7. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

Pada Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui survei indeks layanan administrasi umum MK TA 2024 dalam salah satu unsurnya merencanakan penilaian tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan Biro Humas dan Protokol dan hal ini merupakan salah satu indikator kinerja utama biro humas dan protokol. Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2024 termasuk di dalamnya Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan diukur kepada responden internal Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu upaya monitoring dan evaluasi kinerja pada seluruh unit kerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Mengacu pada dokumen perencanaan target kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2-24, Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan merupakan salah satu Indikator Kinerja dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan. Adapun perencanaan target capaian kinerja Biro Humas dan Protokol terkait tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan tahun 2024 adalah sebesar 82. Target ini mengalami peningkatan dari target 4 tahun sebelumnya yang hanya menetapkan target sebesar 75 mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023.

Berdasarkan hasil perencanaan dan penyusunan formula penilaian, berikut ini dijelaskan secara rinci mengenai pertanyaan dan pilihan jawaban serta alasan yang dapat diberikan responden dalam menilai tingkat layanan kehumasan dan keprotokolan melalui survei administrasi umum di maksud. Dalam penjelasan ini termasuk menggambarkan cakupan layanan kehumasan dan keprotokolan yang menjadi fokus dalam pengukuran tingkat layanannya dalam survei tersebut. Adapun cakupan pertanyaannya antara lain:

No	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				Berikan alasan jika pilihan jawaban: 1 atau 2
		1	2	3	4	
U1	layanan permintaan bahan publikasi, informasi (leaflet, buku, kartu nama, tas, majalah, dsb)	sangat tidak puas	tidak puas	puas	sangat puas	
U3	Pelayanan produksi dan distribusi buku agenda dan kalender	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U7	Pelayanan penerbitan Majalah Konstitusi dalam format e-magazine di laman mkri.id	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U9	Layanan informasi berita sidang dan non sidang yang disediakan di laman MK (website: https://mkri.id/)	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U10	Layanan liputan dan berita sidang	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U11	Layanan liputan dan berita non sidang	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U12	Layanan fasilitasi kegiatan kerja sama dalam negeri dengan mitra MK	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U14	Layanan penerjemahan dokumen ke dalam Bahasa Inggris	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U9	Pelayanan pengurusan dokumen administrasi perjalanan dinas luar negeri	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	
U10	Pelayanan pengurusan keikutsertaan pimpinan dan pegawai dalam kegiatan internasional	Sangat Tidak Puas	Tidak Puas	Puas	Sangat Puas	

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, terdapat 10 pertanyaan yang dapat menggambarkan Indeks Kinerja Utama Biro Humas dan Protokol dalam pelaksanaan layanan kehumasan dan keprotokolan selama Tahun 2024 dan dari hasil survei tersebut akan terlihat tingkat capaian pada Tahun 2024 berdasarkan pada jawaban yang diberikan oleh responden internal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan rentang pilihan jawaban yang telah ditetapkan mulai dari sangat tidak puas sampai dengan sangat puas (skala likert).

2.4.8. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Berikut ini merupakan perbandingan sasaran dan target dari layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol antara Tahun 2023 dan 2024:

No	Sasaran	SK Sekjen IKU Terbaru (2022) IKU Biro HP 2023	Target	No	PK Biro HP Tahun 2023	Target	No	PK Biro HP Tahun 2024	Target
1.	Terselenggaranya Kegiatan Penyebarluasan Informasi Perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Tingkat Layanan kehumasan dan Keprotokolan	Skor 75	1	Tingkat Layanan Keprotokol an dan TU Pimpinan	Skor 75	1	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Skor 82

Untuk mengukur tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol dilakukan penyebaran kuesioner kepada para pegawai yang dalam kegiatan sehari-hari banyak terkait dengan layanan dari TU Pimpinan dan Protokol. Penilaian untuk tingkat kepuasan layanan TU Pimpinan dan Protokol diberlakukan terhadap kinerja protokol secara keseluruhan dalam memberikan layanan keprotokolan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun cara mengukur tingkat kepuasan dengan unsur yang dinilai adalah:

1. Layanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan;
2. Layanan pengelolaan tamu pimpinan;
3. Layanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan;
4. Layanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara;
5. Layanan protokol dalam acara resmi pimpinan.

Responden yang menjadi sasaran survei adalah mereka yang mendapatkan pelayanan TUPP di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi. Dengan mengukur berbagai unsur yang terkandung dalam survei tersebut diharapkan dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan pegawai, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Hal tersebut dikarenakan dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh pegawai, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh pegawai. Kedua adalah indikator yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari pegawai, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh pegawai.

Hasil kuesioner akan ditampilkan dalam bentuk skor nilai survei atas layanan TU Pimpinan dan Protokol.

Tabel skoring hasil survei adalah sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

2.4.9. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik

Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK adalah melihat sejauh mana informasi mengenai kegiatan penanganan perkara atau persidangan MK telah tersampaikan kepada masyarakat. Penyebarluasan berita persidangan ini dilakukan melalui berbagai kanal informasi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi seperti melalui website mkri.id, en.mkri.id, aacc-asia.org. youtube, Instagram dan kanal media sosial lain yang dimiliki oleh MK.

Efektivitas layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi di media elektronik akan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ efektivitas diseminasi MK} = \frac{\text{Jumlah berita sidang}}{\text{Jumlah kegiatan sidang}} \times 100\%$$

Adapun target layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Mahkamah Konstitusi di media elektronik untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sama-sama sebesar 100%.

2.4.10. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media

Sebagai lembaga dengan karakter independen dan imparial, opini media tidak boleh mempengaruhi Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan. Namun demikian, opini media diperlukan sebagai evaluasi bagaimana MK secara kelembagaan dijalankan. Untuk itu, monitoring pemberitaan oleh Biro Humas dan Protokol terus dilaksanakan sejak lembaga ini didirikan. Kegiatan ini diyakini mampu mendukung *awareness* pimpinan berkenaan dengan isu-isu terkini yang menyangkut dengan konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Meskipun tidak memengaruhi Putusan MK, monitoring pemberitaan dapat mendukung pimpinan dan jajaran pejabat pembuat komitmen dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan.

Monitoring pemberitaan perlu dibersamai dengan suatu analisis yang sekurang-kurangnya dapat menjelaskan tonasi/nada/sentimen pemberitaan. Pada dasarnya, pemberitaan bernada positif adalah pemberitaan di mana eksistensi dan kinerja MK diapresiasi oleh media ataupun publik melalui media. Pemberitaan netral adalah di mana MK tidak secara khusus menerima apresiasi ataupun kritik baik secara tersurat maupun tersirat. Adapun pemberitaan dengan sentimen negatif ditandai dengan MK memperoleh kritik. Misinformasi yang berhubungan dengan kinerja dan muruah lembaga pun seringkali dikategorikan sebagai pemberitaan negatif, yang memerlukan analisis dan rekomendasi tindak lanjut yang bersifat kehumasan.

Sebagai informasi, sejak 2019, Biro Humas dan Protokol telah melaksanakan kegiatan ini melalui penyedia layanan jasa eksternal.

$$\frac{\text{Jumlah Analisis Berita dari Teknologi Media Monitoring}}{\text{Jumlah Pemberitaan MK di Media}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja (\%)}$$

Adapun target layanan publik monitoring pemberitaan MK di media pada tahun 2023 sebesar 95%, sedangkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target menjadi 100%.

2.4.11. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik MK

Dalam rangka evaluasi kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Mahkamah Konstitusi telah mengikuti Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) setiap tahunnya. Biro Humas dan Protokol melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi *leading sector* yang bertanggung jawab memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi di level lembaga telah memenuhi kebutuhan publik serta tepat cara dan tepat sasaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Monev KIP 2024 diikuti setiap badan publik melalui dua tahapan besar, yaitu pengisian *self-assessment questionnaire* (SAQ) dan uji publik melalui kegiatan presentasi. Tidak sekadar menyajikan informasi yang terkini melalui berbagai platform yang dapat diterima masyarakat, badan publik diharuskan memenuhi lima indikator yang dirumuskan Komisi Informasi Pusat berdasarkan UU KIP dan PerKI SLIP.

Untuk itu, Mahkamah Konstitusi perlu memenuhi indikator-indikator berikut.

1. Mengumumkan Informasi Publik
2. Menyediakan Dokumen Informasi Publik
3. Mengembangkan Website
4. (Menyediakan Dokumen Informasi Pengadaan) Barang dan Jasa
5. Kelembagaan

Pada tahun 2024, Biro Humas dan Protokol menetapkan realisasi kinerja Monev KIP senilai 90 (sembilan puluh) atau batas terendah dari kualifikasi tertinggi, yaitu “Informatif”. Target ini meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2023, yaitu 75 (tujuh puluh lima). Nilai 90 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi lembaga dalam penilaian yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 dan 2021–2024, MK telah

meraih kualifikasi “Informatif” dengan nilai 93,69 di tahun 2024, atau naik dari sebelumnya nilai 90,24 di tahun 2023.

Kualifikasi	Nilai Akhir
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89.9
Cukup Informatif	60 – 79.9
Kurang Informatif	40 – 59.9
Tidak Informatif	0 – 39.9

$$\frac{\text{Nilai Akhir Monev KIP 2024}}{\text{Target Nilai}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja (\%)}$$

Oleh karenanya, target monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik MK pada tahun 2023 dengan nilai 75, sedangkan pada tahun 2024 terdapat kenaikan target nilai menjadi 90.

2.4.12. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara

Terkait dengan rencana penilaian Indeks Aksesibilitas yang dalam konteks Indikator Kinerja Utama Biro Humas dan Protokol disebut sebagai Aksesibilitas Penanganan perkara, merujuk pada dokumen Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, Indeks Aksesibilitas merupakan salah satu target indikator penilaian kualitas layanan publik yang diukur dan menjadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Konstitusi yang pada tahun 2024 memiliki target dengan nilai 78.

Hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai lembaga peradilan, MK mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan, berupaya memberikan pelayanan publik yang berfokus atau berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pengguna layanan di Mahkamah Konstitusi

Adapun variabel-variabel penilaian yang dirancang untuk penilaian pada indikator ini, terdiri dari:

1. Akses Gedung MK

- 1.1. Kemudahan menuju area lokasi ruang sidang, serta ruang pendukung lainnya. Sebagai contoh: tersedianya petunjuk arah dan denah lokasi
- 1.2. Kemudahan parkir di area MK
- 1.3. Ketersediaan fasilitas gedung bagi pihak berkebutuhan khusus (difabel) seperti toilet dan area parkir khusus

2. Akses Pendukung Layanan Peradilan

- 2.1. Ketersediaan layanan korespondensi secara digital (*e-mail*)
- 2.2. Ketersediaan penerjemah bagi para pihak beperkara di MK, baik bahasa isyarat dan/atau bahasa daerah/asing

3. Akses Informasi Lainnya

- 3.1. Ketersediaan bantuan bagi pihak berkebutuhan khusus (difabel) dalam mengakses dokumen MK
- 3.2. Kecepatan dan ketepatan pelayanan MK dalam menanggapi telepon/pertanyaan
- 3.3. Ketersediaan pemberitaan dan isu-isu tentang MK pada media sosial:
- 3.4. Ketersediaan informasi umum tentang MK dalam berbagai bentuk materi digital (audio, visual, *softcopy*)

Dari dasar perencanaan tujuan, *focal point*, dan susunan pertanyaan yang disusun dalam mengukur Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara, dalam bab selanjutnya akan dijabarkan mengenai hasil dan realisasi yang didapatkan pada Tahun 2024 yang terkait dengan capaian IKU Biro Humas dan Protokol mengenai Indeks tersebut.

2.4.13. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Berkenaan dengan rencana penilaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara pada Biro Humas dan Protokol, dengan merujuk pada dokumen Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024, Indeks ini juga merupakan salah satu target indikator penilaian kualitas layanan publik yang diukur tingkat layanan publiknya dan menjadi bahan evaluasi oleh Mahkamah Konstitusi yang pada tahun 2024 ini memiliki target dengan skor 76. Hal ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai lembaga peradilan, MK mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini para pencari keadilan, berupaya memberikan

pelayanan publik yang berfokus atau berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan di Mahkamah Konstitusi, maka dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan pengguna layanan di Mahkamah Konstitusi

Adapun variabel-variabel penilaian yang dirancang untuk penilaian pada indikator ini, terdiri dari:

1. Kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diselenggarakan memberikan akses yang memadai untuk mendapatkan informasi tentang hak-hak konstitusional dalam berbagai aspek (politik, ekonomi, sosial, budaya, individu);
2. Materi yang diperoleh memberikan pemahaman yang baik tentang hak-hak konstitusional sebagai warga negara;
3. Materi yang diperoleh memberikan keyakinan untuk menerapkan hak konstitusional dalam kehidupan sehari-hari;
4. Materi yang diperoleh memberikan kepercayaan bahwa hak-hak konstitusional warga negara dilindungi dengan baik oleh hukum dan lembaga terkait;
5. Materi yang diperoleh memengaruhi sikap dalam memperjuangkan atau melindungi hak konstitusional yang terancam atau dilanggar;
6. Materi yang diperoleh meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional di Indonesia;
7. Materi yang diperoleh memberikan kesadaran akan pentingnya hak konstitusional pada penguatan demokrasi di Indonesia.

Dalam penilaian indikator ini, Mahkamah Konstitusi dalam perencanaan survei indeks kepuasan masyarakat Tahun 2024 merumuskan beberapa *focal point* yang mendasari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam menghasilkan nilai indeks melalui survei tersebut antara lain mengenai:

- Pemahaman warga masyarakat mengenai UUD 1945 secara umum
- Hak-hak warga negara yang terdapat dalam UUD 1945 seperti hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak-hak individu lainnya
- Serta pertanyaan mengenai mekanisme dan cara apa yang dipandang tepat oleh responden dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak konstitusional.

Dari dasar perencanaan tujuan, *focal point*, dan susunan pertanyaan yang disusun dalam mengukur Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, dalam bab selanjutnya akan dijabarkan mengenai hasil yang didapatkan pada Tahun 2024 yang terkait dengan capaian IKU Biro Humas dan Protokol mengenai Indeks tersebut.

2.4.14. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di dalam UU tersebut disebutkan adanya kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri di setiap pengadaan barang/jasa.

Tujuan pelaksanaan program P3DN itu sendiri antara lain adalah memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tersebut termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri yaitu apabila terdapat produk yang telah memiliki penjumlahan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, turut menambahkan bahwa Kementerian, Lembaga, dan Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Melalui program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), pemerintah berupaya untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak menggunakan produk dalam negeri guna menumbuhkan kemandirian bangsa dan meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Pelaksanaan program P3DN ini sebagai wujud nyata membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam mencintai dan menggunakan produk dalam negeri.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2024, Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri ditargetkan mendapatkan nilai 79. Realisasi dari kinerja terkait ini akan diperoleh dari hasil penilaian LKPP bersama KemenPANRB. Capaian indikator Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Biro HP}}{\text{Target Nilai TKDN Biro HP}} \times 100\%$$

2.4.15. Indeks ASN BerAKHLAK

Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) adalah suatu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan Pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mengingat tugas dan peran ASN yang sangat strategis tersebut, Presiden Republik Indonesia meluncurkan Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang dinyatakan, *“ASN bukan pejabat yang minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat kolonial dulu. ASN harus memiliki jiwa melayani untuk membantu Masyarakat. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus memiliki core values yang sama. Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego, baik ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu.”* Fondasi tersebut disebut dengan ASN BerAKHLAK, yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World

Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Dalam Perjanjian Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Tahun 2024 Indeks ASN BerAKHLAK ditargetkan mendapat nilai 61. Nilai realisasi dari kinerja tersebut akan diperoleh melalui hasil Survei BerAKHLAK dari KemenPANRB. Capaian indikator Indeks ASN BerAKHLAK dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Indeks ASN BerAkhlaK} \times 100\%}{\text{Target Nilai Indeks ASN BerAkhlaK}}$$

2.4.16. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada unit kerja dalam instansi pemerintah menggambarkan sejauh mana praktik manajemen risiko telah diterapkan secara sistematis untuk mendukung tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas publik. Bagi instansi pemerintah, pengelolaan risiko yang matang sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan yang dijalankan dapat mencapai tujuan dengan efisien, efektif, dan sesuai peraturan. Tingkat kematangan ini juga membantu memastikan bahwa unit kerja dapat mengantisipasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengelolaan anggaran, pelayanan publik, serta kebijakan strategis.

Pada umumnya, tingkat kematangan manajemen risiko di instansi pemerintah dapat dikategorikan ke dalam lima level: Ad Hoc (level 1), Inisiasi (level 2), Terdefinisi (level 3), Terkelola (level 4), dan optimal (level 5). Pada level Ad Hoc, manajemen risiko dilakukan secara sporadis tanpa panduan yang jelas. Pada level Inisiasi, unit kerja mulai menyadari pentingnya manajemen risiko dan memiliki kebijakan awal, meskipun penerapannya belum terstruktur. Ketika mencapai level Terdefinisi, kerangka kerja dan prosedur manajemen risiko sudah mulai terstandardisasi dan diterapkan secara konsisten di berbagai wilayah kerja. Pada level Terkelola, manajemen risiko terintegrasi dengan perencanaan strategis dan operasional. Terakhir, pada level Dioptimalkan,

manajemen risiko telah menjadi budaya organisasi dan didukung oleh evaluasi serta perbaikan berkelanjutan.

Adapun penilaian dan peningkatan tingkat kematangan manajemen risiko pada instansi pemerintah membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola yang baik. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek operasional, instansi dapat meminimalkan dampak ketidakpastian, mengelola alokasi sumber daya dengan lebih bijak, dan meningkatkan kinerja pelayanan publik. Selain itu, pengelolaan risiko yang matang juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan, mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko (TKMR) pada unit kerja eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melibatkan beberapa komponen kunci yang mencakup kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas penanganan risiko, dan hasil penerapan manajemen risiko. Kepemimpinan yang kuat sangat penting dalam manajemen risiko.

Hal-hal penilaian terhadap tingkat kematangan manajemen risiko tersebut meliputi:

- Penetapan profil risiko dan rencana mitigasi.
- Dukungan terhadap sumber daya yang diperlukan, termasuk dana dan pengembangan SDM.
- Pelaksanaan rapat manajemen risiko secara rutin untuk memastikan semua pihak terlibat dan berkomitmen terhadap proses ini.
- Proses manajemen risiko terdiri dari langkah-langkah sistematis yang meliputi:
 - Identifikasi Risiko: Mengidentifikasi semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.
 - Analisis Risiko: Menilai kemungkinan dan dampak dari risiko yang teridentifikasi.
 - Evaluasi Risiko: Menentukan prioritas berdasarkan analisis untuk memfokuskan upaya mitigasi pada risiko yang paling signifikan.

Dengan telah ditetapkannya SK Sekjen Nomor 200 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Biro/ Pusat/ Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, dengan demikian maka IKU Tingkat Kematangan Manajemen Risiko merupakan indikator generik yang ada pada seluruh unit eselon II. Penetapan indikator tersebut merupakan saran rekomendasi yang diberikan oleh BPKP dalam penilaian Maturitas SPIP MK Tahun 2023 dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) MK Tahun 2023 yang masih berada di Level 2,813. Oleh sebab itu, maka seluruh unit kerja Eselon II wajib mengimplementasikan manajemen risiko secara memadai dengan target tingkat kematangan di Level 3. Adapun penghitungan persentase capaiannya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Risiko Biro HP}}{\text{Target Tingkat Kematangan Risiko Biro HP}} \times 100\%$$

2.4.17. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol

Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh inspektorat nomor 6132/2900/PW.02/07/2024, tanggal 25 Juli 2024, telah dijelaskan bahwa Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan sebuah proses yang menyeluruh dan mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi SAKIP telah dijalankan, mencakup seluruh tahapan dari perencanaan hingga pencapaian kinerja. Proses evaluasi ini dimulai dari tahap perencanaan kinerja yang melibatkan berbagai dokumen strategis, mulai dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), hingga perencanaan jangka pendek yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Adapun ruang lingkup evaluasi AKIP dalam pelaksanaannya meliputi beberapa aspek yang krusial, antara lain:

1. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang Selaras

Penilaian ini berfokus pada sejauh mana perencanaan kinerja yang telah dibuat mampu selaras dengan tujuan yang ingin dicapai, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut dapat mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Kualitas perencanaan yang baik menjadi landasan penting dalam pencapaian tujuan yang optimal.

2. Penilaian Pengukuran Kinerja Berjenjang dan Berkelanjutan

Aspek ini menilai mekanisme pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, yang merupakan kebutuhan penting dalam proses penyesuaian strategi guna mencapai kinerja yang maksimal. Pengukuran yang efektif akan memungkinkan pengelolaan kinerja yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan situasi.

3. Penilaian Pelaporan Kinerja

Penilaian terhadap pelaporan kinerja mencakup bagaimana laporan tersebut menggambarkan kualitas pencapaian yang telah dicapai, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan. Selain itu, penilaian ini juga memperhatikan langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan yang telah dilakukan, yang pada gilirannya memberikan dampak signifikan dalam penyesuaian strategi atau kebijakan untuk pencapaian kinerja berikutnya.

4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian ini menilai sejauh mana evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah memberikan dampak nyata dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi implementasi SAKIP. Evaluasi yang baik akan menciptakan transparansi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahap pelaksanaan, sehingga mempermudah identifikasi dan perbaikan pada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

5. Penilaian Capaian Kinerja

Aspek terakhir mencakup penilaian terhadap capaian kinerja yang diukur berdasarkan output maupun outcome yang telah dicapai, serta indikator kinerja lainnya yang relevan. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja.

Secara keseluruhan, evaluasi AKIP memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana sistem akuntabilitas kinerja dalam suatu

instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik, serta area-area yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang. Adapun untuk tahun 2024, Biro Humas dan Protokol memiliki target untuk evaluasi SAKIP dengan nilai B.

2.4.18. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu adalah salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan yang baik, terutama bagi organisasi atau perusahaan. Proses ini berkaitan dengan penyusunan, pelaporan, dan pengesahan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam waktu yang ditentukan.

Dalam konteks Biro Humas dan Protokol yang mengelola anggaran Mahkamah Konstitusi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen IV dengan anggaran sebesar Rp. 24.320.237.000 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah), berikut beberapa penjelasan deskriptif dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu:

1. Data Penggunaan Anggaran yang Akurat

Data penggunaan anggaran yang akurat adalah langkah pertama dalam pertanggungjawaban keuangan. Laporan tersebut mencakup rencana anggaran biaya, rencana penyerapan anggaran, serta kerangka acuan yang menggambarkan rencana kerja sekaligus kebutuhan sebuah kegiatan. Semua transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dengan cermat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Aspek yang perlu diperhatikan:

- Kelengkapan dan ketepatan data: Semua transaksi harus tercatat dan dilaporkan dengan lengkap.
- Kesesuaian dengan standar akuntansi: Penggunaan prinsip akuntansi yang benar dan standar yang berlaku sangat penting agar laporan keuangan dapat dipercaya.

2. Manajemen Waktu dalam Penyelesaian

Penyelesaian laporan keuangan yang tepat waktu melibatkan kemampuan tim pejabat pembuat komitmen IV serta pelaksana tugas penggunaan dana dalam lingkup PPK IV untuk menyelesaikan laporan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Aspek yang perlu diperhatikan

- Perencanaan dan penjadwalan: Menetapkan *deadline* internal dan eksternal yang realistis.
- Pemantauan progres: Memastikan bahwa semua tahapan proses pembuatan laporan keuangan dipantau dan diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.

3. Koordinasi Antar Pelaksanaan Tugas

Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai elemen di dalam organisasi, terutama antara pelaksanaan tugas, tim PPK, serta bagian keuangan. Setiap departemen perlu mengkomunikasikan dan memberikan data dan informasi yang relevan dan valid untuk proses administrasi lebih lanjut

Aspek yang perlu diperhatikan:

- Komunikasi yang efektif: Pastikan setiap pelaksana tugas memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengumpulan data yang dibutuhkan untuk laporan.
- Keakuratan data: Setiap departemen harus memastikan bahwa data yang dikirimkan ke bagian keuangan akurat dan tepat waktu.

4. Proses Verifikasi dan Validasi Data

Verifikasi dan validasi data adalah proses penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar dan bebas dari kesalahan. Proses ini meliputi pemeriksaan ulang terhadap setiap transaksi dan laporan yang ada, serta melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan.

Aspek yang perlu diperhatikan:

- Pengendalian internal yang baik: Memastikan adanya prosedur pengendalian internal untuk mencegah kesalahan atau kecurangan dalam pencatatan transaksi.

5. Pemahaman terhadap Regulasi dan Peraturan yang Berlaku

Setiap organisasi harus memastikan bahwa pertanggungjawaban keuangan telah sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku di sektor publik.

Aspek yang perlu diperhatikan:

- Regulasi yang berlaku: Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mencakup informasi yang diperlukan untuk pelaporan pajak dan kepatuhan terhadap ketentuan lain yang berlaku.
- Penyusunan laporan sesuai dengan standar yang berlaku: Pastikan laporan sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang mengatur transparansi dan akurasi laporan keuangan.

6. Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti perangkat lunak akuntansi yang dalam hal Mahkamah Konstitusi menggunakan SAKTI dan SIVIKA akan sangat mendukung dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu. Teknologi ini membantu dalam proses otomatisasi, pencatatan transaksi, dan pelaporan secara lebih efisien.

Aspek yang perlu diperhatikan

- Pemilihan perangkat lunak yang tepat: Memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompatibel dengan standar akuntansi yang diterapkan.
- Keamanan data: Memastikan data yang disimpan dan diproses melalui sistem teknologi aman dan terlindungi dari potensi kebocoran, kehilangan atau kerusakan.

Pada intinya, pertanggungjawaban keuangan yang diselesaikan tepat waktu, dapat memberikan transparansi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan stabilitas keuangan organisasi. Selain itu, penyelesaian yang tepat waktu memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang berbasis pada informasi keuangan yang akurat dan terkini. Keputusan strategis yang berkaitan dengan anggaran dan alokasi sumber daya, bergantung pada data keuangan yang relevan. Keterlambatan dalam pelaporan dapat menyebabkan keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang sudah usang atau tidak lengkap, yang pada gilirannya dapat merugikan organisasi secara finansial.

Adapun untuk tahun 2024, target yang diberikan bagi Biro Humas dan Protokol untuk aspek penyelesaian pertanggungjawaban keuangan yang tepat waktu adalah 100%.

2.5. Pagu Anggaran

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh program dan kegiatan APBN yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2024 alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebesar Rp.24.320.237.000,-. Dengan masing-masing pembagian pagu anggaran sebagai berikut:

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran
1.	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Rp450.263.000
2.	Penyebarluasan Informasi Penanganan dan Putusan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden	Rp11.447.771.000
3.	Pertemuan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp88.737.000
4.	Perjalanan Kerja Sama Luar Negeri	Rp450.034.000
5.	Penyelenggara Dialog dengan Negara Mitra Kerja MK	Rp6.098.645.000

No	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu Anggaran
6.	Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap	Rp14.653.000
7.	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Rp4.316.558.000
8.	Media Monitoring	Rp237.118.000
9.	Operasional Humas	Rp82.201.000
10.	Fasilitas Koran dan Majalah	Rp375.335.000
11.	Pencetakan Bahan Publikasi	Rp758.922.000
TOTAL ANGGARAN		Rp24.320.237.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri	1.	Layanan Publik Peningkatan Pemahaman mengenai Pancasila, Konstitusi dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang efektif	100%	145%	145%
		2.	Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	100%	100%	100%
		3.	Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif	94%	125%	132%
2.	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan keprotokolan	1.	Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK	100%	100%	100%
		2.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik	100%	100%	100%
		3.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah	100%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
			Konstitusi di Media Elektronik			
		4.	Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan	Skor 82	83,71	102%
		5.	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Skor 82	82,96	101%
		6.	Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik	100%	100%	100%
		7.	Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media	100%	100%	100%
		8.	Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	Nilai 90	93,69	104%
		9.	Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara	Nilai 78	85,631	109%
		10.	Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 76	91,451	120%
3.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Humas dan Protokol	1.	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	99,9	126%
		2.	Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	81,6	133%
		3.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	Nilai 3	3	100%
		4.	Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol	B	BB	BB
		5.	Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
					Nilai Total	110%

Berdasarkan matriks di atas, realisasi kinerja Biro Humas dan Protokol pada tahun 2024 mencapai 110%. Realisasi tersebut secara detail diuraikan sebagai berikut.

1. Layanan Publik Peningkatan Pemahaman Mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang Efektif

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, target kinerja pada Biro Humas dan Protokol untuk Layanan Publik Peningkatan Pemahaman Mengenai Pancasila, Konstitusi, dan MK serta Penyebarluasan Informasi di Pelaksanaan Kegiatan Internasionalisasi MK yang Efektif untuk tahun 2024 adalah 100%, sedangkan untuk tahun 2023 ditetapkan target kinerja sebesar 95%.

Untuk tahun anggaran 2024, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat empat kegiatan yang menjadi indikator efektivitas internasionalisasi MK, yaitu:

- a. Forum diskusi hakim konstitusi melalui kunjungan kerja luar negeri, baik dalam rangka forum dialog bilateral maupun multilateral;
- b. Kegiatan penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam Bahasa Inggris dan selanjutnya dimuat ke dalam website en.mkri.id;
- c. Pemutakhiran website en.mkri.id;
- d. Penyelenggaraan kegiatan kerja sama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.

a. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Sepanjang tahun 2024, kunjungan kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan Mahkamah konstitusi dilaksanakan untuk beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai forum dialog bagi pimpinan Mahkamah Konstitusi terkait proses penanganan perkara di masing-masing institusi;
2. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan AACC;
3. Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.

Dalam kerangka tersebut, pada tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 14 rangkaian kunjungan kerja dengan 14 mitra kerja luar negeri MKRI, yaitu sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Mitra Kerja	Negara	Tanggal
1.	<i>Opening Legal Year 2024</i>	Federal Court of Malaysia	Malaysia	14 – 15 Januari 2024
2.	<i>WCCJ Bureau Meeting</i>	Venice Commission	Italia	14 -19 Maret 2024
3.	<i>Judicial Dialogue – Penjajakan Kerja Sama pertukaran pegawai</i>	MA Kanada	Kanada	20-28 Juni 2024
4.	<i>Judicial Dialogue – Tindaklanjut Kerja Sama</i>	- MK Aljazair - Sekretariat tetap CCJA	Aljazair	20-28 Juni 2024
5.	<i>Judicial Dialogue – pembahasan indeks supremasi konstitusi</i>	MA Finlandia	Finlandia	21-28 Juni 2024
6.	<i>Penjajakan kerja sama</i>	- MA Scotlandia - Kementerian Hukum	Inggris	23-29 Juni 2024
7.	<i>St. Petersburg International Legal Forum</i>	MK Rusia	Rusia	23-30 Juni 2024
8.	<i>Judicial Dialogue – persiapan suksesi Kepresidenan AACC</i>	MK Uzbekistan	Uzbekistan	21-25 Juli 2024
9.	<i>Tindak lanjut dan Evaluasi kerja sama peningkatan kapasitas pegawai</i>	NCSC	Amerika Serikat	15-21 Agustus 2024
10.	<i>Penjajakan kerja sama dan Opening Legal Year 2024</i>	- MA Inggris Raya - EWCH (England Wales Court House)	Inggris	29 September - 6 Oktober 2024
11.	<i>Judicial Dialogue – Persiapan Kongres ke 6 AACC</i>	MK Thailand	Thailand	12-20 Juni 2024
12.	<i>Judicial Dialogue – tindaklanjut kerja sama</i>	MK Kazakhstan	Kazakhstan	

No.	Kegiatan	Mitra Kerja	Negara	Tanggal
13.	<i>Penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka kerja sama peningkatan kapasitas pegawai</i>	Dubai Judicial Institute	UAE	14-21 September 2024
14.	<i>Kongres ke-6 AACC</i>	MK Thailand	Thailand	

Adapun pada awal tahun 2024, berdasarkan dokumen anggaran yang telah dipersiapkan serta disetujui melalui DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2024, jumlah perjalanan dinas luar negeri yang direncanakan adalah sebanyak 5 (lima) perjalanan.

Sedangkan pada pertengahan tahun 2024, pasca penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), telah dilakukan optimalisasi anggaran Mahkamah Konstitusi yang sebagian dialihkan untuk mendukung kegiatan kunjungan luar negeri di Biro Humas dan Protokol, sehingga telah dilakukan 14 (empat belas) perjalanan dinas luar negeri bagi YM Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dan Delegasi MK untuk agenda kegiatan yang krusial dan bermanfaat tinggi bagi Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, efektivitas internasionalisasi MK melalui perjalanan dinas pimpinan ke luar negeri dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

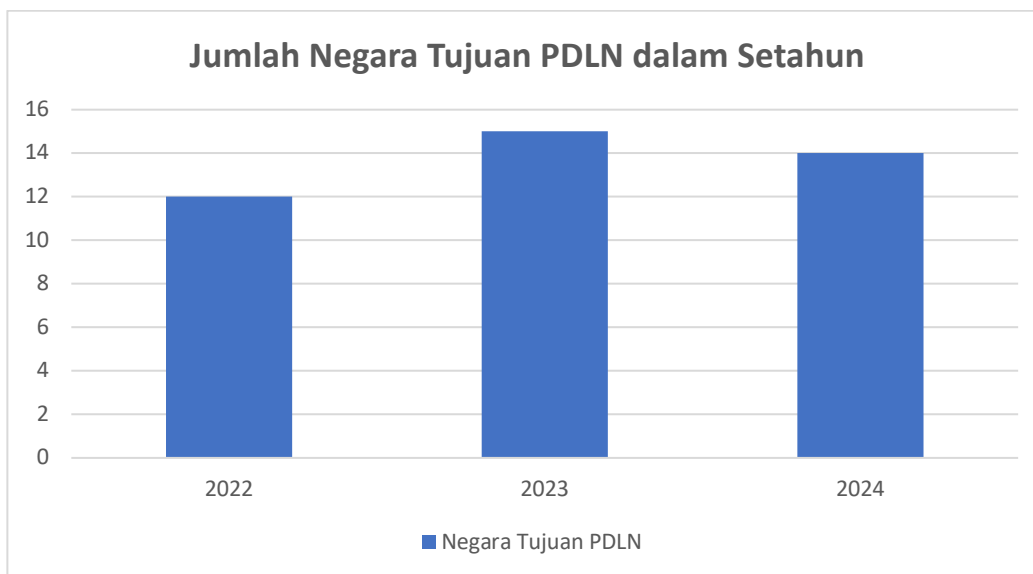
$\% \text{ kegiatan internasionalisasi MK yang efektif} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Internasionalisasi MK}}{\text{Target kegiatan Internasionalisasi MK}} \times 100\%$

Maka diperoleh hasil:

$$\frac{14 \text{ Kegiatan Internasionalisasi MK}}{5 \text{ Target Internasionalisasi MK}} \times 100\% = 280\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, dapat diartikan bahwa efektivitas internasionalisasi MK melalui kunjungan kerja ke luar negeri telah melebihi target yang ditentukan, yaitu dengan capaian sebesar 280%.

**Tabel Perbandingan Jumlah Negara PDLN
Tahun 2022, 2023, dan 2024**



b. Penerjemahan Berita MK dan Putusan MK ke dalam bahasa Inggris dan pemuatan dalam website en.mkri.id

Semenjak adanya Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri di Mahkamah Konstitusi, upaya penerjemahan menjadi salah satu target kinerja Biro Humas dan Protokol. Penerjemahan ke dalam Bahasa Inggris dilakukan untuk berbagai keperluan seperti untuk dimuat di website en.mkri.id, bahan makalah pimpinan, ataupun untuk berbagai kegiatan internasional yang dilaksanakan oleh MK.

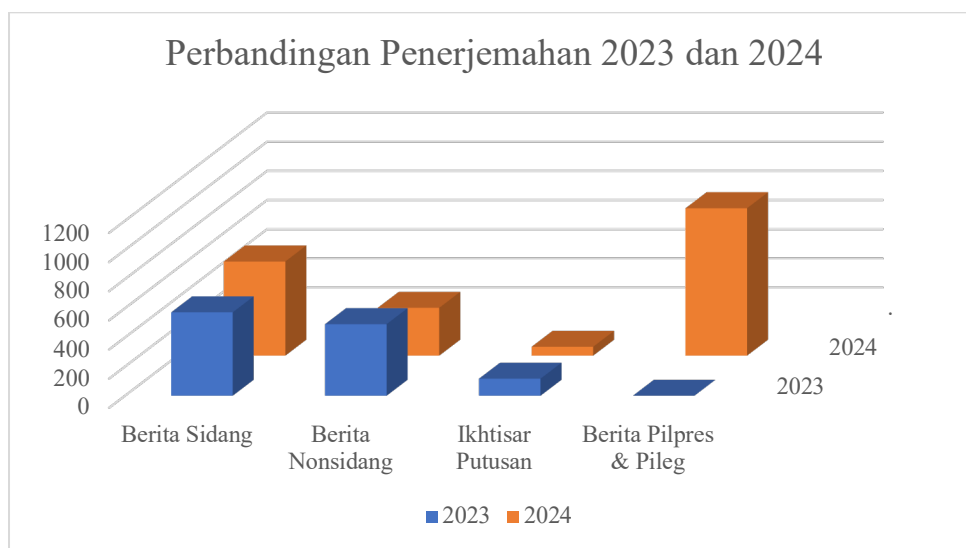
Pada tahun 2024, penerjemahan dilakukan untuk seluruh berita persidangan maupun berita non persidangan yang versi Bahasa Indonesianya telah dimuat di dalam laman mkri.id. Total seluruh terjemahan berita sidang maupun non sidang yang dilakukan selama tahun 2024 dan telah diunggah dalam laman MK tersebut berjumlah 974 berita, yang terdiri dari 646 berita sidang dan 328 berita non sidang. Sedangkan total ikhtisar putusan yang diterjemahkan selama tahun 2024 adalah sebanyak 61 ikhtisar putusan. Pada tahun 2024 juga merupakan tahun diselenggarakannya persidangan untuk perkara hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) serta perkara hasil pemilihan legislatif (Pileg). Dari persidangan Pilpres dan Pileg tersebut,

terdapat 1.011 berita Pilpres dan Pileg yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris serta diunggah dalam laman en.mkri.id.

Rekapitulasi penerjemahan Berita Sidang, Berita Nonsidang, Ikhtisar Putusan, dan Berita Pilpres-Pileg

Berita Sidang	646 berita
Berita Nonsidang	328 berita
Ikhtisar Putusan	61 ikhtisar putusan
Berita Pilpres & Pileg	1.011 berita
Jumlah	2.046 terjemahan bahasa Inggris yang diunggah pada laman en.mkri.id

Tabel Rekapitulasi Penerjemahan Berita Sidang, Berita Nonsidang, Ikhtisar Putusan, dan Berita Pilpres-Pileg



Untuk mengukur efektivitas internasionalisasi MK melalui penerjemahan berita sidang, non sidang, ikhtisar putusan dan berita mengenai pemilu Pilpres serta Pileg ke dalam bahasa Inggris digunakan rumus yang sama yaitu membandingkan target penyusunan laporan penerjemahan dengan laporan yang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan.

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk penerjemahan adalah berupa laporan semester, sehingga pengukuran efektivitas internasionalisasi MK melalui penerjemahan berita adalah sebagai berikut.

$\% \text{ kegiatan penerjemahan} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan penerjemahan}}{\text{Jumlah target Laporan penerjemahan}} \times 100\%$

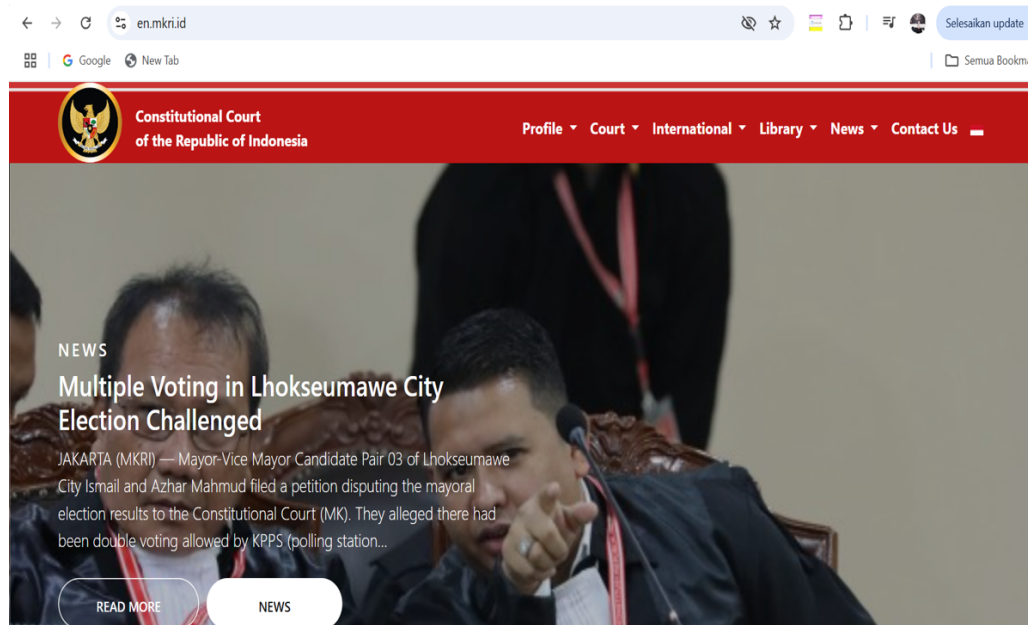
Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil yaitu:

$$\frac{2 \text{ laporan}}{2 \text{ target laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja efektivitas internasionalisasi MK melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris adalah 100%. Hal ini menyatakan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Pemutakhiran website en.mkri.id

Mahkamah Konstitusi Memiliki laman en.mkri.id dengan konten penuh Bahasa Inggris yang merupakan pengembangan dari Website Resmi Mahkamah Konstitusi pada laman www.mkri.id yang ditujukan dalam rangka menyebarluaskan informasi seputar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baik dari bidang Yudisial dan nonyudisial kepada masyarakat global khususnya dalam rangka peran aktif Mahkamah Konstitusi pada Komunitas Mahkamah Konstitusi Internasional seperti; AACC (Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institution), WCCJ (World Conference on Constitutional Court Justice), CCJI (Constitutional Courts Justice on Islamic Conference Country), Venice Commission dan mitra-mitra Mahkamah Konstitusi di luar keanggotaan komunitas mahkamah konstitusi internasional lainnya.



Keterangan: Tampilan laman www.en.mkri.id

Pengembangan dan Internasionalisasi website MK dimaksudkan untuk selalu membuat website yang khusus Menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam website ini agar selalu memiliki konten terkini baik dari segi pemuatan berita persidangan Mahkamah Konstitusi, Informasi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi RI, dan kegiatan kegiatan Lain di Mahkamah Konstitusi dalam bahasa Inggris.

Selama Tahun 2024, kegiatan pengembangan dan internasionalisasi Website MK Meliputi:

1. Pelayanan permintaan transliterasi Putusan MK dari Peneliti di Cambridge University.

From: Karen Lee <kl11000@cam.ac.uk>
Sent: Friday, February 23, 2024 1:37:36 PM
To: Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Subject: Request re judgment Case Number 013/PUU-I/2003 in English

Dear Sir or Madam

On the official website of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, I have found a pdf file of the English version of the Masykur Abdul Kadir Case (Case Number 013/PUU-I/2003), which deals with issues of public international law. I am writing to ask whether the Court would kindly grant permission to reproduce the English translation of that case in the *International Law Reports* (ILR).

The ILR, which I edit, with Sir Christopher Greenwood) is the main publication of the Lauterpacht Centre for International Law at the Law Faculty of the University of Cambridge in the United Kingdom. It is published in print and digital formats, in English, by Cambridge University Press <https://www.icli.cam.ac.uk/publications/international-law-reports> and contains judgments of international courts and tribunals, and judgments of national courts which deal with issues of public international law. We seek to include decisions from as wide a range of jurisdictions as possible and would like to include relevant judgments from the courts of Indonesia. The text of the judgment is reproduced following a summary of the case, which is prepared inhouse and written in ILR housestyle. The source of the material, and the kindness of those who have granted the ILR permission to reproduce it, is acknowledged in the preface of the relevant ILR volume in which the case is included.

If there is anyone who could advise me on how to find more judgments of Indonesian courts which deal with issues of public international law, I would be very grateful if you could give me their contact details.


Many thanks for your help.

Yours faithfully

Karen Lee

Karen Lee | Fellow, Lauterpacht Centre for International Law,
Faculty of Law, University of Cambridge
Fellow, Girton College, Cambridge, CBS OIG
Visiting Fellow, Faculty of Law, National University of Singapore

2. Pembaruan Tampilan Website www.en.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 4541/2300/TL.05.00/05/2024

Kepada : Kepala Pusat TIK
Dari : Pjt. Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Pemutakhiran Website en.mkri.id
Tanggal : 27 Mei 2024

Dengan hormat, menindaklanjuti pembahasan pemutakhiran website berbahasa Inggris (en.mkri.id) yang dihadiri oleh perwakilan Bagian Sekretariat Tetap AACC & KSLN dengan beberapa pranastr komputer, bersama ini kami sampaikan beberapa permohonan untuk perbaikan tampilan website dimaksud sebagai berikut:

- Penambahan kolom **search** pada menu berita pada **dashboard**
- Perubahan kolom "Date of Activity" pada menu "International Relations" menjadi "**Start Date**" dan penambahan satu kolom tanggal dengan **heading "End Date"**.
- Penambahan sub-menu "**Ethics Council**" pada menu "Library" yang berisi informasi nomor perkara, keterangan, *file* agar menyesuaikan menu ikhtisar putusan (Summary of Decision):

Summary of the Decision


search

108/PUU-XXI/2023

Judicial Review of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates - advocates' immunity in and out of court

[Summary \(PDF\)](#)

- Penambahan opsi pemilihan berita (*flagging*) untuk sub-menu "**Election News**" dan "**International News**" pada **dashboard**.
- Penghapusan kata "The" pertama pada **header** Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi "**Constitutional Court of the Republic of Indonesia**".



Plt. Kepala Biro Humas Masyarakat dan Protokol
Budi Wijayanto - NIP.198104062006041007
Digital Signature
mk-9449218f72-65271092640

Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-23209000 Fax: 021-3820177
Email: office@mkri.id


6. Penambahan informasi (fitur) dalam admin website Bahasa Inggris, agar kami dapat melakukan penghitungan waktu penyelesaian terjemahan berita terhitung dimulai dari pemuatan berita Bahasa Indonesia di upload di website mkri.id.

Demikian dapat disampaikan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kolaborasi dan sinergi yang selama ini telah terjalin, utamanya melalui PIC website bahasa Inggris dari Pusat TIK yaitu Sdr. Tarnoto dan Sdr. Ishak Purnama.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol,
Budi Wijayanto

3. Penyertaan pada Webinar Himpunan Penerjemah Indonesia dalam rangka pengembangan kompetensi pada "Lexis and Grammar tools for Legal Translator".



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

NOTA DINAS
NOMOR 2423/2300/HP.00.00/02/2024

Kepada : Sekretaris Jenderal
Dari : Pjt. Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Permohonan Penugasan Mengikuti Webinar HPI
Tanggal : 29 Februari 2024

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas penerjemahan bahasa asing, sekaligus persiapan untuk memasuki jabatan fungsional penerjemah, kami bermaksud untuk menugaskan pegawai yang berkaitan dengan tugas penerjemahan untuk mengikuti webinar "Lexis and Grammar for Legal Translators: Review and Exercises" yang akan diadakan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI) secara daring pada Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, pukul 09.00-11.00 WIB.

Adapun pegawai yang kami usulkan untuk mengikuti kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Fuad Subhan NIK. 199006012018063065	Penerjemah Bahasa Asing	Subbagian Sektap AACC
2.	Yuniar Widiastruti NIK. 198606212017074061	Penerjemah Bahasa Asing	Subbagian Kerja Sama Luar Negeri
3.	Rizky Kurnia Chaesario NIP. 199107282014022003	Analisis Informasi Perencanaan Kerja Sama Luar Negeri	Subbagian Kerja Sama Luar Negeri
4.	Sherly Octaviana Sari NIP. 19941026 201801 2 003	Analisis Kerjasama Bilateral dan Regional	Subbagian Sektap AACC
5.	Yumma Sisilia NIP. 19850702 200712 2 002	Analisis Kerja Sama Bilateral dan Regional	Subbagian Sektap AACC
6.	Lutfi Yudhistira NIP. 19830320 200604 1 006	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	Subbagian Kerja Sama Luar Negeri

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon dapat diberikan izin dan penugasan kepada pegawai diatas untuk mengikut kegiatan dimaksud.

Adapun terkait biaya kepesertaan Rp100.000 per orang dapat menggunakan anggaran PPK IV (Biro Humas dan Protokol).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol,
Budi Wijayanto

Plt. Kepala Biro Humas Masyarakat dan Protokol
Budi Wijayanto - NIP.198104062006041007
Digital Signature
mk-1736542608-242229113218

Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-23209000 Fax: 021-3820177
Email: office@mkri.id

4. Pencetakan Newsletter yang juga merupakan Konten laman www.en.mkri.id

Rekapitulasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2024

No.	Negara Tujuan	Tanggal Keberangkatan	Pimpinan Delegasi	Instansi/ Lembaga	Mission
1	Malaysia	14-15 Januari 2024	YM Wahiduddin Adams	Mahkamah Persekutuan Malaysia	Malaysia Open Legal Year 2024
2	Italia	13-18 Maret 2024	YM Arief Hidayat	Venice Commission	Meeting of the WCCJ
3	Thailand	11-14 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Thailand	Preparatory Meeting for AACC Congress
4	Kazakistan	14-19 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Kazakistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
5	Finlandia	21- 27 Juni 2024	Guntur Hamzah	Supreme Administrative Court	Judicial dialogue
6	Uzbekistan	21- 27 Juni 2024	YM Anwar Usman	MK Uzbekistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
7	Kanada	22-28 Juni 2024	Enny Nurbaningsih	MK Kanada	Judicial dialogue
8	Ajazair	22- 27 Juni 2024	Arsul Sani	MK Aljazair	Preparatory Meeting for AACC Congress
9	Inggris (London)	23-29 Juni 2024	Sekretaris Jenderal	MA Inggris	Penjajakan kerjasama bidang Hukum (Akademis)
10	Scotlandia			MA Scotlandia	
11	Rusia	Agustus 2024	Daniel Yusmic	MK Rusia	International Conference
12	Amerika Serikat	14-21 Agustus 2024	Ridwan Mansyur	NCSC	Tindak Lanjut kerjasama bidang Hukum (Akademis)
13	Dubai	13-17 September 2024	YM Suhartoyo	Dubai Judicial Institute	MOU
14	Thailand	17-22 September 2024	YM Suhartoyo	MK Thailand	Kongres AACC
15	Inggris (London)	28 september - 6 oktober 2024	YM Saldi Isra	Supreme Court of UK	Courtesy visit

5. Melakukan *update* Rekap Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka Pengembangan Kerja Sama MKRI yang juga merupakan konten pada laman www.en.mkri.id.

Rekapitulasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2024

No.	Negara Tujuan	Tanggal Keberangkatan	Pimpinan Delegasi	Instansi/ Lembaga	Mission
1	Malaysia	14-15 Januari 2024	YM Wahiduddin Adams	Mahkamah Persekutuan Malaysia	Malaysia Open Legal Year 2024
2	Italia	13-18 Maret 2024	YM Arief Hidayat	Venice Commission	Meeting of the WCCJ
3	Thailand	11-14 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Thailand	Preparatory Meeting for AACC Congress
4	Kazakistan	14-19 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Kazakistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
5	Finlandia	21- 27 Juni 2024	Guntur Hamzah	Supreme Administrative Court	Judicial dialogue
6	Uzbekistan	21- 27 Juni 2024	YM Anwar Usman	MK Uzbekistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
7	Kanada	22-28 Juni 2024	Enny Nurbaningsih	MK Kanada	Judicial dialogue
8	Ajazair	22- 27 Juni 2024	Arsul Sani	MK Aljazair	Preparatory Meeting for AACC Congress
9	Inggris (London)	23-29 Juni 2024	Sekretaris Jenderal	MA Inggris	Penjajakan kerjasama bidang Hukum (Akademis)
10	Scotlandia			MA Scotlandia	
11	Rusia	Agustus 2024	Daniel Yusmic	MK Rusia	International Conference
12	Amerika Serikat	14-21 Agustus 2024	Ridwan Mansyur	NCSC	Tindak Lanjut kerjasama bidang Hukum (Akademis)
13	Dubai	13-17 September 2024	YM Suhartoyo	Dubai Judicial Institute	MOU
14	Thailand	17-22 September 2024	YM Suhartoyo	MK Thailand	Kongres AACC
15	Inggris (London)	28 september - 6 oktober 2024	YM Saldi Isra	Supreme Court of UK	Courtesy visit

No.	Negara Tujuan	Tanggal Keberangkatan	Pimpinan Delegasi	Instansi/ Lembaga	Mission
1	Malaysia	14-15 Januari 2024	YM Wahiduddin Adams	Mahkamah Persekutuan Malaysia	Malaysia Open Legal Year 2024
2	Italia	13-18 Maret 2024	YM Arief Hidayat	Venice Commission	Meeting of the WCCJ
3	Thailand	11-14 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Thailand	Preparatory Meeting for AACC Congress
4	Kazakistan	14-19 Juni 2024	YM Arief Hidayat	MK Kazakistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
5	Finlandia	21- 27 Juni 2024	Guntur Hamzah	Supreme Administrative Court	Judicial dialogue
6	Uzbekistan	21- 27 Juni 2024	YM Anwar Usman	MK Uzbekistan	Preparatory Meeting for AACC Congress
7	Kanada	22-28 Juni 2024	Enny Nurbaningsih	MK Kanada	Judicial dialogue
8	Ajazair	22- 27 Juni 2024	Arsul Sani	MK Aljazair	Preparatory Meeting for AACC Congress
9	Inggris (London)	23-29 Juni 2024	Sekretaris Jenderal	MA Inggris	Penjajakan kerjasama bidang Hukum (Akademis)
10	Scotlandia			MA Scotlandia	
11	Rusia	Agustus 2024	Daniel Yusmic	MK Rusia	International Conference
12	Amerika Serikat	14-21 Agustus 2024	Ridwan Mansyur	NCSC	Tindak Lanjut kerjasama bidang Hukum (Akademis)
13	Dubai	13-17 September 2024	YM Suhartoyo	Dubai Judicial Institute	MOU
14	Thailand	17-22 September 2024	YM Suhartoyo	MK Thailand	Kongres AACC
15	Inggris (London)	28 september - 6 oktober 2024	YM Saldi Isra	Supreme Court of UK	Courtesy visit

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk pemutakhiran laman en.mkri.id adalah berupa laporan tahunan, sehingga pengukuran efektivitas internasionalisasi MK melalui pemutakhiran website en.mkri.id adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ kegiatan pemutakhiran} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan pemutakhiran}}{\text{Jumlah target Laporan pemutakhiran}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil yaitu:

$$\frac{1 \text{ laporan tahunan}}{1 \text{ target laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kinerja efektivitas internasionalisasi MK melalui kegiatan pemutakhiran laman en.mkri.id Inggris adalah 100%. Hal ini menyatakan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Kerja Sama Luar Negeri dalam Rangka Pengembangan kompetensi Pegawai

Dalam meningkatkan kualitas sebuah putusan, para YM. Hakim Konstitusi perlu didukung oleh *supporting system* di mana para pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam mengawal penegakan konstitusi dinilai perlu diberikan peningkatan dan perluasan kapasitas dalam mengikuti perkembangan ilmu dan penerapan hukum di mancanegara. Melalui program ini, pegawai tidak hanya akan dibekali dengan teori namun juga pengetahuan mengenai praktik penanganan perkara dan penegakan hukum di berbagai negara dengan metode pengajaran baik di dalam kelas maupun kunjungan ke berbagai institusi terkait.

Pada tahun 2024, penyelenggaraan kegiatan kerja sama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai telah menginjak beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap perikatan kerja sama dengan Dubai Judicial Institute melalui agenda kerja Ketua MKRI ke Dubai;
2. Tahap tindaklanjut kerja sama dengan MK Aljazair melalui kunjungan kerja Hakim Konstitusi Arsul Sani;

3. Tahap tindaklanjut kerja sama dengan NCSC (National Centre of State Court) melalui kunjungan kerja Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur;
4. Tahap penjajakan kerja sama dengan mitra kerja di Inggris Raya melalui kunjungan kerja Wakil Ketua MK;
5. Tahap penjajakan kerja sama dengan MA Skotlandia melalui kunjungan kerja Sekretaris Jenderal MK;
6. Tahap penjajakan kerja sama dengan MA Kanada melalui kunjungan kerja Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Adapun pengukuran efektivitas Internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui tersusunya laporan pelaksanaan perikatan, tindaklanjut dan penjajakan kerja sama luar negeri dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah:

% efektivitas recharging program	=	$\frac{\text{Jumlah kegiatan}}{\text{Jumlah Laporan Kegiatan}}$	x 100%
----------------------------------	---	---	--------

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\frac{6 \text{ Kegiatan}}{6 \text{ Laporan Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 100% berarti bahwa efektivitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui pelaksanaan Internasionalisasi MK melalui program pengembangan pegawai telah sesuai dengan target yang ditetapkan, dengan capaian sebesar 100%.

Dengan demikian, capaian kinerja dari keempat indikator yang berkaitan dengan layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

$$(280\% + 100\% + 100\% + 100\%) : 4 = 145\%$$

Capaian kinerja sebesar 145% untuk layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi tersebut tercapai karena terdapat capaian kinerja sebesar 280% pada indikator Kunjungan Kerja ke Luar Negeri. Capaian kinerja yang melebihi target yang sangat signifikan tersebut terjadi karena pada pertengahan tahun 2024, pasca penyelesaian sengketa perselisihan hasil

pemilihan umum (PHPU), terjadi optimalisasi anggaran Mahkamah Konstitusi yang sebagian dialihkan untuk mendukung kegiatan kunjungan luar negeri di Biro Humas dan Protokol, sehingga telah dilakukan 14 (empat belas) perjalanan dinas luar negeri bagi YM Bapak/Ibu Hakim Konstitusi dan Delegasi MK untuk agenda kegiatan yang krusial dan bermanfaat tinggi bagi Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kegiatan ini meningkat dari rencana sebelumnya yang telah dipersiapkan serta disetujui melalui DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2024, yaitu sebanyak 5 (lima) perjalanan dinas luar negeri.

Grafik Capaian Kinerja Internasionalisasi MK Tahun 2023 dan 2024



Dengan capaian kinerja sebesar 145% pada tahun 2024, maka capaian kinerja layanan publik internasionalisasi Mahkamah Konstitusi dinyatakan meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023) yaitu 115%.

2. Persentase Layanan Publik, Peningkatan Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang Efektif

Semakin banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak konstitusional mereka, maka semakin lancar dan efektif pula proses penegakan hukum yang dilakukan oleh MK. Ketika warga negara tahu apa yang

menjadi hak mereka, bagaimana cara menegakkannya, dan apa yang harus dilakukan jika hak-hak tersebut terlanggar, hal ini akan mendukung upaya MK dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif. Selain itu, pemahaman yang baik tentang konstitusi juga akan memperkuat peran MK dalam melindungi dan menjaga konstitusi negara, yang pada gilirannya akan menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Oleh karena itu, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa adanya kerja sama yang solid dengan pihak-pihak lain di luar lembaga tersebut, terutama dengan berbagai institusi dan elemen masyarakat di dalam negeri. Kolaborasi dan sinergi antara MK dan berbagai pihak eksternal sangat diperlukan untuk membangun kesadaran hukum yang lebih luas di kalangan masyarakat. Hal ini bukan hanya akan memperkuat posisi MK sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga akan mempercepat tercapainya tujuan utama yaitu terwujudnya negara hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional seluruh warganya.

Pada dasarnya kegiatan kerja sama dalam negeri direncanakan melalui beberapa pertimbangan di antaranya adalah melaksanakan kegiatan rutin tahunan yang selama ini dikerjasamakan, kegiatan insidental dari permohonan yang masuk ke MK dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi lembaga, serta inisiasi program baru.

Selama tahun 2024 kegiatan kerja sama dalam negeri dilakukan dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah kuliah umum, bedah buku, seminar nasional, kompetisi dan lomba-lomba mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat program baru berupa Web Seminar yang mengoptimalkan pemanfaatan *video conference* yang dikerjasamakan dengan 68 pengelola yang berasal dari perguruan tinggi, yayasan, dan Desa Konstitusi.

Perhitungan persentase efektivitas kegiatan kerja sama dalam negeri ini diukur dengan membandingkan jumlah kegiatan yang terealisasi dengan jumlah kegiatan yang direncanakan. Selama 2024 terdapat 16 kegiatan kerja sama dalam negeri yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang dioptimalkan berdasarkan ketersediaan anggaran, yaitu 16 kegiatan. Sehingga pengukuran indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Rumus: $(\text{Jumlah Kegiatan/Rencana Kegiatan}) \times 100\%$

Hasil Pengukuran: $(16 \text{ kegiatan}/16 \text{ kegiatan}) \times 100\% = 100\%$

Selanjutnya pada 2024, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kerja sama dalam negeri dibebankan pada akun kegiatan Penyebarluasan Informasi Penanganan dan Putusan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yaitu sejumlah Rp.11.447.771.000,-. Berdasarkan laporan Sistem Informasi dan Verifikasi Keuangan MK (SIVIKA), anggaran yang telah terealisasi untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama adalah sejumlah Rp.11.447.728.327,-. Dari penyandingan data ini, dapat diukur apabila dikonversikan ke dalam persentase adalah 100%.

Rumus: $(\text{Jumlah Pagu Anggaran} / \text{Jumlah Realisasi Anggaran}) \times 100\%$

Hasil Pengukuran: $(\text{Rp.11.447.771.000} / \text{Rp.11.447.728.327,-}) \times 100\% = 100\%$

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri dan dalam negeri	2	Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	100%	100%	100%

Realisasi anggaran yang sangat mendekati 100% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan tersebut sangat efisien dan hampir sepenuhnya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dalam kegiatan kerja sama ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada pemborosan atau kekurangan yang signifikan. Selain melihat dari sisi anggaran, perlu dilakukan evaluasi tentang efektivitas kegiatan penyebarluasan informasi ini. Apakah informasi yang disebarluaskan sudah menjangkau audiens yang tepat dan memberikan dampak yang diinginkan dalam rangka transparansi dan pemahaman publik terhadap putusan-putusan yang ada.

Metode pengukuran ini mirip dengan yang dilakukan pada 2023, yaitu dengan membandingkan antara rencana kegiatan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan, dengan hasil capaian indikator kinerja adalah 100%. Namun, pada 2023 terdapat juga pengukuran melalui survei tingkat kepuasan pegawai atas pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri. Survei ini mendapatkan nilai indeks sebesar **3,157** atau kualitas

Baik. Sehingga jika diperhitungkan dengan target kinerja atas layanan publik kegiatan kerja sama dalam negeri pada 2023 yaitu sebesar 90%, maka capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebagai **87.68%**. Selanjutnya didapatkan rata-rata dari dua pengukuran ini adalah sebesar **93.84%**. Dengan target kinerja sebesar 90%, dan capaian sebesar 93.84%, maka target kinerja untuk indikator efektivitas layanan fasilitas kegiatan kerja sama dalam negeri telah melebihi target yang ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar **104%**.

Apabila dibandingkan dengan 2023 terdapat perubahan pada 2024, yaitu pada indikator kinerja juga dengan rumus pengukuran. Indikator kinerja 2024 disusun dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran. Sehingga apabila ketersediaan anggaran terbatas, maka pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara optimalisasi anggaran, serta penyesuaian perencanaan kegiatan yang efektif dan efisien

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2023	90%	93.84%	104%
Persentase Layanan Publik, Peningkatan, Pemahaman, Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri yang efektif	2024	100%	100%	100%

Dapat disimpulkan bahwa **2024** dengan penghitungan pendekatan berbasis anggaran menunjukkan capaian yang **efektif dan efisien** dalam hal penggunaan anggaran (mendekati 100%). Meski demikian, untuk mencapai **100% efektivitas** dalam mencapai tujuan tersebut, perlu ada pengukuran kepada kepuasan masyarakat dan evaluasi lebih lanjut mengenai **dampak sosial, jangkauan publikasi, dan respons masyarakat terhadap informasi yang disebar** seperti yang dilakukan pada 2023 yang melakukan survei pada pegawai Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui bahwa kegiatan kerja sama dalam negeri pada tahun 2024, dilakukan usai pelaksanaan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Anggota Legislatif 2024, yaitu pada Maret 2024. Selain itu pula, dibatasi saat persiapan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 yang dimulai pada 22 November 2024. Sehingga selain keterbatasan anggaran, pada 2024 juga terdapat keterbatasan waktu, serta sumber daya manusia yang saat itu difokuskan pada proses Pemilu.

Dapat diuraikan kegiatan kerja sama dalam negeri yang dilaksanakan pada 2024 adalah sebagai berikut.

1. Kuliah Umum bertema "Menuju Indonesia Emas 2045: Membangun Generasi Muda yang Berkompeten, Berintegritas, dan Berwawasan Kebangsaan: Perspektif Mahkamah Konstitusi" bekerja sama dengan Universitas Andalas (UNAND), Padang, pada Jumat 8 Maret 2024.



2. Bedah buku "Kompilasi dan Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi: KUHAP, KUHP dan Tindak Pidana di Luar KUHP" bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta di Ruang Mini Auditorium Lantai 4 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, pada Sabtu 9 Maret 2024



3. Kegiatan Debat Hukum dan Seminar Nasional dengan tema “"Hukum dan Kepemimpinan Perempuan: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pembangunan Masyarakat yang Inklusif" pada *Indonesian Law Debating Competition* Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024 (ILDC FH UI 2024), bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok pada tanggal 20 – 21 April 2024



4. Seminar Nasional dengan tema “Transformasi Hukum Nasional dalam Paradigma Pancasila Menuju Indonesia Emas 2025” dan Kompetisi Semar Law Competition 2024 bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pada Sabtu-Minggu, 11-12 Mei 2024 di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.



5. Kuliah Umum dengan tema “Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-nilai Pancasila” dan Peresmian pemanfaatan Smart Board Mini Court Room kerja sama antara Mahkamah Konstitusi dengan Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Jumat 5 Juli 2024 di Museum Agung Bung Karno Denpasar, Bali.



6. Seminar dengan tema “Meninjau Judicial Restraint dan Judicial Activism dalam Kontestasi Politik Guna Menjamin Legitimasi Hukum” dan Kompetisi Constitutional Law Festival 2024 (CLFest 2024) bekerja sama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) pada 19 di UBTV Lantai 2, Gedung Rektorat, Universitas Brawijaya, Malang.



7. Seminar dengan tema “Pembangunan Hukum dalam Akselerasi Nilai Konstitusi di Era Transformasi Politik Menuju Indonesia Emas 2045” dan Kompetisi UIN Law Fair VII 2024 bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan pada Jumat-Minggu, 25-27 Oktober 2024.



8. Kuliah umum dengan tema “Memperkuat Sadar Konstitusi di Kalangan Generasi Z di Era Demokrasi Digital” dan Kompetisi Pekan Konstitusi XV bekerja sama dengan Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis-Minggu, 24-28 Oktober 2024.



9. Seminar Nasional dengan tema “Peranan *Dissenting Opinion* sebagai Katalisator Perubahan dalam Membentuk Putusan Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Publik” dan Kompetisi Diponegoro Law Fair 2024 kerja sama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, di Auditorium Universitas Diponegoro (Undip) pada Jumat-Minggu, 26-27 Oktober 2024.



10. Sarasehan Nasional dengan tema “Mahkamah Konstitusi dan Tantangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024” kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Pemerintah Kabupaten Kudus pada Jumat, 1 November 2024 di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.



11. Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding, MoU*) dan Seminar Nasional bertema “Mahkamah Konstitusi: Mengawal Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah” bekerja sama dengan Universitas Muria Kudus (UMK) pada Jumat 1 November 2024, di Ruang Auditorium Universitas Muria Kudus, Kudus, Jawa Tengah.



12. Kegiatan The 6th International Conference on Law and Governance (iClave) 2024 kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada Senin-Rabu, 4-5 November 2024 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.



13. Penyediaan Piala untuk Kompetisi Debat Konstitusi Nasional 2024 (HMPS HKI UIN Tulungagung) dan Kompetisi Debat Konstitusi Nasional 2024 (DEMA UIN Tulungagung) kerja sama dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 1 November 2024.



14. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-8*” Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada Hari Jumat, tanggal 15 November 2024



15. Peresmian Nagari Konstitusi Podcast dan Ceramah Hukum kerja sama dengan Nagari Pasia Laweh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 15 November 2024.



16. Seminar Nasional UII Law Fair Piala Mohammad Natsir Tahun 2024 dengan Tema “Progresivitas Hukum Nasional Dalam Menjawab Tantangan Global Menuju Indonesia Emas 2045” bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada Jumat, 22 November 2024.



17. Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) III pada Jumat-Minggu 6-8 Desember 2024 di Balikpapan.



Selain kegiatan tersebut di atas, pada 2024 MK menginisiasi program baru yaitu Web Seminar (Seminar) dengan memanfaatkan *smartboard mini court room* berupa Video Conference (Vicon) di 68 lokasi, baik pada Perguruan Tinggi maupun Desa Konstitusi di daerah binaan MK. Hal ini merupakan pengoptimalan penggunaan Vicon yang dimiliki MK, selain utamanya dipergunakan untuk persidangan jarak jauh.

Selama 2024, Webinar Konstitusi telah dilaksanakan sebanyak 20 kali dengan jadwal setiap hari Jumat, dimulai pada 5 Juli 2024 dan berakhir pada 22 November 2024. Bekerja sama dengan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK, Webinar dilakukan melalui aplikasi zoom untuk diikuti oleh seluruh pengelola Vicon dengan menghadirkan peserta secara luring di lokasi Vicon masing-masing, serta masyarakat umum lainnya secara daring, serta ditayangkan secara ulang melalui akun Youtube resmi MK.

Narasumber Webinar 2024 berasal dari berbagai latar belakang profesi yang terdiri dari Ketua dan Hakim Konstitusi, Ketua MK periode sebelumnya, anggota Komisi III DPR, pakar hukum tata negara yang tergabung dalam APHTN-HAN, serta pengamat hukum, politik dan pemilu. Webinar mengangkat tema pembahasan mengenai konstitusi, Mahkamah Konstitusi, hukum adat, serta isu politik dan pemilu. Berikut rekap Webinar Konstitusi selama tahun 2024:

1	5 Juli 2024	Fakultas Hukum Universitas Pancasila Dr. Subartoyo, S.H., M.H. "Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi dan Demokrasi dalam Pemilu" 253 Peserta	2	12 Juli 2024	Fakultas Hukum Universitas Andalas Prof. Dr. Jimmy Aashiddiqie, S.H., M.H. "Peradilan Konstitusi dan Etika Konstitusi" 60 Peserta	3	19 Juli 2024	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Dr. Jemmy J Pieterz, S.H., M.H. "Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayah Laut" 194 Peserta	4	26 Juli 2024	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Komisi III DPR Taufik Basari "Konstitusi sebagai Penjaga dan Penyelaras Pancasila" 203 Peserta
5	2 Agustus 2024	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Enny Nurbaningsih "Pilkada Serentak 2024 dan Penyelesaian Persepsi Hasil oleh Mahkamah Konstitusi" 152 Peserta	6	16 Agustus 2024	Fakultas Hukum Universitas Musamus Dr. Zulkifli Apan, S.H., M.H. "Menjerat Kader, Melepas Partai Politik" 222 Peserta	7	23 Agustus 2024	Fakultas Hukum Universitas Jambi Dr. Daniel Yusmic, S.H., M.H. "Internalisasi Nilai-nilai Konstitusi Sebagai Kunci Menuju Indonesia Emas 2045" 285 Peserta	8	30 Agustus 2024	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. "Memastikan Kepatuhan Konstitusi dalam Pemilihan Kepala Daerah" 343 Peserta
9	6 September 2024	Fakultas Hukum Universitas Khairun Prof. Jimmy Aashiddiqie "Judicial Activism Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi" 599 Peserta	10	13 September 2024	Fakultas Hukum Universitas Halu oleo Dr. R. Ramdan Zoelva, S.H., M.H. "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya Terhadap Kepercayaan Masyarakat" 522 Peserta	11	20 September 2024	Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. "Menganal Batu Uji Konstitusional di Negara Bertradisi Eropa Kontinental dan Anglo Saxon" 996 Peserta	12	27 September 2024	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Prof. Dr. Bambang Amara, S.H., M.H. "Problematis Perbedaan Tafsir oleh MA dan MK dalam Judicial Review" 723 Peserta
13	4 Oktober 2024	Fakultas Hukum Universitas Mataram Titi Anggraini, S.H., M.H. "Peran Civil Society Dalam Mewujudkan Pilkada Yang Jujur dan Adil" 443 Peserta	14	11 Oktober 2024	Fakultas Syarifah UIN Maulana Malik Ibrahim Dr. Daniel Yusmic, S.H., M.H. "Politik Hukum dan Pemilu: Implikasi Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi" 630 Peserta	15	18 Oktober 2024	Fakultas Hukum Universitas Hegeri Gorontalo Bivetri Susanti, S.H., LL.M. "Mahkamah Konstitusi sebagai Katalisator Reformasi Hukum: Evaluasi dan Tantangan" 1063 Peserta	16	25 Oktober 2024	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H. "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Konstitusi: Mewujudkan Rekonsiliasi dan Pemulihan" 476 Peserta
17	1 November 2024	Fakultas Hukum Universitas Negeri Solo Prof. Sisil Dwi Harjanti, S.H., LL.M., Ph.D. "Mahkamah Konstitusi dan Keadilan Prosedural" 580 Peserta	18	8 November 2024	Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Hamdan Zoelva "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Sistem Politik Indonesia" 706 Peserta	19	15 November 2024	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H. "Reformasi Kementerian Negara dalam Perspektif Konstitusi" 229 Peserta	20	22 November 2024	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Moh. Haidar MD "Politik Penegakan Hukum dan Konstitusi di Indonesia" 799 Peserta

3. Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif

Efektivitas pelaksanaan perencanaan dan koordinasi kegiatan Sektap AACC diukur dengan membandingkan antara perencanaan yang telah disusun pada awal tahun terkait layanan publik kegiatan Sektap AACC yang efektif dengan realisasi yang berhasil dicapai yang dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan.

Sebagaimana termaktub dalam Statuta AACC Pasal 22 Ayat 7, Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi memiliki tanggung jawab untuk antara lain:

1. Memberikan dukungan protokol dan administratif kepada Asosiasi dan anggotanya.
2. Mendorong dan memberikan dukungan kepada Asosiasi dalam menjalin hubungan dengan organisasi dan forum internasional, serta pihak eksternal lainnya.

3. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pembangunan SDM, pertukaran SDM, beasiswa dan magang, yang tidak termasuk dari kegiatan Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM, serta
4. Merencanakan dan mengoordinasikan urusan keuangan mengenai kegiatan Asosiasi.

Untuk tahun anggaran 2024, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat empat kegiatan yang menjadi indikator efektivitas internasionalisasi MK, yaitu:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC, termasuk di dalamnya adalah dukungan Sektap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi kepada Presiden AACC terpilih, utamanya dalam persiapan dan pelaksanaan Kongres dan BoMM;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC;
- c. Penerjemahan berita dan Putusan ke dalam Bahasa Rusia dan kemudian dimuat dalam website aacc-asia.org.
- d. Pemutakhiran website aacc-asia.org.

Berikut dapat kami laporkan kinerja Sektap AACC selama periode 2024.

Berkaitan dengan target kinerja, penetapan target kinerja untuk Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif tahun 2024 didasarkan pada Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, yaitu 94%. Target ini juga sesuai dengan telah ditetapkan di dalam jangka menengah sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis MK 2020-2024.

- a. **Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Negara Anggota AACC;**
Terkait kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC, Sektap AACC telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu antara lain:

1. **Koordinasi dengan negara Anggota AACC**

- a) **Kompilasi Agenda Kegiatan Anggota AACC.**

Kegiatan internasional dari masing-masing negara anggota AACC

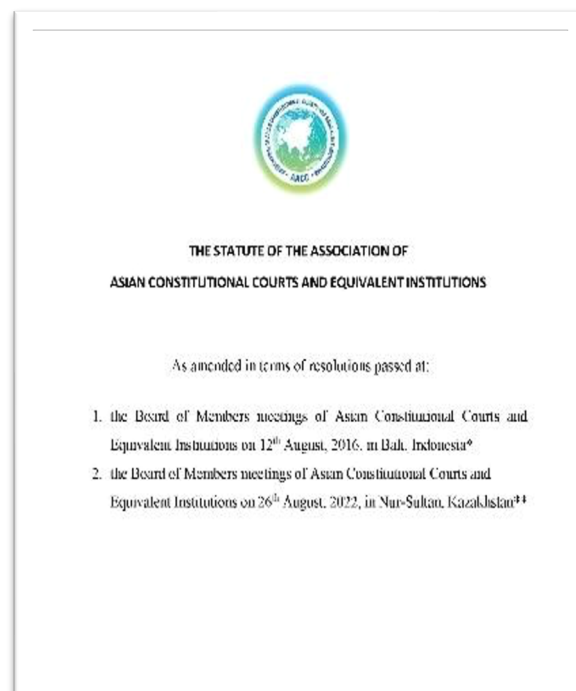
yang dikompilasi oleh Sektap AACC meliputi simposium internasional, konferensi, serta lokakarya yang diselenggarakan selama tahun 2024 oleh setiap anggota AACC, yaitu:

No.	Kegiatan	Penyelenggara	Tempat dan Tanggal
1.	Opening Legal Year 2024	Mahkamah Federal Malaysia	Putrajaya, 15 Januari 2024
2.	Conference on Technology and Judicial Dialogue	Mahkamah Agung India (berkolaborasi dengan MASingapura)	India, 13-14 April 2024
3.	4th Research Conference of AACC SRD	Mahkamah Konstitusi Korea (AACC SRD)	Seoul, 27-30 Mei 2024
4.	The XII St. Petersburg International Legal Forum	Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia	St. Petersburg, 26-28 Juni 2024
5.	Meeting of Secretaries General (MSG) 2024	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	5 September 2024 (<i>online</i>)
6.	The 6th Congress of AACC	Mahkamah Konstitusi Thailand	Bangkok, 17-21 September 2024
7.	The 12th International Summer School - Centre for Training and Human Resources Development	Mahkamah Konstitusi Turkiye	30 September – 3 Oktober 2024
8.	AACC LO Meeting	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	19 November 2024

Kompilasi tersebut juga telah diunggah dalam laman aacc-asia.org. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah koordinasi antaranggota AACC dalam melaksanakan kegiatan internasional dari masing-masing negara anggota.

b) Penyusunan Statuta AACC menjadi Satu Naskah

Sektap AACC berhasil menyusun dan mengompilasi statuta AACC ke dalam satu naskah komprehensif sesuai amanat *Board of Members Meeting* (BoMM) yang diselenggarakan di Mongolia. Naskah ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan Rusia. Mahkamah Konstitusi Rusia juga turut membantu untuk menerjemahkan Statuta AACC dalam versi bahasa Rusia. Publikasi statuta ini juga dilaporkan dan disahkan pada Kongres ke-6 AACC di Bangkok dan dapat diakses di situs resmi AACC.



Keterangan: Statuta AACC dalam Satu naskah

c) **Pertemuan dengan Sekretariat Presiden AACC (Thailand)**

Pada bulan Maret 2024, telah diadakan pertemuan dengan Sekretariat Presiden AACC yang saat ini dipegang oleh Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand secara daring dalam rangka membahas persiapan Presiden AACC untuk Rapat Biro WCCJ yang diadakan di Venice, Italy. SPC banyak memberikan masukan-masukan kepada Sekretariat Presiden AACC mengenai persiapan rapat WCCJ tersebut mengingat Presiden AACC mewakili benua Asia akan memberikan pendapatnya terhadap isu-isu yang dibahas pada rapat tersebut. Antara lain, beberapa ketegangan yang terjadi di wilayah Asia, Eropa Timur, dan Timur tengah.



Keterangan: Meeting dengan MK Thailand via Zoom

d) Kompilasi Artikel Berita PHPU Pilpres dan Pileg 2024

Pada bulan April 2024, AACC SPC mengirimkan kompilasi artikel terkait Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Legislatif tahun 2024 kepada seluruh anggota AACC dan mitra AACC, termasuk kedutaan besar negara anggota AACC yang berlokasi di Jakarta. Kompilasi ini berisi laporan tentang proses hukum, putusan, dan perkembangan terkait PHPU di Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai isu-isu konstitusional terkait pemilu. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, berbagi pengetahuan, dan mendukung pengembangan sistem hukum konstitusi serta pemilu di kalangan anggota dan mitra AACC.



Keterangan: Kompilasi Artikel Berita PPHU Pilpres dan Pileg 2024

e) Penerbitan AACC Newsletter Volume 4 dan 5

Pada bulan Juni 2024 dan Desember 2024, SPC Kembali menerbitkan AACC Newsletter Volume 4 dan Volume 5. Newsletter kali ini menampilkan rangkuman kegiatan dari 20 (dua puluh) negara anggota AACC yang dimulai dari Juni 2023 hingga Juni 2024 untuk Newsletter Volume 4 dan rangkuman kegiatan dari bulan Juli hingga Desember 2024 untuk Newsletter Volume 5. Edisi kali ini juga memuat rubrik khusus “Update From Africa” yang memberikan informasi terkini terkait badan peradilan Afrika Selatan sebagai satu anggota asosiasi MK se-Afrika yang baru saja mempunyai hakim perempuan untuk pertama kalinya.



Keterangan: Newsletter Volume 4, 2024



Keterangan: Newsletter Volume 5, 2024

Selain itu pada Newsletter kali ini, beberapa negara anggota AACC yaitu, Indonesia, Bangladesh juga memberikan informasi mengenai

putusan terkini yang dianggap cukup monumental. Sedangkan MK Kazakhstan memberikan informasi mengenai penerbitan Undang-Undang mereka dalam huruf Braile. Dengan adanya Newsletter ini diharapkan dapat memperkuat komunikasi dengan dan kolaborasi antar anggota serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap AACC dari negara-negara anggota.

f) Meeting 3 (Tiga) Sekretariat Tetap

Pada Jumat, 8 Agustus 2024, perwakilan dari tiga sekretariat tetap AACC, yaitu Sekretariat Perencanaan dan Koordinasi (SPC) Indonesia, Sekretariat Penelitian dan Pengembangan (SRD) Korea, dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan SDM (CTHRD) Turki, bersama dengan Sekretariat Presiden dari MK Thailand telah mengadakan pertemuan secara daring melalui Zoom.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyinkronkan rencana kerja, membahas strategi kolaborasi, dan mempersiapkan agenda strategis, seperti Kongres dan Board of Members Meeting (BoMM) AACC yang dilaksanakan pada tanggal 19-21 September 2024. Beberapa topik penting yang dibahas antara lain meliputi pembaruan buku tahunan SRD dengan tema "Hak Konstitusional dan Lingkungan Hidup," persiapan Program Summer School oleh CTHRD Turki dengan tema "Penggunaan Teknologi Informasi dan AI dalam Kehakiman," serta isu strategis terkait kontribusi keuangan dan perluasan keanggotaan AACC.

Pertemuan ini dilaksanakan secara kolaboratif, dengan masing-masing sekretariat berbagi pembaruan dan masukan, mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat jejaring hukum konstitusional di kawasan Asia serta membangun hubungan dengan asosiasi internasional lainnya seperti CCJA dan CECC. Diskusi ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan tujuan strategis AACC dan mendukung keberlanjutan kerja sama antar lembaga.

g) Kongres Ke-6 AACC

Kongres ke-6 *The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* (AACC) 2024 mengangkat tema “*Pengadilan Konstitusi dan Lembaga Setara dalam Memperkuat Keadilan Konstitusi untuk Masyarakat Berkelanjutan*”. Kongres kali ini diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 18 hingga 19 September 2024 dengan tuan rumah Mahkamah Konstitusi Kerajaan Thailand.



Keterangan: Pembukaan Kongres ke-6 AACC di Bangkok, Thailand

Kongres terdiri atas dua bagian utama:

- 1) **Kongres** yang bertujuan untuk pertukaran pengalaman dan pemikiran di antara hakim konstitusi.
- 2) **Board of Members Meeting (BoMM)** yang hanya dihadiri oleh anggota AACC untuk membahas isu-isu penting terkait pengorganisasian asosiasi dan finalisasi Deklarasi Bangkok sebagai hasil kongres.

Selain konferensi dan Board of Members Meeting, rangkaian Kongres AACC ke-6 juga meliputi penandatanganan nota kesepahaman antara AACC dan Asosiasi Mahkamah Konstitusi Berbahasa Spanyol (CIJC - *Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional*).



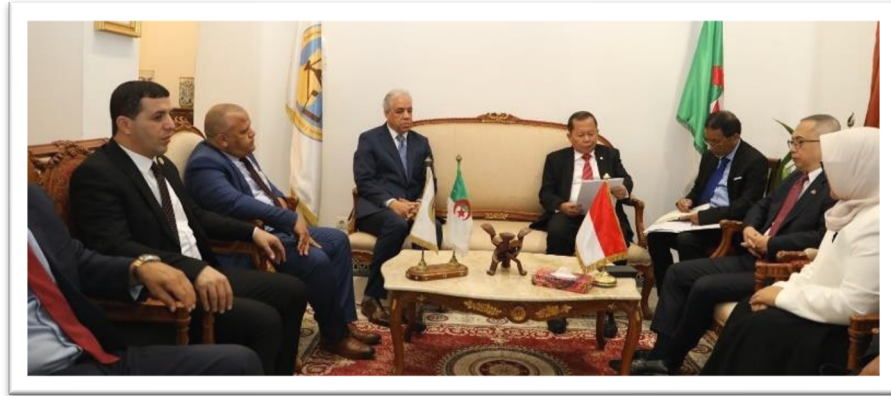
Penandatanganan MoU AACC dan CIJC

Ketua MKRI YM Suhartoyo beserta Sekretaris Jenderal MKRI Bapak Heru Setiawan turut hadir dalam rangkaian acara tersebut dalam kapasitasnya sebagai ketua delegasi MKRI dan sebagai Kepala Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi.

Dalam Kongres Ke-6 AACC tersebut juga menghasilkan Deklarasi Bangkok yang pada intinya menyoroti mengenai keadilan, perdamaian dunia, serta hak asasi manusia, terutama yang terjadi pada rakyat Palestina.

2. Pertemuan AACC-CCJA di Aljazair dan Persiapan Kongres Kedua AACC-CCJA

Sebagai bagian dari peningkatan kerja sama dengan Asosiasi MK se-Afrika, pada 23 Juni 2024 telah terjadi pertemuan antara SPC dengan Sekretariat tetap Conference of Constitutional Jurisdiction of Africa (CCJA) di Aljazair. Pertemuan ini membahas mengenai persiapan kongres kedua AACC-CCJA yang direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Angola disebut sebagai negara yang berpotensi menjadi tuan rumah kongres tersebut. Dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang dapat dilakukan antar kedua asosiasi.



Keterangan: YM. Hakim Konstitusi Arsul Sani mengunjungi Sekretariat Tetap CCJA di Aljazair

3. Pertemuan Bilateral dengan Heilongjiang High People's Court China.

Pada 22 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima delegasi dari Heilongjiang High People's Court, Republik Rakyat Tiongkok. Delegasi ini terdiri dari empat anggota utama: Ma Guo (Wakil Presiden/Senior Judge), Liu Xuefeng (Presiden/Senior Judge dari Shuangyashan Intermediate People's Court), Wang Yao (Hakim Ketua/Senior Judge dari Divisi Sipil Pertama), dan Wu Haipeng (Kandidat Presiden/Senior Judge dari Huachuan County People's Court). Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral serta memperluas pemahaman terkait sistem perlindungan konstitusi, khususnya mengenai hak perempuan dan anak serta mengenai prosedur pengajuan perkara.



Keterangan: YM Suhartoyo menemui delegasi dari Heilongjiang High People's Court, Republik Rakyat Tiongkok

4. Pertemuan Koordinasi dengan AACC Secretariat for Research and Development (SRD)

Pada 6-7 November 2024 dilakukan pertemuan koordinasi untuk memperkuat sinergi antara Sekretariat Tetap AACC Bidang Perencanaan dan Koordinasi (SPC) dan AACC SRD melalui kunjungan kerja oleh Delegasi AACC SRD yang terdiri dari Mr. Hyungsoo Kim (Deputy Director) dan Mr. Ilho Kim (Assistant Director) ke Kantor AACC SPC di Jakarta.



Keterangan: Pertemuan dengan AACC SRD

Dalam kunjungan ini, dilaksanakan pertemuan dan diskusi yang membahas mengenai kegiatan yang dilakukan atau sedang disiapkan oleh kedua belah Sekretariat. Selain koordinasi mengenai kegiatan dari kedua belah pihak, dalam kunjungan tersebut juga membahas mengenai pengelolaan kontribusi keuangan antar anggota, tema kegiatan internasional, serta rencana ekspansi anggota AACC. Sebelumnya delegasi diperkenalkan dengan struktur organisasi MKRI. Pada diskusi tersebut juga dibahas mengenai inovasi program penelitian dan konferensi serta refleksi untuk peringatan 10 tahun Sektap AACC di 2026. Kedua belah pihak sepakat untuk terus mengembangkan jejaring global dan memperdalam sinergi dalam pengelolaan organisasi AACC.

Pengukuran efektivitas Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif melalui kegiatan koordinasi dengan negara anggota AACC dilakukan melalui tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan negara anggota AACC.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah:

% efektivitas Kegiatan koordinasi dengan negara AACC	= $\frac{\text{Jumlah kegiatan}}{\text{Jumlah Laporan Kegiatan}} \times 100\%$
--	--

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.

$$\frac{4 \text{ Kegiatan}}{4 \text{ Laporan Kegiatan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 94% maka capaian kinerja efektivitas Layanan Publik Sektap AACC melalui kegiatan Koordinasi dengan Negara AACC adalah 106%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan.

b. Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC

Dalam hal pelaksanaan kegiatan internasional dalam lingkup AACC, Sektap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi untuk tahun 2024 telah menetapkan target kinerja yang telah dipersiapkan serta disetujui melalui DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2024, yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan internasional dalam lingkup AACC. Di awal tahun 2024, Sektap AACC telah merencanakan untuk membuat AACC Liaison Officers Meeting (LO Meeting) sebagai bentuk realisasi terhadap rencana kegiatan dimaksud dalam kapasitasnya sebagai Sektap AACC bidang perencanaan dan koordinasi. Pertemuan ini direncanakan untuk dapat diinisiasi pada akhir tahun 2024 dengan mengingat pentingnya peran Liaison Officers dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antaranggota AACC guna mendukung keberlanjutan kegiatan AACC untuk tahun 2025.

Namun, pada bulan Agustus 2024, Sektap AACC menerima surat dari MK Thailand sebagai Presiden AACC periode 2023-2025 dengan Nomor Surat 0015.1/1323 tertanggal 15 Agustus 2024 perihal pemberian mandat kepada Sektap AACC untuk menyelenggarakan Meeting of Secretaries General of AACC 2024 sebagai bagian dari rangkaian Kongres Ke-6 AACC dan Board of Members Meeting (BoMM) untuk membantu Sekretariat Presiden AACC, dalam hal ini MK Thailand.

Oleh karena ini merupakan mandat asosiasi di tingkat internasional, maka Sektap AACC pada tahun 2024 menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan internasional, yaitu: (1) Meeting of Secretaries General (MSG) sebagai bagian dari rangkaian Kongres Ke-6 AACC dan Board of Members Meeting (BoMM) berdasarkan mandat dari Presiden AACC; dan (2) AACC Liaison Officers Meeting sebagai tindak lanjut dari hasil Board of Members Meeting yang sudah menjadi rencana kerja Sektap AACC sejak awal.

1. Meeting of Secretaries General

Pada tanggal 5 September 2024, AACC SPC menyelenggarakan Meeting of Secretaries General (MSG) AACC yang dilaksanakan secara daring, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Thailand, yang juga bertindak sebagai Host Secretariat / Secretariat Presiden AACC untuk periode 2023–2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan Kongres Ke-6 AACC yang diadakan di Bangkok, serta memperkuat koordinasi antar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi anggota AACC. Pertemuan ini dihadiri oleh 16 negara anggota AACC, termasuk Indonesia, Thailand, Korea, Kazakhstan, dan Turki.

MSG membahas sejumlah isu strategis, termasuk usulan pengaktifan iuran tahunan anggota AACC untuk memperkuat kemandirian keuangan organisasi, rencana kerja sama dengan asosiasi regional seperti CCJA dan CECC, pembahasan draf *Bangkok Declaration*, serta penyampaian laporan dari ketiga sekretariat tetap AACC. Pertemuan ini menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang akan dibahas lebih lanjut dalam *Board of Members Meeting* (BoMM).



Keterangan: Sektap AACC menyelenggarakan Meeting of Secretaries General of AACC 2024 secara daring

SPC selalu berkoordinasi dengan MK Thailand sebagai Sekretariat Presiden AACC, termasuk berkoordinasi dan membantu dalam mempersiapkan segala masukan yang dibutuhkan, baik berupa saran, penyediaan administrasi, hingga sarana dan prasarana yang kiranya dibutuhkan untuk menyukseskan kegiatan wajib dan utama AACC dimaksud.

2. AACC Liaison Officers Meeting

Pada tanggal 19 November 2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi (AACC SPC), menyelenggarakan pertemuan daring bagi para Liaison Officers (LO) negara anggota AACC. Pertemuan ini menekankan pentingnya peran Liaison Officers dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antaranggota AACC guna mendukung keberlanjutan kegiatan AACC.



Keterangan: Sekjen MKRI memberikan sambutan pembuka pada AACC Liaison officers Meeting 2024

Pertemuan ini berfokus pada dua agenda utama, yaitu pengajuan prosedur kontribusi keuangan dan penyusunan tema untuk International Short Course 2025. Partisipasi dari berbagai negara, termasuk Azerbaijan, Kazakhstan, Thailand, dan Malaysia, mencerminkan keberagaman perspektif yang memperkaya sudut pandang dan pemikiran.



Keterangan: Kepala Biro Humas dan Protokol menyampaikan sambutan penutup pada AACC Liaison officers Meeting 2024

Di akhir pertemuan MKRI sebagai AACC SPC menyampaikan apresiasi atas kontribusi semua peserta. Beliau menekankan pentingnya peran Liaison Officers dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi antaranggota AACC. Hasil diskusi ini akan disampaikan pada Board of Members Meeting (BoMM) mendatang.

Pada awal tahun 2024 telah disepakati bahwa target penyelenggaraan kegiatan internasional dalam lingkup AACC adalah satu kegiatan internasional. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif melalui pelaksanaan kegiatan internasional dalam lingkup AACC dilakukan melalui penghitungan atas terlaksananya kegiatan internasional atas target yang telah disepakati.

Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah:

% efektivitas Kegiatan Internasional dalam lingkup AACC	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan Internasional}}{\text{Target Kegiatan Internasional}} \times 100\%$
---	--

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{2 \text{ Kegiatan Internasional}}{1 \text{ Target Kegiatan Internasional}} \times 100\% = 200\%$$

Dengan terselenggaranya 2 (dan) kegiatan internasional dalam lingkup AACC dan dengan target kinerja sebesar 94% sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 311 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja utama Biro/Pusat/Inspektorat di Lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020-2024, maka capaian kinerja efektivitas internasionalisasi Mahkamah Konstitusi melalui kegiatan internasional dalam lingkup AACC adalah 200%. Hal ini berarti bahwa capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan dengan alasan MK Indonesia melalui Biro Humas dan Protokol menjalankan mandat organisasi internasional untuk menggelar tambahan 1 (satu) kegiatan internasional berupa Meeting of Secretaries General of AACC (MSG).

c. Penerjemahan Berita dan Putusan ke dalam Bahasa Rusia dan Website aacc-asia.org

Salah satu bidang pekerjaan Sekretariat Tetap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi adalah kegiatan penerjemahan yang meliputi berita, ikhtisar, putusan dan pengumuman kegiatan internasional AACC, profil negara-negara anggota, serta dokumen dan informasi lainnya yang tersedia dalam Bahasa Inggris serta Bahasa Rusia yang merupakan bahasa resmi Asosiasi guna memberikan kemudahan dalam mendapatkan berbagai informasi mengenai kegiatan internasional anggota AACC.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memajukan AACC, Sektap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi telah menetapkan Tapkin penerjemahan untuk tahun 2024. Sesuai dengan target yang disepakati bahwa putusan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia untuk tahun 2024 adalah sebanyak 40 ikhtisar putusan dan 1 putusan lengkap.

Dengan demikian, selama periode Januari – Desember 2024 Sektap AACC bidang Perencanaan dan Koordinasi telah berhasil menyelesaikan penerjemahan ke dalam Bahasa Rusia dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerjemahan Berita AACC : 11 Berita
2. Penerjemahan Ikhtisar Putusan : 40 Ikhtisar
3. Penerjemahan Putusan : 1 Putusan
4. Penerjemahan & input kegiatan AACC : 7 Konten
5. Penerjemahan surat masuk/surat keluar : 20 Surat

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk penerjemahan adalah berupa laporan semester, sehingga pengukuran efektivitas internasionalisasi MK melalui penerjemahan berita adalah sebagai berikut.

$\% \text{ kegiatan penerjemahan} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan penerjemahan}}{\text{Jumlah target Laporan penerjemahan}} \times 100\%$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil yaitu:

$$\frac{2 \text{ laporan}}{2 \text{ target laporan}} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 94%, maka capaian kinerja efektivitas Layanan Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif melalui kegiatan penerjemahan ke dalam bahasa Inggris adalah 106%. Hal ini menyatakan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

d. Pemutakhiran website aacc-asia.org.

Dalam hal target pemutakhiran dan pengembangan Website AACC, sub bagian AACC selama bulan Januari—Desember 2024 melakukan beberapa pemutakhiran dan pengembangan antara lain:

1. Pembaruan berkala telah dilakukan terkait informasi terbaru Liaison Officers (LO) darisemua anggota AACC.
2. Secara berkala telah dilakukan pembaruan untuk memastikan nama Hakim Ketua dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi anggota AACC agar

informasi tersebut selalu terkini dan akurat. Pembaruan ini penting untuk menjaga kelancaran komunikasi.

- Menginput berbagai kegiatan member AACC dan Event AACC selama tahun 2024 dalam kalender kegiatan AACC pada laman aacc-asia.org.



Keterangan: Kalender Kegiatan AACC 2024

Pada awal tahun 2024 telah ditetapkan bahwa target kinerja untuk pemutakhiran laman aacc-asia.org adalah berupa laporan semester, sehingga pengukuran efektivitas Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif melalui kegiatan pemutakhiran website aacc-asia.org adalah sebagai berikut.

$$\% \text{ kegiatan pemutakhiran} = \frac{\text{Jumlah Laporan Kegiatan pemutakhiran}}{\text{Jumlah target Laporan pemutakhiran}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil yaitu:

2 laporan semester

$$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

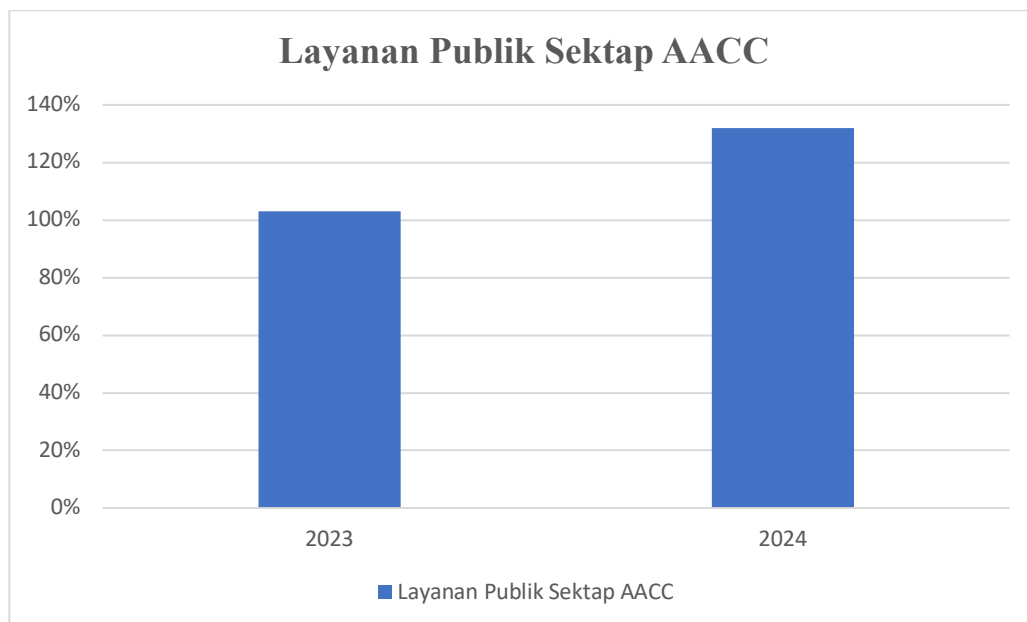
2 target laporan semester

Dengan target kinerja sebesar 94%, maka capaian kinerja efektivitas Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC melalui kegiatan pemutakhiran laman aacc-asia.org adalah 106%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.

Dengan demikian, capaian kinerja dari keempat indikator yang berkaitan dengan Layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang Efektif adalah sebagai berikut:

$$(100\%+200\%+100\%+100\%) : 4 = 125\% : 94\% = 132\%$$

Dengan capaian kinerja sebesar 132% pada tahun 2024, maka capaian kinerja layanan Publik Kegiatan Sektap AACC yang efektif dinyatakan meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023 sebesar 103%. Capaian kinerja sebesar 132% untuk Layanan publik Kegiatan Sektap AACC tersebut tercapai karena terdapat capaian kinerja sebesar 200% pada salah satu indikatornya, yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Internasional dalam Lingkup AACC. Capaian kinerja yang melebihi target yang sangat signifikan tersebut terjadi karena pemberian mandat internasional dari MK Thailand sebagai Presiden AACC untuk menyelenggarakan Meeting of Secretaries General pada bulan September 2024, sehingga terdapat 2 (dua) kegiatan internasional dalam lingkup AACC yang dilakukan oleh Sektap AACC di tahun 2024, atau bertambah 1 (satu) kegiatan internasional dari rencana sebelumnya yang telah dipersiapkan serta disetujui melalui DIPA Mahkamah Konstitusi TA 2024, yaitu hanya sebanyak 1 (satu) penyelenggaraan kegiatan internasional dalam lingkup AACC.



Keterangan: Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Layanan Publik
Sekretariat Tetap AACC 2023 dan 2024

4. Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan semakin pentingnya upaya penyediaan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat, sejak beberapa tahun terakhir Mahkamah Konstitusi tidak lagi menerbitkan majalah dalam bentuk *hard copy*.

Majalah Konstitusi telah diterbitkan hanya dalam bentuk digital dan diunggah dalam bentuk Majalah elektronik, sementara versi Bahasa Inggris-nya dimuat di website en.mkri.id.

Majalah elektronik adalah merupakan salah satu solusi kemudahan untuk membaca majalah dimanapun dan kapanpun karena pembaca hanya memerlukan akses internet dan gawai untuk dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari majalah elektronik tersebut.

Digitalisasi bahan publikasi di Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk Majalah Konstitusi saja, namun juga dilakukan untuk hampir seluruh bahan publikasi yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi (Majalah Konstitusi, Jurnal dan Laporan Tahunan). Namun demikian, pengukuran capaian kinerja atas penyediaan digitalisasi bahan publikasi dan informasi Mahkamah Konstitusi yang menjadi tanggung jawab Biro Humas dan Protokol adalah yang terkait dengan penerbitan Majalah Konstitusi (versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi.

Pengukuran capaian kinerja atas layanan publik penyediaan digitalisasi bahan publikasi MK dilakukan dengan antara target yang ditetapkan pada awal tahun (Majalah bulanan) dengan edisi Majalah Konstitusi yang diunggah versi digitalnya di laman mkri.id.

Dengan rumus sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Majalah dalam laman mkri.id}}{12 \text{ bulan}} \times 100\%$$

$$\frac{12 \text{ Majalah telah diupload pada laman mkri.id}}{12 \text{ bulan}} \times 100\% = 100\%$$

Terhadap hasil penghitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK adalah 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja TA 2024.

Jika dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, maka Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK secara stabil dapat mencapai target yang ditetapkan melalui penerbitan majalah secara reguler selama 12 bulan di mana setiap bulannya diterbitkan 1 edisi majalah pada Tahun 2024. Capaian yang konsisten terkait Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK berupa majalah digital dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK Berupa Majalah
Tahun 2021 - 2024**

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Rencana Penerbitan	12	12	12	12
Jumlah Majalah Terbit	12	12	12	12

Selanjutnya, pada indikator Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK berupa penerbitan majalah yang saat ini berbentuk digital terdapat beberapa analisa yang mencakup aspek ketercapaian, keberhasilan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, faktor pendukung maupun hambatan, serta solusi yang diusulkan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertama terkait dengan aspek ketercapaian dan keberhasilan, tim redaksi dan penulisan majalah di Bagian humas selama 4 tahun terakhir selalu berhasil mencapai target kinerja dan berhasil menerbitkan majalah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan setiap awal Tahun Anggaran termasuk TA 2024. Dari sisi kuantitas target capaian, Biro Humas dan Protokol berhasil menunjukkan capaian yang konsisten dalam meraih target penerbitan majalah sebanyak 12 terbitan sesuai penjelasan di atas.

Akan tetapi, keberhasilan dan capaian yang diraih tim redaksi dan penulis dari 4 Tahun terakhir tersebut tidak berjalan sebagaimana *business as usual*, upaya-upaya peningkatan baik dari sisi substansi dan kualitas penulisan, tema-

tema penulisan dalam majalah, diversifikasi topik termasuk penulisnya juga semakin diperluas untuk dapat mendukung peningkatan kualitas dari majalah konstitusi tersebut. Pada tahun 2024, konsolidasi tim dalam pembahasan majalah juga semakin diperkuat dengan ditingkatkannya kembali rapat pembahasan tim redaksi secara berkala yang membahas mulai dari rancangan penulisan (*outline*) sampai pada susunan outline dan substansi penulisan yang dimaksudkan agar majalah sebagai capaian output Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK dapat semakin informatif memenuhi kebutuhan para pencari informasi mengenai MK dan juga para pembaca majalah tersebut.

Disisi lain, Tahun 2024 merupakan Tahun politik di mana MK memiliki agenda persidangan khusus terkait dengan penyelesaian sengketa Pilpres, Pileg, dan PPHU Kada, kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi tim redaksi dalam mencapai kinerja Layanan Publik Penyediaan Digitalisasi Bahan Publikasi Informasi MK berupa penerbitan majalah. Waktu yang semakin sedikit dalam proses penyusunan sampai penerbitan serta tim yang sebagian tersebar di dalam Gugus Tugas Sengketa Pemilu merupakan salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh tim di Biro HP. Dari sisi kontributor penulis eksternal juga menghadapi tantangan yang signifikan dikarenakan beberapa kontributor penulis juga menjalankan tugas-tugas dalam Gugus Tugas Sengketa Pemilu.

Solusi dari beberapa tantangan tersebut dilakukan dengan manajemen waktu yang disiplin dan koordinasi secara cerdas antar anggota tim di tengah kesibukan sengketa Gugatan Pemilu di Tahun 2024. Dalam beberapa kesempatan, melaksanakan kerja secara lembur merupakan solusi yang diambil oleh rekan-rekan redaksi dan penulis untuk dapat mencapai kinerja penerbitan majalah setiap bulannya.

Tidak hanya dari sisi waktu, dalam konteks menelaah dan memverifikasi rancangan majalah yang telah disusun oleh penulis, tim redaksi juga harus menerapkan pembagian waktu dan tugas yang *agile* sehingga dapat memenuhi dua target program dalam waktu yang bersamaan yaitu tugas sebagai bagian dari tim redaksi dan tugas dalam gugus tugas sengketa pemilu 2024.

Hambatan lain juga muncul dari sisi pengelolaan honor para penulis yang terkadang terkendala penyelesaiannya karena administrasi keuangan yang harus

diproses dan dipenuhi persyaratannya. Menindaklanjuti hal ini, Biro HP secara responsif mempelajari aturan dan SOP pertanggungjawaban honor penulis terbaru dan melakukan koordinasi secara intensif agar hak-hak para penulis sesuai aturan yang berlaku dapat diberikan secara tepat waktu.

5. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik

Layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi Putusan MK di media massa adalah penyampaian Putusan MK melalui berbagai platform media sosial yang dimiliki oleh MK. Hal tersebut merupakan perwujudan visi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi salah satu lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Di era digitalisasi saat ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yaitu memanfaatkan platform digital sebagai sarana diseminasi Putusan Mahkamah.

Diseminasi Putusan MK di media elektronik adalah sosialisasi Putusan MK di berbagai platform digital termasuk media sosial MK. Seluruh Putusan MK selalu disampaikan kepada masyarakat secara langsung melalui fasilitas live youtube maupun streaming pada laman mkri.id.

Pada 2024, MK menangani 240 perkara pengujian undang-undang yang terdiri dari 51 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dan 189 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024, MK telah memutus sebanyak 158 perkara yang terdiri dari 49 perkara yang diregistrasi tahun 2023 dan 109 perkara yang diregistrasi tahun 2024. Jika dipilah berdasarkan amar, 158 putusan tersebut terdiri dari 18 putusan dikabulkan (11,4%); 77 putusan ditolak (48,7%); 31 putusan tidak dapat diterima (19,6%); 22 perkara ditarik kembali (13,9%); 8 perkara gugur (5,1%); dan 2 perkara dinyatakan bukan kewenangan MK (1,3%).

Seluruh Putusan perkara tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung melalui siaran streaming di website MK, streaming di kanal Youtube MK maupun melalui berita sidang yang dimuat di website MK, di Twitter dan Facebook Mahkamah Konstitusi. Rumus yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah informasi}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka persentase Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Putusan MK di Media Elektronik menjadi:

Putusan Pengujian Undang-Undang:

$$\frac{158}{158} \times 100\% = 100\%$$

Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum:

$$\frac{308}{308} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100% maka capaian kinerja untuk layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik telah tercapai yaitu sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian tiga tahun sebelumnya, maka layanan publik publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik terus mengalami peningkatan. Peningkatan layanan publik publikasi Putusan MK untuk perkara PUU dari tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Publikasi Putusan MK Untuk Perkara PUU Tahun 2021 - 2024

	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Putusan	99	124	136	158
Jumlah Publikasi	99	124	136	158

6. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik

Kegiatan publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan di luar persidangan yang dilakukan oleh Pimpinan MK dalam konteks melakukan sosialisasi mengenai proses penanganan perkara di MK maupun informasi mengenai kegiatan di luar persidangan yang diselenggarakan oleh MK dengan berbagai tujuan kegiatan kerja sama internasional, kerja sama dalam negeri, kegiatan Diskusi Literasi Konstitusi (Diksi), dan lain-lain.

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pembuatan berita yang dimuat di website mkri.id dan website en.mkri.id serta pembuatan infografis tentang kegiatan non sidang di media sosial MK. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders dapat memperoleh informasi mengenai

Mahkamah Konstitusi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah selain kegiatan penanganan perkara konstitusi.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 390 berita non persidangan yang dimuat di website dan berbagai media sosial MK. Dengan adanya keharusan untuk memberitakan seluruh kegiatan non sidang di berbagai platform media sosial MK, maka capaian kinerja untuk indikator penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah:

Rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Jumlah berita non sidang}}{\text{Jumlah kegiatan non sidang}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka persentase Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik menjadi:

$$\frac{390}{390} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka tingkat efektivitas penyebarluasan informasi MK di media elektronik telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Perbandingan Jumlah Kegiatan

Non Persidangan dan Berita Tahun 2022 - 2024

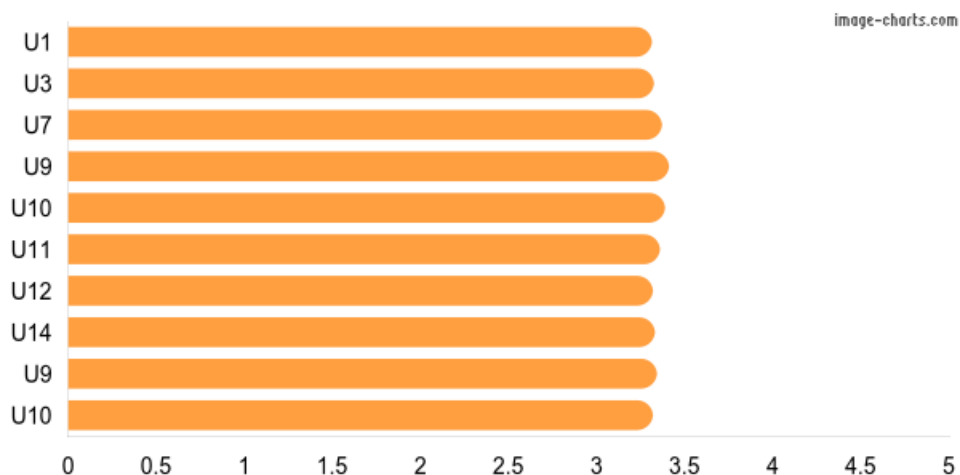
	2022	2023	2024
Jumlah Kegiatan	425	491	390
Jumlah Berita	425	491	390

7. Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan

Laporan Survei Indeks Layanan Administrasi Umum Tahun 2024 mengukur unsur-unsur pelayanan dari 9 (sembilan) unit kerja termasuk salah satunya adalah Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan Hasil Survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan Biro Humas dan Protokol mendapatkan nilai sebesar **3.349**, dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut:

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Persyaratan	3, 314	Baik
2	U3. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3, 326	Baik
3	U7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3, 371	Baik
4	U9. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3, 411	Baik
5	U10. Sarana dan Prasarana	3, 389	Baik
6	U11. Sarana dan Prasarana	3, 36	Baik
7	U12. Mekanisme	3, 32	Baik
8	U14. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3, 331	Baik
9	U9. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3, 343	Baik
10	U10. Persyaratan	3, 32	Baik
	Nilai Indeks	3, 349	Baik
	Nilai Konversi	83, 71	Baik

Selanjutnya dijelaskan bahwa Unsur yang dipakai dalam Survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat kualitas pelayanan pada Biro Humas dan Protokol. Adapun terkait dengan Nilai unsur Survei Tingkat Layanan Kehumasan dan Keprotokolan pada Biro Humas dan Protokol dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan hasil capaian yang tersaji dalam hasil survei Tingkat layanan Kehumasan dan Keprotokolan Tahun 2024, Biro Humas dan Protokol berhasil mencapai target nilai tingkat layanan tersebut dari target capaian sebesar 82, Biro Humas dan Protokol berhasil mencapai target nilai 83, 71 atau setara dengan 102%

(seratus dua persen). Dari indikator ini, kita dapat simpulkan bahwa target kinerja Biro Humas dan Protokol terkait dengan layanan kehumasan dan keprotokolan tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan dan berhasil melampaui juga target-target capaian pada 4 Tahun sebelumnya.

8. Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol

Realisasi Kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024 terkait dengan tingkat layanan tata usaha pimpinan dan protokol adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas penyebarluasan informasi perkara dan putusan MK dan layanan kehumasan dan Keprotokolan	Tingkat Layanan Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Skor 82	Skor 82,96	101,17%

Dari 5 unsur yang dijadikan sebagai dasar penilaian atas layanan administrasi umum TU Pimpinan dan Keprotokolan, secara umum diperoleh nilai BAIK, dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Indeks Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan

No	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Layanan
1.	Pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,31	Baik
2.	Pelayanan pengelolaan tamu pimpinan	3,31	Baik
3.	Pelayanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,322	Baik
4.	Pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,322	Baik
5.	Pelayanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,328	Baik
Nilai indeks		3,318	Baik
Nilai konversi		82,96	Baik

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari 5 (lima) unsur layanan, dapat teridentifikasi bahwa nilai tertinggi adalah pelayanan protokol dalam acara

resmi pimpinan, sementara nilai terendah adalah pada unsur pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan dan pengelolaan yang mendapatkan nilai indeks yang sama

Hal ini berbeda dengan hasil berbeda dengan hasil survei pada tahun 2023 di mana nilai tertingginya adalah pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara, sedangkan nilai terendahnya masih relatif sama yaitu pelayanan sekretaris dalam memberikan ketatausahaan pimpinan. Namun demikian semua unsur layanan (5 layanan) di tahun 2024 semua mendapatkan kenaikan nilai indeks, seperti tertuang dalam tabel di bawah.

**Perbandingan Nilai Indeks
Layanan Administrasi Umum TU Pimpinan dan Keprotokolan
Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Unsur	Tahun 2023	Tahun 2024
	Nilai Indeks	Nilai Indeks
Pelayanan sekretaris dalam memberikan dukungan ketatausahaan pimpinan	3,241	3,31
Pelayanan pengelolaan tamu pimpinan	3,253	3,31
Pelayanan protokol dalam perjalanan dinas pimpinan	3,272	3,322
Pelayanan protokol dalam kegiatan pimpinan di bandara	3,276	3,322
Pelayanan protokol dalam acara resmi pimpinan	3,276	3,328
Nilai indeks	3,264	3,318
Nilai konversi	81,6	82,96

Dari hasil survei tahun 2024 ada beberapa catatan dari responden agar tidak ada preferensi atau perlakuan khusus tertentu dalam memberikan layanan protokoler baik kepada rekan sejawat dan pimpinan, dan terus meningkatkan kompetensi dalam *service excellence* agar kualitas layanan semakin baik.

Dengan gambaran hasil survei 2024 maka capaian Tingkat Layanan Keprotokolan dan TU Pimpinan adalah

$$\frac{82,96}{82} \times 100\% = 101,17 \%$$

82

Kinerja TU Pimpinan dan Protokol adalah terkait kinerja TU Pimpinan dan Protokol dan kaitannya dengan dinamika kegiatan pimpinan baik kegiatan di persidangan maupun kegiatan lain di luar persidangan. Kegiatan pimpinan tersebut dikategorikan dalam 4 kegiatan pokok yaitu:

- a. Layanan pimpinan di bandara
- b. Layanan pimpinan dalam kegiatan dalam kota
- c. Layanan pimpinan dalam kegiatan di gedung MK
- d. Layanan pimpinan dalam kegiatan ke luar daerah
- e. Layanan protokol dalam kegiatan persidangan
- f. Layanan protokol kunjungan ke MK

Gambaran dari fluktuasi layanan protokol kepada pimpinan dapat digambarkan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel Layanan Protokol Kepada Pimpinan Tahun 2020 - 2024

Tahun	Layanan Bandara	Layanan Kegiatan Dalam Kota	Layanan Kegiatan Dalam Gedung MK	Layanan Kunjungan Pimpinan Ke Daerah
2020	154	152	140	153
2021	123	132	140	57
2022	526	152	48	149
2023	554	212	69	171
2024	492	183	768	135

Dari tabel di atas ada aktivitas layanan yang melonjak karena ada data yang ditambahkan dari kegiatan layanan keprotokolan di dalam gedung yaitu layanan keprotokolan kunjungan dari beberapa lembaga pendidikan baik dari

berbagai kampus, SMA, dan beberapa jenjang pendidikan lain serta beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya sebanyak 55 kegiatan. Selain itu peran layanan tata usaha pimpinan dan protokol juga dilakukan pada kegiatan persidangan di Mahkamah Konstitusi yang sepanjang tahun 2024 sebanyak 625 kali kegiatan.

PERBANDINGAN LAPORAN PELAYANAN PROTOKOL TAHUN 2023

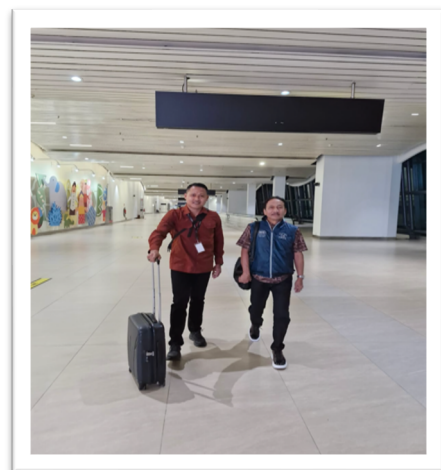
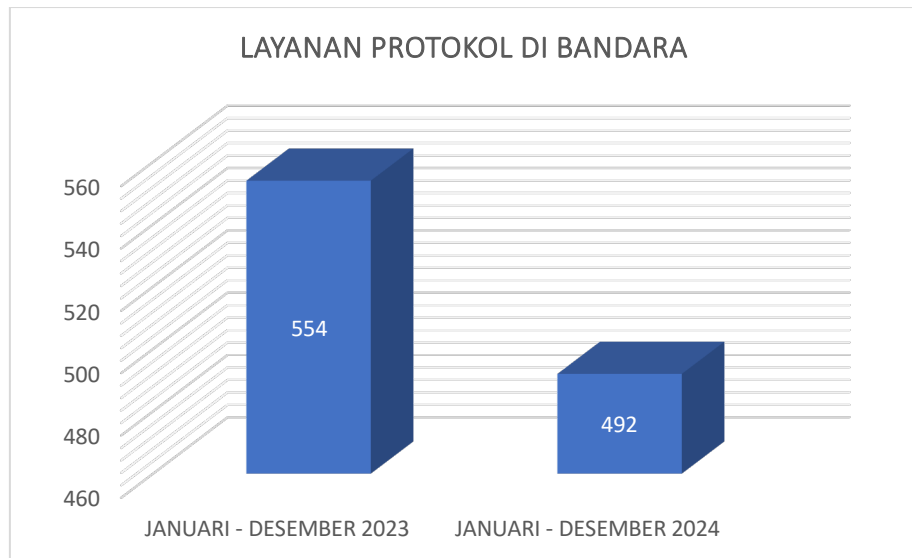
NO	KEGIATAN	BULAN												TOTAL KEGIATAN Januari s/d Desember		KET		
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES					
1	Layanan Pimpinan Kegiatan Lokal																	
	a Pelayanan Bandara	24	47	55	11	46	33	50	30	53	66	39	47	554	Keg			
	b Pelayanan Kegiatan Dalam Kota	15	23	19	4	13	11	19	28	28	18	17	17	212	Keg			
	c Pelayanan Kegiatan Gedung MK	8	4	5	2	9	10	2	5	4	8	7	5	69	Keg			
2	Layanan Pimpinan Kegiatan Luar Kota/Daerah	5	15	19	5	15	0	20	11	20	27	20	14	171	Keg	Juni-Juli: Libur bulan Ramadhan Desember : Moratorium renovasi Gd.		
3	Layanan Protokol Kunjungan di MK	5	10	4	0	8	0	9	5	6	13	11	0	71	Keg			
4	Layanan Protokol Persidangan di MK	3	35	31	18	45	0	44	35	54	72	63	48	448	Keg			
JUMLAH KEGIATAN PER BULAN		60	134	133	40	136	54	144	114	165	204	157	131	1.525	Keg			

LAPORAN PELAYANAN PROTOKOL TAHUN 2024

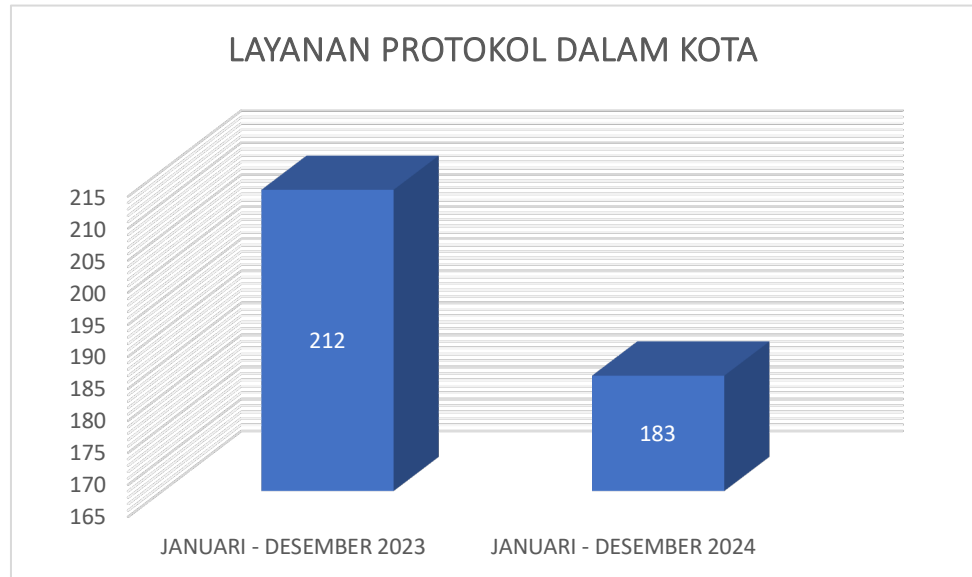
NO	KEGIATAN	BULAN												TOTAL KEGIATAN Januari s/d Desember		KET	
		JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DES				
1	Layanan Pimpinan Kegiatan Lokal																
	a Pelayan Bandara	42	35	44	25	33	42	42	51	49	50	41	38	492	Keg		
	b Pelayan Kegiatan Dalam Kota	15	18	10	10	10	12	18	22	21	23	22	26	183	Keg		
	c Pelayan Kegiatan Gedung MK	13	14	7	9	5	1	6	6	6	9	7	5	88	Keg		
2	Layanan Pimpinan Kegiatan Luar Kota/Daerah	11	15	13	2	9	5	9	16	16	23	11	5	135	Keg		
3	Layanan Protokol Kunjungan di MK	3	1	1	0	1	1	9	5	11	7	16	0	55	Keg	April – Mei Sidang Pilpres dan Pileg	
4	Layanan Protokol Persidangan di MK	56	79	51	0	0	0	104	98	62	88	59	56	625	Keg		
JUMLAH KEGIATAN PER BULAN		140	134	126	46	58	61	188	198	165	200	156	106	1.578	Keg		

Berdasarkan tabel perbandingan di atas maka dapat diuraikan beberapa hal terkait dengan layanan tata usah pimpinan dan protokol sebagai berikut:

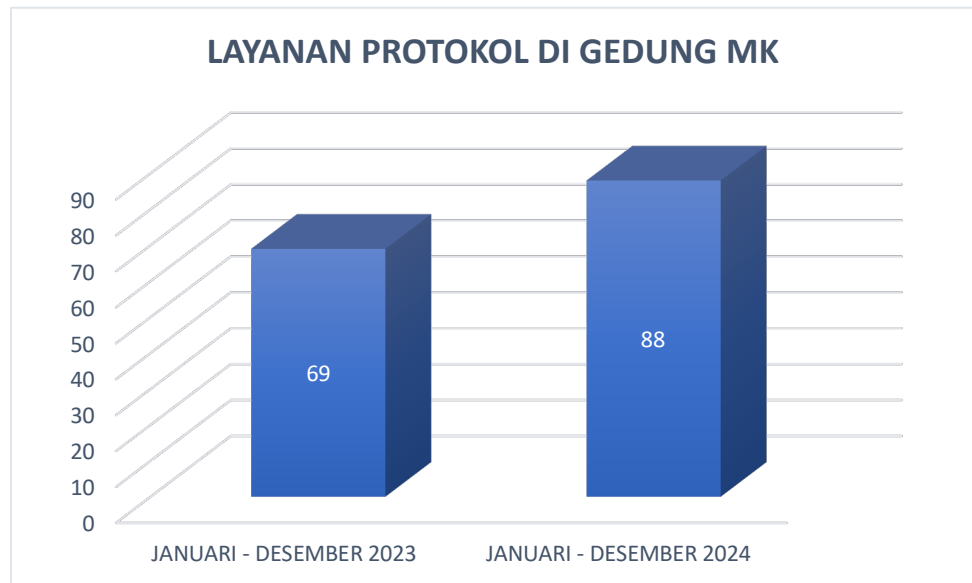
1. Layanan Protokol di bandara kepada Pimpinan pada tahun 2023 sebanyak 554 kali kegiatan sedangkan pada tahun 2024 ada penurunan, yaitu sebanyak 482 kali kegiatan, dikarenakan pada tahun 2024 pimpinan fokus pada persidangan PPHU Presiden / Pileg serta PPHU Kada di akhir tahun.



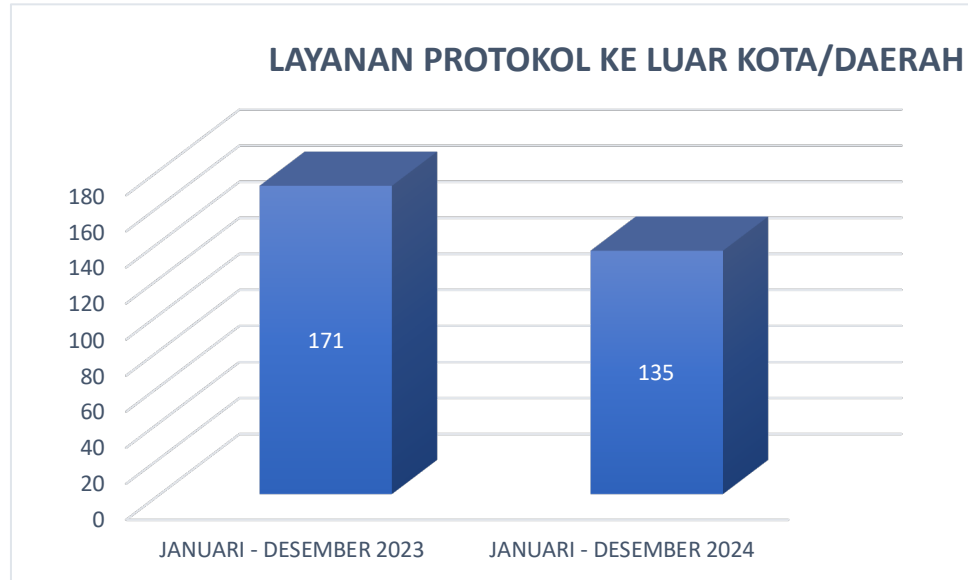
2. Layanan Protokol kepada Pimpinan kegiatan di Dalam Kota, meliputi kegiatan menghadiri undangan dari Pimpinan Lembaga/Kementerian, pada tahun 2023 sebanyak 212 kali kegiatan, sedangkan pada tahun 2024 hanya sebanyak 183 kali kegiatan.



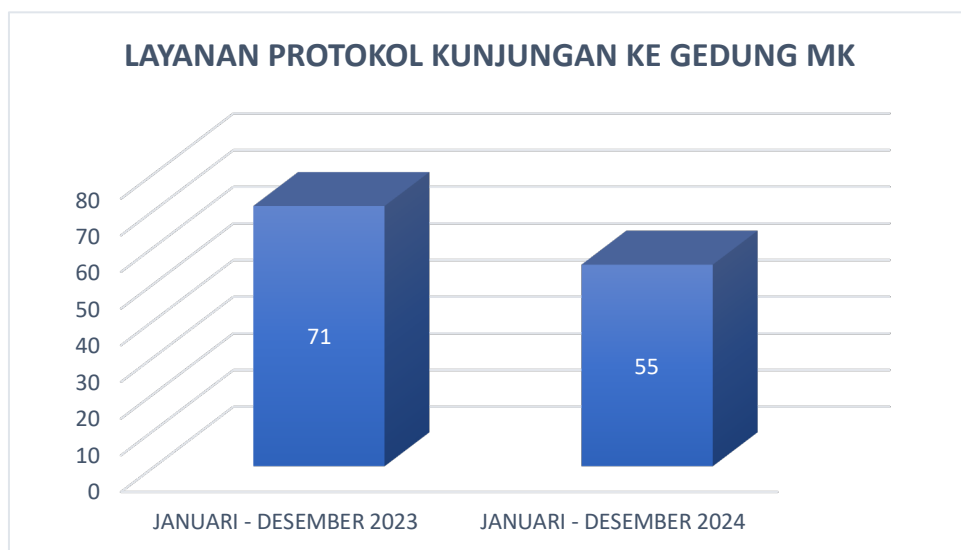
3. Layanan Protokol kegiatan di Gedung MK kepada pimpinan, meliputi kegiatan pertemuan Tamu pimpinan, pelantikan dan lainnya yang bersifat resmi, pada tahun 2023 sebanyak 69 kali kegiatan dan pada tahun 2024 sebanyak 88 kali kegiatan.



4. Layanan Protokol kegiatan di daerah/luar kota yang memerlukan pendampingan protokol kepada pimpinan pada tahun 2023 sebanyak 171 kali kegiatan dan pada tahun 2024 sebanyak 135 kali kegiatan.



- Layanan Protokol kegiatan kunjungan ke MK yang memerlukan pendampingan protokol, pada tahun 2023 sebanyak 71 kali kegiatan dan pada tahun 2024 sebanyak 55 kali kegiatan.



6. Layanan Protokol kegiatan persidangan di MK yang memerlukan pendampingan protokol, pada tahun 2023 sebanyak 448 kali kegiatan dan pada tahun 2024 sebanyak 625 kali kegiatan.





9. Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Penanganan Perkara MK di Media Elektronik

Kegiatan publikasi dan penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah merupakan kegiatan untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan persidangan baik sidang Pengujian Undang-Undang maupun Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang merupakan kewenangan MK. Berita persidangan merupakan bagian dari sosialisasi mengenai proses penanganan perkara di MK maupun peningkatan kesadaran berkonstitusi warga negara.

Penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui pembuatan berita yang dimuat di website mkri.id dan website en.mkri.id serta pembuatan infografis tentang putusan MK di media sosial. Dengan demikian diharapkan akan semakin banyak stakeholders dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan penanganan perkara konstitusi.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 1.703 berita sidang yang dimuat di website dan berbagai media sosial MK. Dengan adanya keharusan untuk memberitakan seluruh kegiatan sidang di berbagai platform media sosial MK, maka capaian kinerja untuk indikator penyebarluasan informasi MK di media elektronik adalah: Rumus yang digunakan:

$$\frac{\text{Jumlah berita sidang}}{\text{Jumlah sidang}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus di atas, maka persentase Layanan Publik Publikasi dan Penyebarluasan Informasi Mahkamah Konstitusi di Media Elektronik menjadi:

$$\frac{1.703}{1.703} \times 100\% = 100\%$$

Dengan target kinerja sebesar 100%, maka tingkat efektivitas penyebaran informasi MK di media elektronik telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel Perbandingan Jumlah Persidangan dan Berita Tahun 2022 - 2024

	2022	2023	2024
Jumlah Sidang	503	584	1.703
Jumlah Berita	503	584	1.703

10. Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media

Pada tahun 2024, Biro Humas dan Protokol kembali mengadakan layanan monitoring pemberitaan. Atas pertimbangan bahwa preferensi cara publik memperoleh informasi cenderung bergantung kepada media *online* dan media sosial, MK bekerja sama dengan PT Kazee Digital Indonesia yang memonitor dan menganalisis lebih banyak portal berita dan platform media sosial terkemuka, yaitu X, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok; dibandingkan dengan media konvensional yaitu media cetak dan televisi.

Pergerakan Data Mahkamah Konstitusi

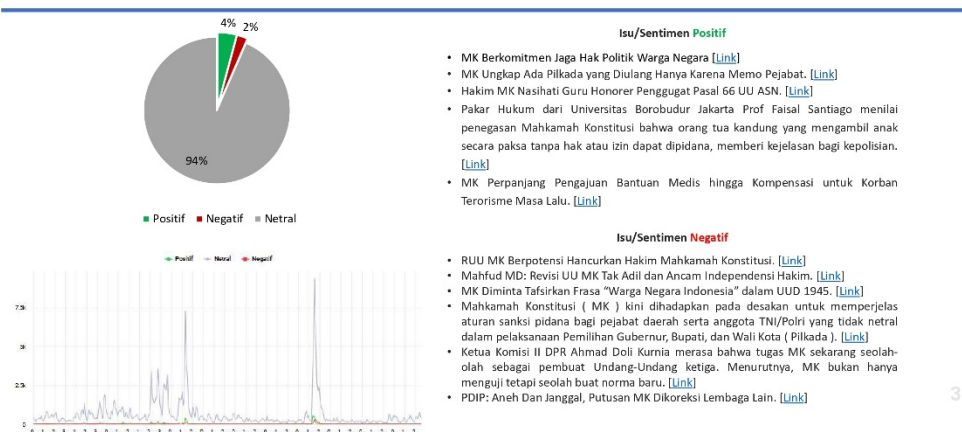


Pergerakan data pada sepanjang Desember 2023 s.d November 2024 terdapat 321.946 data, dimana puncak isu berada pada April dan Agustus 2024, isu pada puncak data diantaranya berkaitan dengan;

1. Uji materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan bahwa usia, jenis kelamin, atau etnis dalam kriteria tenaga kerja bukan diskriminasi. [\[Link\]](#)
2. Mahkamah Konstitusi (MK) menerima kembali sejumlah gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pileg 2024 dari beberapa partai politik. [\[Link\]](#)
3. MK dalam sidang pilpres 2024, 22 April 2024 telah memutuskan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan. Kendati demikian, tiga hakim konstitusi--Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih--memberikan dissenting opinion. [\[Link\]](#)

Sentimen Media Massa

Salah satu isu negatif yang muncul ialah perihal Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia merasa bahwa tugas MK sekarang seolah-olah sebagai pembuat Undang-Undang ketiga. Menurutnya, MK bukan hanya menguji tetapi seolah buat norma baru.



Untuk mengukur capaian kinerja terkait dengan indikator Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media Tahun 2024, berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan pada bab perencanaan, Biro HP menetapkan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Analisis Berita dari Teknologi Media Monitoring}}{\text{Jumlah Pemberitaan MK di Media}} \times 100\% = \text{Capaian Kinerja (\%)}$$

Adapun hasil yang dicapai oleh Biro HP berdasarkan rumusan perhitungan capaian kinerja indikator Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media Tahun 2024 menjadi:

$$\frac{321.946}{321.946} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Biro HP telah mencapai target keberhasilan kinerja 100% di mana terdapat jumlah analisis berita sebanyak 321.946 yang dihasilkan dari teknologi Media Monitoring yang bekerja sama dengan PT.Kazee Digital Indonesia yang memonitor dan menganalisis portal berita dan platform media sosial utama seperti, X, YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok; termasuk media konvensional yaitu media cetak dan televisi. Kemudian dari total analisis berita tersebut dibagi pembilang dalam bentuk jumlah pemberitaan MK di media-media yang dimonitoring tersebut. Sehingga berdasarkan perhitungan rumusan dimaksud, Biro HP berhasil mencapai target kinerja 100%.

Selanjutnya, pada indikator Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media Tahun 2024 berupa hasil analisis berita dan pemberitaan pada media elektronik dan cetak yang bekerja sama dengan PT. Kazeo, terdapat beberapa analisa yang mencakup aspek ketercapaian, keberhasilan, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja, faktor pendukung maupun hambatan, serta solusi yang diusulkan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pertama terkait dengan aspek ketercapaian dan keberhasilan, tim Biro HP mulai dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 atau selama 6 tahun terakhir selalu berhasil mencapai target kinerja 100% dalam indikator Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media dan berhasil menyajikan analisis pemberitaan MK di Media sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan setiap awal Tahun Anggaran termasuk TA 2024. Dari sisi kuantitas target capaian, Biro Humas dan Protokol berhasil menunjukkan capaian yang konsisten dalam meraih target analisis pemberitaan MK di media yang pada Tahun 2024 sebanyak sebanyak 321.946 (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam) analisis pemberitaan MK yang bersumber dari berbagai media tersebut .

Akan tetapi, keberhasilan dan capaian yang diraih tim Biro HP selama 6 tahun tersebut tidak berjalan sebagaimana *business as usual*, upaya-upaya peningkatan baik dari sisi substansi dan kualitas analisa dan keakuratan analisa pemberitaan MK juga semakin dipertajam untuk dapat mendukung peningkatan kualitas dari analisa pemberitaan tersebut. Pada tahun 2024, konsolidasi tim dalam pembahasan analisis berita juga semakin diperkuat dengan ditingkatkannya kembali rapat pembahasan tim monitoring pemberitaan secara berkala yang membahas mulai dari rencana pemantauan berita sampai pada kualitas dan keakuratan analisa yang dimaksudkan agar analisis-analisis berita yang disajikan sebagai capaian output indikator Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media dapat semakin berkontribusi terhadap penetapan strategi kehumasan MK, manajemen krisis komunikasi, dan semakin informatif memenuhi

kebutuhan pimpinan dan pihak internal MK yang berkepentingan terhadap analisis pemberitaan MK dimaksud.

Di sisi lain, tahun 2024 merupakan tahun politik di mana MK memiliki agenda persidangan khusus terkait dengan penyelesaian sengketa Pilpres, Pileg, dan PPHU Kada, kondisi ini tentu menjadi tantangan bagi tim Biro HP dalam mencapai kinerja Layanan Publik Monitoring Pemberitaan MK di Media berupa hasil analisis pemberitaan. Selanjutnya, ketersediaan waktu yang semakin sedikit dalam proses koordinasi dengan PT.Kazee dan proses verifikasi hasil analisis berita serta tim yang sebagian tersebar di dalam Gugus Tugas Sengketa Pemilu merupakan salah satu hambatan yang harus dihadapi oleh tim di Biro HP. Dari sisi jumlah berita yang semakin tinggi terkait MK di masa Pemilu 2024, variasi pemberitaan yang dikelola oleh PT. Kazee sebagai mitra MK dalam monitoring pemberitaan MK juga menghadapi tantangan yang signifikan dikarenakan beberapa berita membutuhkan analisa yang membutuhkan waktu untuk dapat diberikan kesimpulan analisisnya.

Solusi dari beberapa tantangan tersebut dilakukan dengan manajemen waktu yang disiplin dan koordinasi secara cerdas antar tim Biro HP dengan PT.Kazee di tengah kesibukan sengketa Gugatan Pemilu di Tahun 2024. Dalam beberapa kesempatan, melaksanakan kerja secara lembur merupakan solusi yang diambil oleh rekan-rekan monitoring pemberitaan untuk dapat mencapai kinerja monitoring dan analisis pemberitaan yang harus di siapkan dan dibagikan setiap hari kepada Pimpinan dan Internal MK terkait.

Tidak hanya dari sisi waktu, dalam konteks menelaah dan memverifikasi rancangan analisis pemberitaan, tim Biro HP juga harus menerapkan pembagian waktu dan tugas yang *agile* sehingga dapat memenuhi dua target program dalam waktu yang bersamaan yaitu tugas sebagai bagian dari tim monitoring dan analisis pemberitaan MK dan tugas dalam gugus tugas sengketa pemilu 2024.

Hambatan lain juga muncul dari sisi penyelesaian pertanggung jawaban kontrak pekerjaan antara MK dan PT. Kazee juga menjadi

tantangan tersendiri. Proses penyelesaian administrasi keuangan terkadang terkendala penyelesaiannya karena adanya penyesuaian administrasi keuangan yang harus dipenuhi oleh PPK dan tim PPK IV Biro HP. Menindaklanjuti hal ini, Biro HP secara responsif mempelajari aturan dan SOP pertanggung jawaban dan pembayaran kontrak media monitoring Tahun 2024 dan berupaya melakukan koordinasi secara intensif agar proses kontrak dan pembayarannya sesuai aturan yang berlaku dapat diberikan secara tepat waktu.

11. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik MK

Biro Humas dan Protokol berupaya secara serius membenahi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Meskipun MK terus meraih kualifikasi tertinggi, Biro Humas dan Protokol masih menemukan ruang untuk pengembangan (*room for improvement*). Untuk itu, telah dilaksanakan dua kegiatan strategis pada tahun 2024, yaitu Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK dan Pembangunan Laman PPID MK.

11.1. Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK

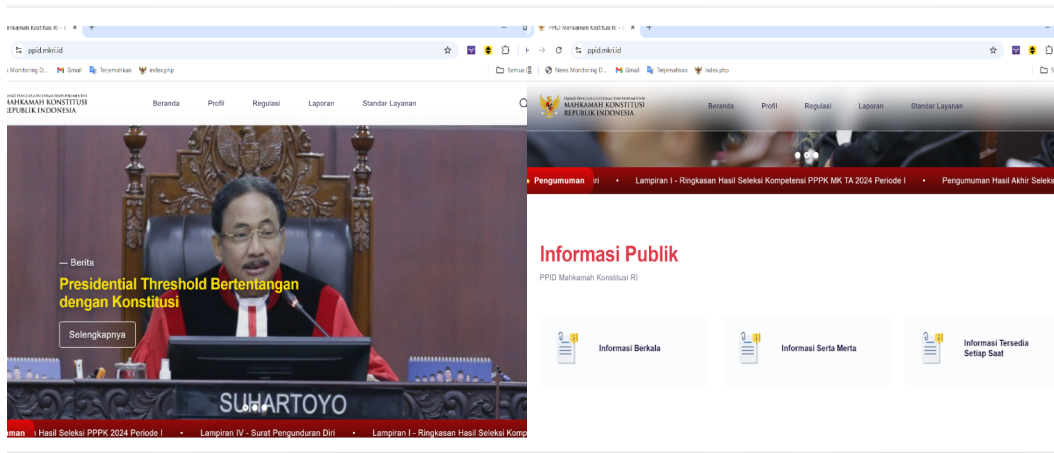
Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK merupakan kegiatan yang diinisiasikan Biro Humas dan Protokol guna menyosialisasikan peran lintas unit dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi lembaga. Kegiatan ini diselenggarakan pada 1 Oktober 2024 di Gedung I MK, usai MK mengadakan penandatanganan nota kesepahaman antara MK dan KI Pusat. Momen ini menjadi awal dari peningkatan koordinasi antarunit internal lembaga dalam mengelola dokumen dan informasi publik sesuai dengan UU KIP dan PerKI SLIP, di mana Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn mengimbau para peserta untuk memahami UU KIP termasuk jenis-jenis informasi yang diatur dalam PerKI SLIP. Komisioner Rospita juga membahas realisasi MK pada Monev KIP tahun 2023 serta menekankan pentingnya peran serta unit kerja di luar *leading sector* untuk mendukung peningkatan realisasi pada Monev KIP tahun 2024.



Keterangan: Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn (kiri) dihadirkan sebagai narasumber pada kegiatan Evaluasi Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Publik MK

11.2. Pembangunan Laman PPID MK

Untuk meningkatkan fungsi “mengumumkan informasi” dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, Biro Humas dan Protokol telah membangun Laman PPID MK yang kini telah dapat diakses oleh publik melalui ppid.mkri.id. Pembangunan laman sepenuhnya didukung oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MK. Substansi dari laman tersebut merupakan dokumen publik yang diperoleh dari seluruh unit terkait, salah satunya Biro Umum selaku *leading sector* pengadaan barang dan jasa, dan dikurasi berdasarkan jenis-jenis informasi yang diatur dalam PerKI SLIP.



Keterangan: Beranda Laman PPID, Kanan: Akses menuju Informasi Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Tersedia Setiap Saat MK pada Laman PPID

Dua langkah strategis ini sangat mendukung keikutsertaan lembaga dalam Monev KIP 2024. Oleh karena itu, MK kembali meraih kualifikasi “Informatif” pada **tahun 2024 dengan nilai 93,69, atau naik dari sebelumnya 90,24** di tahun 2023. Atas realisasi tersebut, capaian kinerja MK dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut.

$$\frac{93,69}{90} \times 100\% = 104,1\%$$

Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023, capaian kinerja MK dalam indikator yang sama yaitu:

$$\frac{93,69}{90,24} \times 100\% = 103,8\%$$

12. Indeks Aksesibilitas Penanganan Perkara

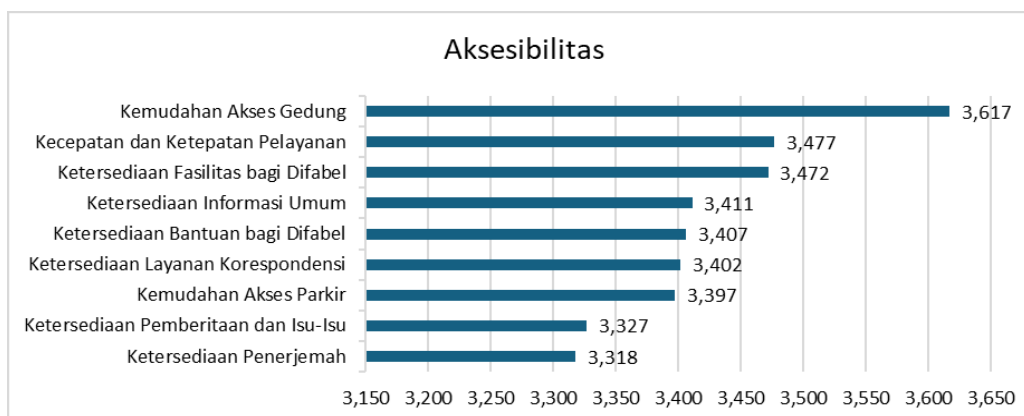
Salah satu tujuan dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi 2024, yakni untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Aksesibilitas. Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran. Hasil penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Aksesibilitas di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mempunyai kategori **BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,425** atau konversi IKM sebesar **85,631**. Adapun

target Indeks Aksesibilitas di tahun 2024 adalah 78, sehingga Biro Humas dan Protokol telah melampaui target mencapai skor 85,631 atau 109%.

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut ini dijabarkan secara terperinci unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam Indeks Aksesibilitas di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Kemudahan Akses Gedung	3,617	Sangat Baik
2.	Kemudahan Akses Parkir	3,397	Baik
3.	Ketersediaan Fasilitas bagi Difabel	3,472	Baik
4.	Ketersediaan Layanan Korespondensi	3,402	Baik
5.	Ketersediaan Penerjemah	3,318	Baik
6.	Ketersediaan Bantuan bagi Difabel	3,407	Baik
7.	Kecepatan dan Ketepatan Pelayanan	3,477	Baik
8.	Ketersediaan Pemberitaan dan Isu-Isu	3,327	Baik
9.	Ketersediaan Informasi Umum	3,411	Baik
IKM		3,425	Baik
Nilai Konversi		85,631	Baik



Berdasarkan data yang tersaji pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur layanan berkategori baik, dan 1 (satu) unsur layanan berkategori sangat baik. Sedangkan data yang tersaji pada Gambar di atas, dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kemudahan Akses Gedung, dan unsur terendah yakni Ketersediaan Penerjemah. Demikian capaian Indeks Aksesibilitas di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 yang menjadi salah satu ukuran capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024.

Indikator Indeks Aksesibilitas ini merupakan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan.

13. Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

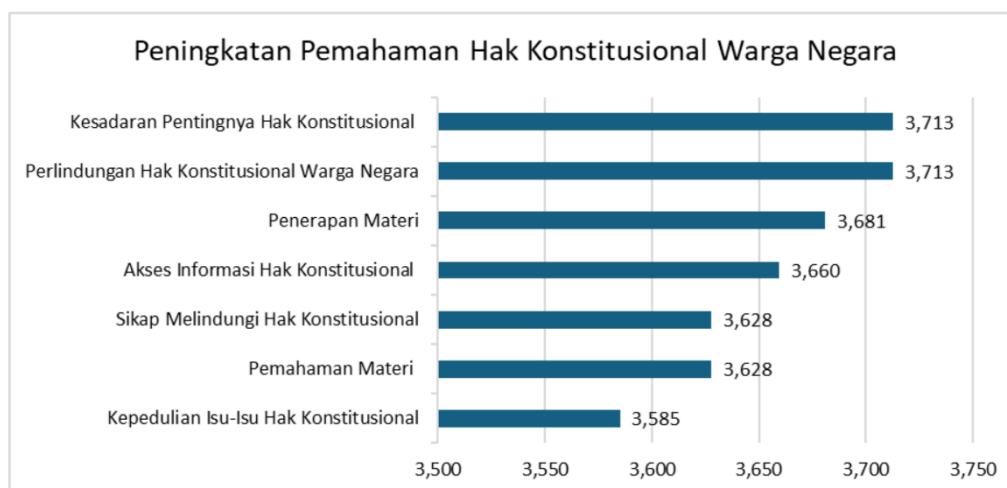
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dilaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mahkamah Konstitusi 2024 yakni salah satunya untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu langkah yang tepat untuk mengakomodasi harapan penerima pelayanan Mahkamah Konstitusi, menilai tingkat kepuasan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program Mahkamah Konstitusi yang efektif dan tepat sasaran. Adapun hasil penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu

dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah **3,658** atau konversi IKM sebesar **91,451**. Adapun target Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di tahun 2024 yakni skor 76, sehingga Biro Humas dan Protokol telah melampaui target dengan capaian skor 91,451 atau realisasi 120%.

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuesioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan. Dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik, pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya prosedur pelayanan dipahami oleh masyarakat, dan kecepatan pelayanan. Kedua adalah indikator yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Berikut ini dijabarkan secara terperinci unsur-unsur yang menjadi penilaian dalam Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

No.	Unsur	Nilai Indeks	Kualitas Pelayanan
1.	Akses Informasi Hak Konstitusional	3,660	Sangat Baik
2.	Pemahaman Materi	3,628	Sangat Baik
3.	Penerapan Materi	3,681	Sangat Baik
4.	Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara	3,713	Sangat Baik
5.	Sikap Melindungi Hak Konstitusional	3,628	Sangat Baik
6.	Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional	3,585	Sangat Baik
7.	Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional	3,713	Sangat Baik
IKM		3,658	Sangat Baik
Nilai Konversi		91,451	Sangat Baik



Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa 7 (tujuh) unsur layanan berkategori sangat baik. Sedangkan dari Gambar yang tersaji dapat diidentifikasi nilai unsur tertinggi dan nilai unsur terendah. Nilai unsur tertinggi yakni Kesadaran Pentingnya Hak Konstitusional dan nilai unsur terendah yakni Kepedulian Isu-Isu Hak Konstitusional. Demikian capaian Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara di Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2024 yang menjadi salah satu ukuran capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024.

Indikator Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara ini juga merupakan merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga belum ada nilai capaian indeks tersebut di tahun-tahun sebelumnya sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan.

14. Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seluruh unit kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwajibkan untuk melakukan penginputan TKDN periode s.d. bulan Desember 2024 pada Aplikasi SAKTI.

Berdasarkan Aplikasi SAKTI per tanggal 28 Desember 2024, persentase TKDN atas penginputan P3DN PPK I s.d. PPK VII bulan Desember adalah sebagai berikut.

No.	PPK	Total Nilai Rupiah TKDN	Total Nilai Dokumen	% TKDN
1	PPK I	3.496.956.270	3.497.747.700	99,98%
2	PPK II	412.288.548	433.509.514	95,10%
3	PPK III	14.071.163.987	14.287.909.887	98,48%
4	PPK IV	1.680.516.356	1.682.153.004	99,90%
5	PPK V	7.186.735.581	8.651.668.691	83,07%
6	PPK VI	457.791.344	489.233.903	93,57%
7	PPK VII	2.012.629.326	2.198.165.723	91,56%
8	PPK VIII	657.769.177	759.329.970	86,62%
TOTAL		29.975.850.589	31.999.718.392	93,68%

Dari rincian tersebut, diperoleh %TKDN Biro Hubungan Masyarakat dan protokol hingga bulan Desember 2024 adalah sebesar **99,9%** (Nilai Rupiah TKDN sebesar Rp.1.680.516.356,- dengan Nilai Dokumen Rupiah sebesar Rp.1.682.153.004,-).

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terus berupaya melakukan monitoring dan evaluasi per bulan terhadap prioritas belanja produk dengan TKDN sebesar 100%. Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai 79	Nilai 99,9%	126,46%

Capaian Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai TKDN Biro HP}}{\text{Target Nilai TKDN Biro HP}} \times 100\%$$

Adapun realisasi penghitungan Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

$$\frac{99,9}{79} \times 100\% = 126,46\%$$

Indikator Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Di aplikasi SAKTI Kemenkeu, tahun 2024 ini merupakan tahun pertama seluruh Pejabat Pembuat Komitmen wajib melakukan penginputan TKDN. Selain dari aplikasi SAKTI Kemenkeu, realisasi TKDN seluruh unit kerja juga dikeluarkan oleh KemenPANRB dengan dukungan data dari LKPP. Namun sampai dengan disusunnya laporan ini, capaian realisasi TKDN dari KemenPANRB tahun 2024 belum dikeluarkan.

Untuk ke depannya berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK untuk pengelolaan penggunaan produk dalam negeri antara lain:

- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol akan mengikuti *roadmap* yang akan disusun oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi acuan.
- Biro Hubungan Mahkamah Konstitusi secara aktif mendukung pengadaan berbasis elektronik melalui e-Purchasing, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

15. Indeks ASN BerAKHLAK

Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai core values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. Employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” sebagai wujud nyata dari strategi penguatan budaya kerja lewat transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) dan semangat melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang ASN. Untuk mendukung keterlaksanaannya di tataran kerja di lapangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 tahun 2021 sebagai landasan hukum dan

pedoman pengimplementasiannya bagi setiap komponen ASN baik instansi pemerintah di tingkat kementerian, lembaga maupun instansi daerah.

KemenPANRB pada tahun 2024 menargetkan penguatan budaya BerAKHLAK dan merumuskan langkah strategis upaya pencapaian tersebut ke dalam sepuluh (10) langkah yang dilakukan secara bertahap di tahun 2022 melalui (1) Penguatan komitmen lewat penyelenggaraan forum pimpinan, (2) Penyelarasan sistem yang dimulai lewat Sosialisasi Sistem Penilaian Individu Core Values BerAKHLAK dalam SKP berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, (3) Perubahan individu yang dihasilkan lewat pelatihan Internalisasi Ber-AKHLAK, (4) Pemetaan Budaya yang dicapai lewat sosialisasi dan partisipasi pengisian pengukuran kesehatan budaya organisasi/indeks BerAKHLAK, Employee Engagement & Employer Branding, (5) Penentuan Agenda Perubahan dalam penyusunan roadmap, rencana aksi program aktivitas budaya dan anggaran biaya, (6) Pengelolaan Agen Perubahan lewat aktivitas tim agen perubahan, (7) Eksekusi rencana aksi dalam sosialisasi roadmap, rencana aksi, simbol/artefak ke setiap ASN di instansi pemerintah, (8) Kampanye berkelanjutan lewat perancangan media dan materi serta implementasi komunikasi BerAKHLAK, (9) Monitoring dan Evaluasi berkala dalam forum komunikasi berkala tim agen perubahan serta pelaporan program sosialisasi, internalisasi, dan aktivitas budaya BerAKHLAK, dan (10) Penghargaan melalui penganugerahan penghargaan atas pencapaian Indeks Budaya BerAKHLAK.

Isi *Core Values* (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang harus dipahami dan diinternalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai. Dalam rangka pengukuran Core Values ASN BerAKHLAK di MK, terdapat 7 (tujuh) Core Values (Nilai-nilai Dasar) ASN BerAKHLAK yang telah dilaksanakan, yaitu: (1) Berorientasi Pelayanan; (2) Akuntabel; (3) Kompeten; (4) Harmonis; (5) Loyal; (6) Adaptif; dan (7) Kolaboratif.

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, diperoleh Indeks BerAKHLAK MK tahun 2024 yaitu sebesar 81,6% (Sehat), dengan perhitungan Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot (%)	Hasil	Formulasi
1	Hasil Survei BerAKHLAK	80	84.0%	67.2%
2	Hasil Evaluasi Organisasi	20	23/32	14.4%
Indeks BerAKHLAK				81.6%
Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional				68.1%

Nilai “Sehat” yang diperoleh MK berdasarkan pada Kategori Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

Predikat	Kategori	Range Indeks	Deskripsi
A	Sehat	75% - 100%	Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut
B	Cukup Sehat	50% - 74,9%	Pegawai sudah mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik
C	Tidak Sehat	25% - 49,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari
D	Sangat Tidak Sehat	0% - 24,9%	Pegawai memiliki tingkat implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari

Capaian Indeks ASN BerAKHLAK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks ASN BerAKHLAK	Nilai 61	Nilai 81,6	133,7%

Sementara itu, capaian Indikator Indeks ASN BerAKHLAK diperoleh dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Nilai Indeks ASN BerAkhlaK}}{\text{Target Nilai Indeks ASN BerAkhlaK}} \times 100\%$$

$$\frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,7\%$$

Adapun realisasi penghitungan Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri sebagai berikut:

$$\frac{81,6}{61} \times 100\% = 133,7\%$$

Indikator Indeks ASN BerAKHLAK merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

16. Tingkat Kematangan Manajemen Risiko

Sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Unit Kerja Eselon II Tahun 2024 di Lingkungan Kepaniteraan

dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi nomor 11765/2900/PW.02/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang diterbitkan oleh Inspektorat, dijelaskan bahwa ruang lingkup evaluasi terbagi menjadi dua aspek utama, yang masing-masing berfokus pada penyelenggaraan manajemen risiko di unit kerja eselon II dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kematangan manajemen risiko. Penelaahan pertama akan menyoasar pada implementasi manajemen risiko yang dijalankan oleh unit kerja tersebut, guna menilai sejauh mana langkah-langkah pengelolaan risiko sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ada. Dengan penelaahan ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai peluang perbaikan dalam penerapan manajemen risiko yang lebih efektif.

Selanjutnya, evaluasi juga mencakup reuiu terhadap kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan utama untuk mencapai tingkat kematangan manajemen risiko yang telah ditetapkan. Dokumen-dokumen ini akan diperiksa secara mendalam untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi yang diperlukan sudah dipenuhi dengan tepat. Reuiu ini sangat penting karena kelengkapan dokumen merupakan elemen kunci dalam mewujudkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan standar yang berlaku dan memiliki landasan yang kuat untuk pengelolaan risiko yang berkelanjutan.

Metodologi evaluasi yang diterapkan dalam proses ini lebih menekankan pada penelaahan terhadap implementasi manajemen risiko yang dilakukan oleh unit kerja eselon II, berdasarkan penilaian pada Kertas Kerja Evaluasi yang telah disusun oleh Inspektorat. Kertas Kerja Evaluasi ini akan menjadi referensi utama dalam menilai bagaimana manajemen risiko diterapkan di lapangan. Selain itu, evaluasi juga akan mencakup reuiu terhadap kelengkapan dokumen yang diperlukan, untuk memastikan bahwa setiap unit kerja dapat memenuhi standar tingkat kematangan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Proses evaluasi ini dijadwalkan berlangsung selama lima hari kerja, dimulai dari tanggal 18 hingga 24 Desember 2024 dengan penugasan Surat Tugas Inspektur Nomor 122.1/2900/07/2024 yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2024. Dengan jadwal yang sudah ditentukan, evaluasi dilakukan dengan intensif dan terfokus pada pengumpulan data yang relevan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen yang mendukung.

Dalam hal pencapaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada seluruh unit kerja, Inspektorat telah melakukan evaluasi terhadap syarat minimal pencapaian Level 3 sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Komitmen Pemilik Risiko;
2. Dokumen Update Profil Risiko Unit Kerja disertai dengan RTP;
3. Dokumen Matriks Risiko Prioritas;
4. Laporan Implementasi Penyelenggaraan Manajemen Risiko Tahun 2024.

Adapun hasil pencapaian penyelesaian dokumen untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Surat Pernyataan Komitmen	Profil Risiko	Dokumen Risiko Prioritas	Laporan Implementasi MR TA 2024	Persentase Kelengkapan
1.	Biro Renkeu	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
2.	Biro SDMO	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
3.	Biro HAK	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
4.	Biro HP	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
5.	Biro Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
6.	Puslit	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
7.	Pustik	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
8.	Pusdik	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
9.	Inspektorat	Ada	Ada	Ada	Ada	100%

Sementara itu, hasil evaluasi kematangan manajemen risiko MK tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Skor Evaluasi	Level	Keterangan
1.	Biro Renkeu	18	3	Mencapai Target
2.	Biro SDMO	18	3	Mencapai Target
3.	Biro HAK	17	3	Mencapai Target
4.	Biro HP	17	3	Mencapai Target
5.	Biro Umum	17	3	Mencapai Target

6.	Puslit	16	3	Mencapai Target
7.	Pustik	16	3	Mencapai Target
8.	Pusdik	17	3	Mencapai Target
9.	Inspektorat	17	3	Mencapai Target

Oleh karenanya, dengan capaian Level 3 dan target juga di level 3, maka capaian kinerja kematangan manajemen risiko Biro Humas dan Protokol tahun 2024 adalah 100%.

17. Nilai Evaluasi SAKIP Biro Humas dan Protokol

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya utamanya pada Laporan Evaluasi nomor 6132/2900/PW.02/07/2024, tanggal 25 Juli 2024, dijelaskan bahwa Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan suatu proses yang menyeluruh dan mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi SAKIP dijalankan dalam suatu unit kerja. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pencapaian kinerja, dengan tujuan untuk memastikan bahwa unit kerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Pada tahap awal, evaluasi dimulai dengan penilaian terhadap perencanaan kinerja yang mencakup berbagai dokumen penting, seperti Rencana Strategis (Renstra) untuk perencanaan jangka menengah, serta Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk perencanaan jangka pendek. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perencanaan kinerja yang dibuat dapat saling terhubung dan mendukung tujuan yang ingin dicapai, serta dapat menghasilkan hasil yang berkelanjutan.

Adapun salah satu aspek utama dalam evaluasi AKIP adalah penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja. Perencanaan yang berkualitas sangat penting sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang optimal. Penilaian ini melihat sejauh mana perencanaan yang dibuat sesuai dengan visi dan misi instansi, serta memastikan bahwa perencanaan tersebut dapat berjalan secara efektif dalam jangka panjang maupun jangka pendek.

Selain itu, evaluasi AKIP juga mencakup penilaian terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Pengukuran kinerja yang baik akan memudahkan dalam menilai progres pencapaian tujuan, serta memberikan kesempatan untuk menyesuaikan strategi agar lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini memastikan bahwa unit kerja tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai kinerja yang maksimal.

Pelaporan kinerja juga menjadi bagian penting dalam evaluasi AKIP. Dalam hal ini, laporan yang disusun oleh unit kerja harus dapat menggambarkan dengan jelas pencapaian yang telah dicapai, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Selain itu, laporan tersebut juga harus mencakup langkah-langkah perbaikan yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Penilaian terhadap pelaporan ini penting untuk memberikan gambaran yang transparan mengenai kinerja yang telah tercapai.

Aspek lainnya yang dinilai dalam evaluasi AKIP adalah akuntabilitas kinerja internal. Penilaian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan efisien. Evaluasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, memudahkan identifikasi masalah, serta memastikan bahwa langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan tepat.

Terakhir, evaluasi AKIP juga mencakup penilaian terhadap capaian kinerja yang diukur melalui berbagai indikator, seperti output dan outcome. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang sejauh mana instansi pemerintah telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Secara keseluruhan, evaluasi AKIP memberikan wawasan yang komprehensif tentang pelaksanaan SAKIP, serta membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk mencapai hasil yang lebih optimal di masa mendatang.

Adapun dengan proses tersebut di atas, Biro Humas dan Protokol telah berhasil mendapatkan **nilai evaluasi 79,00 atau predikat BB (Sangat baik)**, di mana hal tersebut telah melebihi target yang dicanangkan yaitu berpredikat B (Baik).

Untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan capaian yang telah ditorehkan pada laporan tahun 2023, maka pada tahun 2024 ini Biro Humas dan Protokol berusaha untuk menerapkan beberapa hal yang juga merupakan rekomendasi Inspektorat dalam evaluasi terdahulu, yaitu:

Rangkuman komprehensif mengenai peningkatan kualitas pelaporan kinerja pada Biro Humas dan Protokol mencakup beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan, antara lain:

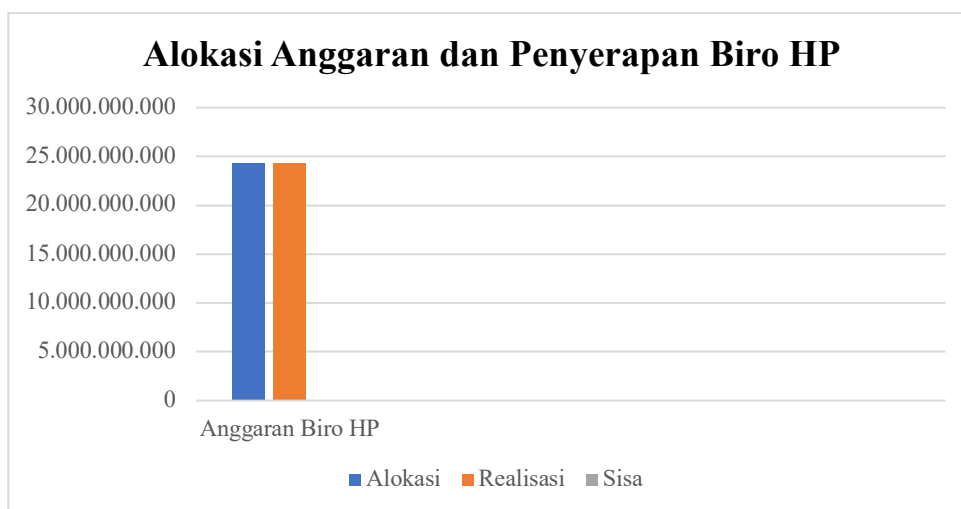
1. **Meningkatkan Kualitas Penulisan Laporan Kinerja** dengan cara memastikan keandalan dan akurasi data yang disajikan dalam laporan kinerja.
2. **Menjaga Konsistensi Indikator dan Target Kinerja** dengan memastikan keselarasan indikator dan target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis, SK Sekjen tentang IKU (Indikator Kinerja Utama), serta dokumen lainnya yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan dan pencapaian kinerja di semua tingkat organisasi.
3. **Menyusun Laporan Kinerja Berdasarkan Pedoman.** Laporan kinerja harus disusun dengan mematuhi Persekjen No. 38 Tahun 2022 yang mengatur sistematika penyusunan laporan, agar laporan yang dihasilkan lebih terstruktur dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. **Monitoring dan Dokumentasi Capaian Kinerja.** Melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja dan mendokumentasikan hasil monitoring tersebut dengan baik. Hal ini memungkinkan analisis lebih lanjut serta memberikan dasar untuk perbaikan atau penyesuaian strategi pencapaian kinerja di masa depan.
5. **Menindaklanjuti Evaluasi Akuntabilitas Kinerja** dan rekomendasi yang dilakukan pada tahun sebelumnya oleh Inspektorat, guna memperbaiki kelemahan dan meningkatkan efektivitas pelaporan dan pencapaian kinerja ke depannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, kami meyakini kualitas pelaporan kinerja pada Biro Humas dan Protokol akan meningkat dan semakin mendukung pengelolaan kinerja yang lebih baik.

18. Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu

Untuk tahun 2024, Biro Humas dan Protokol mengelola anggaran Mahkamah Konstitusi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen IV dengan anggaran yang dipercayakan sebesar Rp. 24.320.237.000 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.319.966.600 (Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah), atau setara dengan 100% penyerapan.

Adapun anggaran yang dikelola Biro Humas dan Protokol dapat digambarkan dalam diagram berikut:



Adapun dengan dana yang dipercayakan tersebut, Biro Humas dan Protokol juga dituntut untuk secara keseluruhan menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan dengan tepat waktu. Berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 355/2100/KU.03/01/2025, tanggal 17 Januari 2025, telah disampaikan capaian penyelesaian pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

No	UNIT KERJA/PPK	SPP	SPBy	%
		Jumlah	Jumlah	Persentase Tepat Waktu
1	Biro Perencanaan dan keuangan PPK I	444	128	100%
2	Inspektorat	6	77	100%
3	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi PPK II	62	498	100%
4	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan PPK III	100	603	100%
5	Biro Humas dan Protokol PPK IV	264	1734	100%
6	Biro Umum PPK V	272	1093	100%
7	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara PPK VI	20	275	100%
8	Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi PPK VII	82	183	100%
9	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi PPK VIII	73	139	100%
10	PPK IX	18	0	100%
	Total Penyelesaian	1341	4730	100%

Dari data tersebut dinyatakan bahwa Biro Humas dan Protokol telah secara 100% menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu untuk seluruh anggaran berjumlah Rp. 24.319.966.600 yang diproses melalui 264 SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan **1734 Spby** (Surat Perintah Bayar). Dengan angka tersebut, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol adalah pengelola Spby terbanyak dan diadministrasikan seluruhnya dengan tepat waktu.

Dalam konteks akuntansi sektor publik di Indonesia, SPP dan SPBy memiliki arti yang spesifik sebagai bagian dari prosedur administrasi keuangan pemerintah. Berikut penjelasan masing-masing:

1. SPP (Surat Perintah Pembayaran)

Dokumen yang digunakan dalam proses pembayaran di lingkungan instansi pemerintah. Dokumen ini digunakan untuk memerintahkan pembayaran atas suatu tagihan atau kewajiban yang harus dibayar oleh instansi pemerintah. SPP dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pejabat Pembuat Komitmen) setelah melalui proses verifikasi atas transaksi atau kegiatan yang telah dilakukan. Dokumen ini mencantumkan rincian mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan, pihak yang dibayar, dan keperluan pembayaran. SPP menjadi bagian dari administrasi pembayaran yang lebih besar, seperti SPM (Surat Perintah Membayar) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

2. SPBy (Surat Perintah Bayar)

Dokumen yang digunakan untuk memproses pembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. Dalam beberapa kasus, SPBy berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan pembayaran ke rekening yang tepat setelah SPP diajukan. SPBy diterbitkan setelah adanya verifikasi dan persetujuan dari pejabat yang berwenang (Pejabat pembuat Komitmen). SPBy merupakan salah satu tahapan dalam rangka pencairan dana pemerintah yang lebih besar dan berkaitan langsung dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

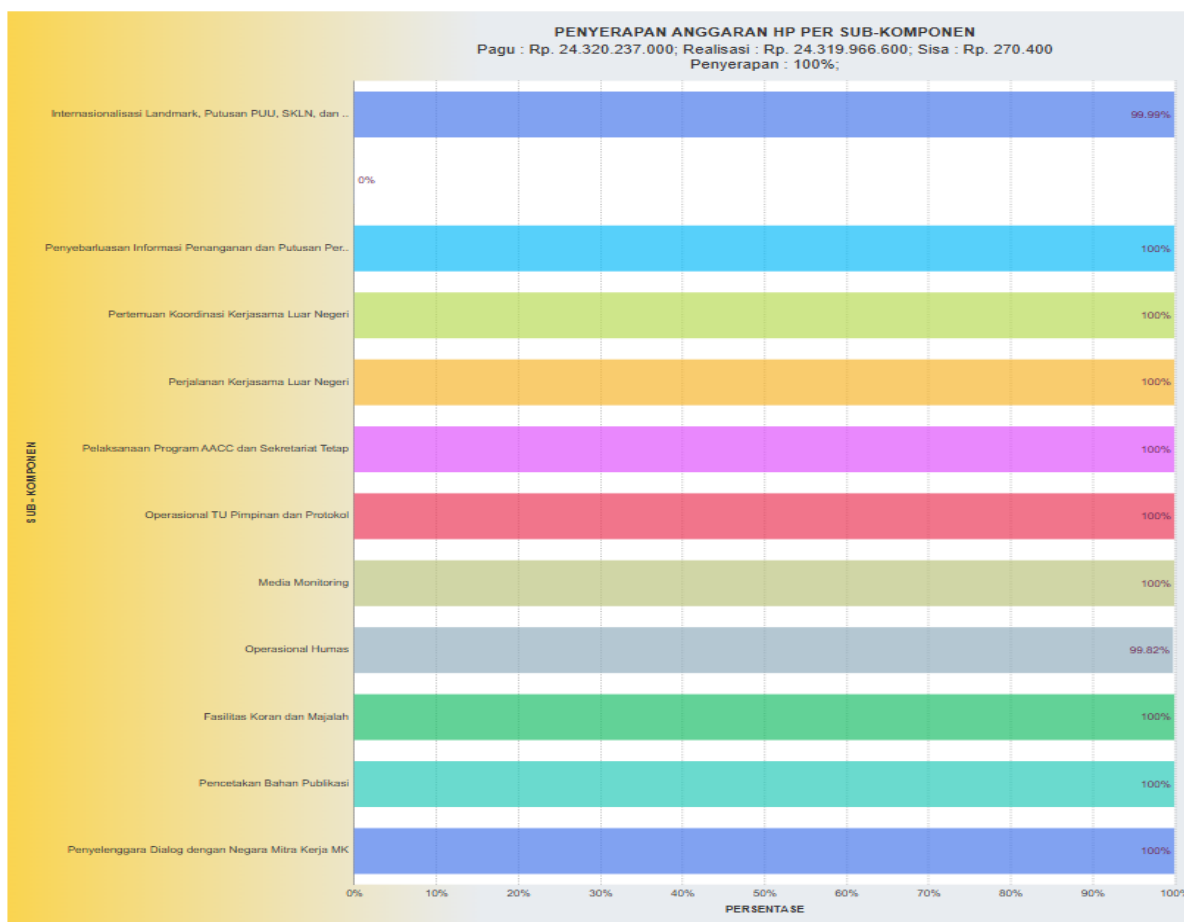
Adapun kriteria yang menjadi landasan penghitungan persentase ketepatan waktu, berdasarkan nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor 6050//KU.02/07/2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Batas Waktu Penyampaian Tagihan ke Bagian Keuangan, telah diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Penyampaian Tagihan Pekerjaan Barang/Jasa baik Kontraktual maupun Non-Kontraktual berupa SPP-LS dan/atau SPBy disertai dokumen pendukung, disampaikan ke Bagian Keuangan paling lambat **10 hari kerja** setelah tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) dan/atau Berita Acara Penyerahan Pekerjaan (BAPP) (sesuai dengan PMK Nomor 62 Tahun 2023, pasal 208 ayat (4) dan Pasal 218 huruf (b))
- Penyampaian tagihan SPD Nominatif ke Bagian Keuangan paling lambat **3 hari kerja** sebelum kegiatan dilaksanakan
- Penyampaian pertanggungjawaban SPD Rampung ke Bagian Keuangan paling lambat **7 hari kerja** setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Dengan pencapaian 100%, maka pertanggungjawaban Biro Humas dan Protokol telah memenuhi kriteria dimaksud tanpa catatan.

3.2. Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi SIVIKA, realisasi anggaran Biro Humas dan Protokol pada 2024 adalah sebesar Rp24.319.966.600,- atau **100%** dari pagu anggaran Rp24.320.237.000,-.



Adapun jika dirinci per-kegiatan dan per-komponen maka dapat disampaikan detail realisasi anggarannya sebagai berikut:

No.	Program/Komponen/Sub Komponen	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	Internasionalisasi Landmark, Putusan PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya	Rp450.263.000	Rp450.225.335	Rp37.665	100%
2	Penyebarluasan Informasi Penanganan dan Putusan Perkara PPHU Legislatif, PPHU Presiden dan Wakil Presiden	Rp11.447.771.000	Rp11.447.728.327	Rp42.673	100%
3	Pertemuan Koordinasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp88.737.000	Rp88.735.450	Rp1.550	100%
4	Perjalanan Kerja Sama Luar Negeri	Rp450.034.000	Rp450.032.990	Rp1.010	100%
5	Penyelenggara Dialog dengan Negara Mitra Kerja MK	Rp6.098.645.000	Rp6.098.621.058	Rp23.942	100%

6	Pelaksanaan Program AACC dan Sekretariat Tetap	Rp14.653.000	Rp14.652.963	Rp37	100%
7	Operasional TU Pimpinan dan Protokol	Rp4.316.558.000	Rp4.316.544.331	Rp13.669	100%
8	Media Monitoring	Rp237.118.000	Rp237.117.500	Rp500	100%
9	Operasional Humas	Rp82.201.000	Rp82.052.565	Rp148.435	100%
10	Fasilitas Koran dan Majalah	Rp375.335.000	Rp375.334.881	Rp119	100%
11	Pencetakan Bahan Publikasi	Rp758.922.000	Rp758.921.200	Rp800	100%
	TOTAL ANGGARAN	Rp24.320.237.000	Rp24.319.966.600	Rp270.400	100%

Tiap kegiatan mendapatkan capaian 100% menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran yang sangat efisien dan akuntabel telah tercapai. Anggaran yang telah terealisasi sepenuhnya mencerminkan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat selisih kecil yaitu senilai Rp270.400, capaian ini menandakan kinerja yang sangat baik dalam hal pengelolaan keuangan.

Pada 2023 Biro Humas dan Protokol mendapatkan anggaran Rp.49.881.535.000,- dengan realisasi Rp49.870.908.659 atau setara 99.98% dengan sisa anggaran Rp10.626.341,-. Terdapat **penurunan jumlah anggaran sejumlah Rp.25.561.298.000 atau hampir** lebih dari 50% dari tahun 2023 ke 2024. Adanya penurunan jumlah anggaran ini, merupakan penyesuaian bahwa pada 2024 merupakan tahun pemilu, di mana Mahkamah Konstitusi berfokus pada penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif, dan juga Kepala Daerah, sebagai salah satu tugas dan kewenangan MK. Selama 2024 kegiatan yang diselenggarakan MK, lebih banyak dipusatkan pada penanganan perkara pemilu. Sehingga berakibat pada perolehan anggaran yang diterima Biro Humas dan Protokol sebagai unit pendukung persidangan.

Selain itu, terdapat kebijakan Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 yang harus dilaksanakan MK untuk mendukung program pemerintah. Adanya penghematan itu, membuat anggaran yang dimiliki Biro Humas dan Protokol menjadi berkurang. Perolehan anggaran yang lebih sedikit serta adanya penghematan merupakan tantangan bagi Biro Humas dan Protokol untuk merencanakan

kegiatan yang lebih **terfokus** dan **terarah**. Dengan adanya capaian 100% pada realisasi anggaran Biro Humas dan Protokol pada 2024, mencerminkan adanya **peningkatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran**, serta pengoptimalan kegiatan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan 2023, menggambarkan bahwa meskipun terjadi **penurunan anggaran**, Biro Humas dan Protokol berhasil meningkatkan **efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan** di tahun 2024.

Perbandingan Anggaran Biro Humas dan Protokol pada 2023 dan 2024

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa	%
2023	Rp.49.881.535.000,-	Rp49.870.908.659	Rp10.626.341,-	99.98%
2024	Rp24.320.237.000,-	Rp24.319.966.600,-	Rp270.400,-	100%

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan Umum

Berdasarkan penjelasan dan penyajian data yang komprehensif melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro HP) Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa Biro Humas dan Protokol telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dilihat dari 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus dalam laporan kinerja ini yaitu: (1) Implementasi Akuntabilitas Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol; (2) Tingkat capaian pelaksanaan program dan kegiatan; serta (3) Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran.

Terkait dengan akuntabilitas kinerja, Biro Humas dan Protokol telah mematuhi standar dan format laporan kinerja instansi pemerintah yang sesuai dengan yang aturan yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB serta berdasarkan Persekjen 38 Tahun 2022 mengenai Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Unit Eselon I, dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selain itu, laporan kinerja ini juga telah menyesuaikan dengan Keputusan Sekjen Nomor 311 tahun 2024 mengenai Perubahan Keempat Indikator Kinerja Utama MK, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekjen serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat. Dalam hal ini, Biro Humas dan Protokol memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang masing-masing memiliki Indikator dan Target Capaian tahun 2024 dan 4 (empat) tahun target capaian sebelumnya.

Dalam hal capaian kinerja, Biro Humas dan Protokol berdasarkan penyajian data capaian kinerja Tahun 2024 di atas yang memuat penjelasan mengenai tingkat capaian kinerja yang menyeluruh menunjukkan capaian indikator kinerja sesuai dengan yang telah direncanakan. Bahkan apabila dilakukan perbandingan besaran target yang ditetapkan pada Tahun 2023, target capaian indikator kinerja Tahun 2024 hampir sebagian besar meningkat dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Biro Humas dan Protokol Tahun 2024 mencapai target yang lebih tinggi dibanding Tahun 2023. Salah satu capaian tersebut misalnya tercermin dari capaian prestasi Biro Humas dan Protokol dalam mencapai nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat sebesar 93,69 dari target capaian yang ditetapkan 90 atau mencapai 104,1%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang

memperoleh nilai 90,24 persen, Biro HP berhasil mendapatkan peningkatan kinerja sebesar 3,8%.

Selanjutnya mengenai tingkat capaian realisasi anggaran, berdasarkan pada data capaian dan serapan anggaran yang secara resmi tercatat dalam aplikasi SAKTI dan SIVIKA, Biro Humas dan Protokol berhasil mencapai target serapan anggaran sebesar 100% atau sejumlah Rp. 24.319.966.600 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan belas juta, sembilan ratus enam puluh enam ribu, enam ratus rupiah) per 31 Desember 2024. Capaian ini meningkat sebesar 0,02% dari tahun 2023 yang mencapai serapan anggaran 99,98%. Selain itu, data ini menunjukkan bahwa Biro Humas dan Protokol telah melakukan optimalisasi dan pengelolaan anggaran yang maksimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan *performance based budgeting* dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Selain itu terdapat beberapa kondisi khusus, seperti pergeseran alokasi anggaran yang cukup signifikan kepada Biro Humas dan Protokol dan kepercayaan serta mandat dari institusi mitra kerja internasional. Hal ini telah menunjukkan keandalan Biro Humas dan Protokol dalam penanganan program serta kegiatan yang baik terhadap situasi yang tidak terduga, di mana keduanya juga menghadirkan tantangan terkait manajemen anggaran dan koordinasi yang dapat diatasi melalui rekomendasi peningkatan kinerja.

4.2. Rekomendasi Peningkatan Kinerja

Merujuk kembali pada tujuan dasar dibuatnya LAKIP Biro Humas dan Protokol, yaitu selain untuk memberikan informasi kinerja yang dapat diukur kepada pihak yang memberikan mandat atas pencapaian yang seharusnya dilakukan, Laporan ini juga bermanfaat dalam membuat evaluasi pelaksanaan kinerja serta membuat langkah perbaikan dalam upaya meningkatkan kualitas rencana kerja dan capaian kinerja Biro Humas dan Protokol di masa depan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi rekomendasi peningkatan kinerja di Biro Humas dan Protokol, yaitu:

1. Terkait perencanaan kinerja dan penetapan capaian dan target realisasi pelaksanaan program, perlu dipertajam kembali penyusunan indikator kinerja yang lebih jelas dan terukur. Hal ini sangat penting untuk dapat menetapkan target yang spesifik dan realistis agar proses evaluasi dapat dilakukan secara bertahap selama tahun berjalan.
2. Perlu dibentuk tim evaluasi kinerja Biro Humas dan Protokol serta forum pembahasan evaluasi kinerja setiap triwulan pada setiap Bagian agar laporan kinerja dapat disusun secara bertahap, termasuk dalam menyikapi adanya kondisi yang tidak terduga, seperti

adanya optimalisasi anggaran ataupun pengurangan anggaran yang dapat berdampak pada kinerja dan pencapaian target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Biro Humas dan Protokol.

3. Untuk target capaian kinerja Tahun 2025 selain difokuskan pada peningkatan nilai mutu secara kuantitatif, perlu dilakukan perencanaan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan program dengan penetapan beberapa indikator kualitatif, terutama terkait *outcome* (dampak) dari program yang dilaksanakan.
4. Inovasi dan diversifikasi program-program kehumasan perlu dilakukan pada tahun 2025 dengan target capaian, yaitu peningkatan kepercayaan masyarakat yang dapat diukur melalui Survei Indeks Kepercayaan Publik dan Survei Kepuasan Layanan Publik terhadap Mahkamah Konstitusi.
5. Program kehumasan perlu didasarkan pada hasil evaluasi yang didapatkan melalui metode *evidence based policy* (hasil survei SNK) sehingga penyusunan rencana program kehumasan lebih akurat dan presisi menyesuaikan kebutuhan dan target group yang berdasarkan pada hasil riset.

Berdasarkan saran dan rekomendasi di atas, diharapkan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, sebagai unit kerja yang menjadi garda terdepan dalam memberikan akses informasi publik, kerja sama dengan mitra strategis, dan layanan terhadap pimpinan di Mahkamah Konstitusi, dapat meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerjanya di tahun 2025. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pula pada terciptanya sistem peradilan konstitusi yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif kepada para pencari keadilan (*justice seekers*).